

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2021



direktorat jenderal perhubungan darat



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs Budi Setiyadi, SH., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Lampiran.....	iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	24
C. PENJELASAN ATAS POS NERACA	46
D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL	96
E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	106
F. PENGUNGKAPAN LAINNYA	118



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Lampiran II	Rincian Jumlah PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran III	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan akun khusus COVID
Lampiran IV	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak menggunakan akun khusus COVID
Lampiran V	Rincian Belanja Modal Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan akun khusus COVID
Lampiran VI	Rincian Piutang PNPB dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran VII	Mutasi Persediaan per Satker
Lampiran VIII	Rincian Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
Lampiran IX	Mutasi Tanah per Satker
Lampiran X	Rincian Tanah
Lampiran XI	Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker
Lampiran XII	Mutasi Gedung dan Bangunan per Satker
Lampiran XIII	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaingan per Satker
Lampiran XIV	Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran XV	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran XVI	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XVII	Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker
Lampiran XVIII	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran XIX	Mutasi Aset Lain-lain per Satker
Lampiran XX	Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Lampiran XXI	Rekapitulasi Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XXII	Rincian Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XXIII	Rincian Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
Lampiran XXIV	Rincian Aset Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)
Lampiran XXV	Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp1.468.354.151.463,00** atau mencapai **121 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp1.215.972.400.000,00**. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp5.669.994.570.892,00** atau mencapai **99 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.734.252.848.000,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	1.215.972.400.000	1.468.354.151.463	1.030.326.926.000	1.233.405.670.587
Belanja	5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	5.748.848.778.000	5.631.173.929.193

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar **Rp22.027.188.475.815.00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp7.227.707.280.394,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp12.797.612.568.627,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp2.001.868.626.794,00**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp927.329.990,00** dan **Rp22.026.261.145.825,00**.

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 03

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	454,548,990	55,638,398	398,910,592	716.97
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	14,490,108,184	(14,490,108,184)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	9,009,297,384	242,122,923,862	(233,113,626,478)	(96.28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(487,928,987)	(1,653,497,119)	1,165,568,132	(70.49)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	8,521,368,397	240,469,426,743	(231,948,058,346)	(96.46)
Persediaan	7,218,731,363,007	6,189,818,103,583	1,028,913,259,424	16.62
JUMLAH ASET LANCAR	7,227,707,280,394	6,444,833,276,908	782,874,003,486	12.15
ASET TETAP				
Tanah	2,321,144,264,579	2,290,533,011,448	30,611,253,131	1.34
Peralatan dan Mesin	9,427,477,452,797	8,567,284,592,680	860,192,860,117	10.04
Gedung dan Bangunan	4,095,896,949,002	3,710,905,585,133	384,991,363,869	10.37
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,673,427,283,243	2,351,875,752,314	321,551,530,929	13.67
Aset Tetap Lainnya	292,310,019,918	389,521,476,006	(97,211,456,088)	(24.96)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,117,789,445,907	1,525,254,297,773	(407,464,851,866)	(26.71)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,130,432,846,819)	(6,363,692,007,041)	(766,740,839,778)	12.05
JUMLAH ASET TETAP	12,797,612,568,627	12,471,682,708,313	325,929,860,314	2.61
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	987,312,585,138	1,080,306,508,060	(92,993,922,922)	(8.61)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434,000,000	434,000,000	0	0.00
Aset Lain-lain	1,660,871,735,920	2,161,506,466,370	(500,634,730,450)	(23.16)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(646,749,694,264)	(776,216,351,875)	129,466,657,611	(16.68)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,001,868,626,794	2,466,030,622,555	(464,161,995,761)	(18.82)
JUMLAH ASET	22,027,188,475,815	21,382,546,607,776	644,641,868,039	3.01
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	472,781,000	507,442,250	(34,661,250)	(6.83)
Uang Muka dari KPPN	454,548,990	55,638,398	398,910,592	716.97
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	927,329,990	563,080,648	364,249,342	64.69
JUMLAH KEWAJIBAN	927,329,990	563,080,648	364,249,342	64.69
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,026,261,145,825	21,381,983,527,128	644,277,618,697	3.01
JUMLAH EKUITAS	22,026,261,145,825	21,381,983,527,128	644,277,618,697	3.01
JUMLAH EKUITAS	22,026,261,145,825	21,381,983,527,128	644,277,618,697	3.01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,027,188,475,815	21,382,546,607,776	644,641,868,039	3.01



Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	64,258,277,108	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	252,381,751,463	0
2.0	425287	Estimasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan Yang Dialokasikan	22,051,225,000	0
2.0	425511	Estimasi Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dialokasikan	1,181,321,400,000	0
2.0	425513	Estimasi Pendapatan Jasa Kepelabuhanan Yang Dialokasikan	3,679,980,000	0
2.0	425519	Estimasi Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya Yang Dialokasikan	8,919,795,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	173,810,678,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,932,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	13,711,627,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	4,295,182,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,424,257,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	377,005,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,961,749,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	11,188,542,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	31,461,360,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	161,917,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	8,921,786,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	11,170,841,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	189,058,110,000
2.0	512412	Allotment Belanja Pegawai Transito	0	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	223,731,063,000
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	0
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	16,088,698,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,628,470,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	19,095,828,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	110,124,414,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	36,959,731,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	13,254,315,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	80,892,586,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,221,404,777,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	128,290,521,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	55,018,618,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	104,870,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	120,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	17,932,543,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	3,379,878,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	1,670,591,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	13,335,734,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	1,535,739,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	78,742,078,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	10,948,750,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	14,984,152,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,820,492,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	80,970,317,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	825,349,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	580,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	108,836,814,000
2.0	523122	Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	1,620,624,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,799,106,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100,000,000
2.0	523131	Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	195,000,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,914,208,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	148,602,469,000
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	695,856,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2,580,128,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,433,091,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,017,980,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	31,120,161,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	177,386,000
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	164,246,311,000
2.0	526113	Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	61,989,216,000
2.0	526132	Allotment Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	77,746,619,000
2.0	526311	Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	7,241,564,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	8,652,115,000
2.0	531112	Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	3,760,000,000
2.0	531114	Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	46,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	972,357,406,000
2.0	532118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	87,000,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	109,574,564,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,800,000,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,104,613,958,000
2.0	533118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	9,145,166,000
2.0	533119	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	38,395,360,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	134,209,214,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	139,309,032,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,600,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

03

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,055,358,347
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	942,968,232
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,670,243,213
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	76,032,000
3.0	425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	0	66,117,000,000
3.0	425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	1,341,149,510,000
3.1	425511	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	472,055,000	0
3.0	425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	4,688,183,475
3.0	425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	0	1,254,290,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	10,251,040,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,691,402,484
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,322,700
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,040,343,278
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,596,987,276
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,500,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	239,425,458
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	168,044,820,570	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	4,471,400
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,650,175	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	18,063
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,505,151,814	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,986,832,557	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,021,908
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,381,605,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,065,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	356,740,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	355,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,251,778,652	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	10,902,311,760	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	941,460
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	28,841,486,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,230,250
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	161,060,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,687,160,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	20,172,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	10,447,226,900	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	800,000
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	185,480,235,101	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	219,820,560

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	222,243,012,621	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	14,593,277
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15,816,853,460	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,533,064,867	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,558,911,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	38,160,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	109,061,549,350	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,530,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,678,672,297	0
3.1	521131	Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,720
3.0	521211	Belanja Bahan	13,065,317,182	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	78,883,766,874	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	65,520,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,201,200,187,850	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,103,000
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127,671,161,849	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,732,607,800	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	8,818,821
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	104,870,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	119,463,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	16,874,731,963	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	10,549,139
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,215,797,895	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,422,748,514	0
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	1,789,295
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,447,560,659	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,737,644
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,501,330,900	0
3.0	522141	Belanja Sewa	77,549,942,531	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,690,739,700	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	14,317,611,224	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,020,283,491	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,463,338,864	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	760,641,238	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	579,990,650	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108,137,611,856	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	70,410,000
3.0	523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1,619,680,517	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,755,179,869	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

03

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,500,000	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	194,819,900	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,846,563,566	0
3.1	523199	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	2,201,100
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	147,877,670,711	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	46,765,000
3.0	524112	Belanja Perjalanan Tetap	694,823,605	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,468,506,619	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,202,796,099	0
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,017,673,900	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,384,961,811	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	177,386,000	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	163,803,360,146	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	61,117,770,470	0
3.0	526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	76,840,997,459	0
3.0	526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7,184,791,716	0
3.1	526311	Pengembalian Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2,110,884
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	8,400,201,680	0
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	3,759,060,000	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	4,354,380	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968,826,003,199	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	62,272,300
3.0	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	86,903,500	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	108,850,155,644	0
3.1	532119	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	38,257,682
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,755,724,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,100,720,591,730	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	12,859,681
3.0	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	9,145,165,600	0
3.0	533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	38,373,902,952	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	133,869,046,121	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	137,847,738,918	0
JUMLAH			7,203,710,640,647	7,203,710,640,647

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

03

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	135,847	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	454,413,143	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,909,265,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	100,032,384	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	487,428,825
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	500,162
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,779,212,782	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	122,971,895	0
0.0	117114	Suku Cadang	28,771,150	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,261,508,663,508	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,143,910,253,702	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,668,627,207,994	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	84,732,118,799	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9,911,050,130	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	6,744,940,789	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	15,366,172,258	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	2,321,144,264,579	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,427,477,452,797	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,095,896,949,002	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,111,482,787,523	0
0.0	134112	Irigasi	1,523,075,686,283	0
0.0	134113	Jaringan	38,868,809,437	0
0.0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	281,418,846,109	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,891,173,809	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,117,789,445,907	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,964,123,935,731
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	667,063,725,200
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	192,066,295,765
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	290,890,294,677

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

03

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	16,266,595,446
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,000,000
0.0	162151	Software	44,089,527,334	0
0.0	162161	Lisensi	588,676,250	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	540,762,418,164	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	401,871,963,390	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,580,275,670,920	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	80,596,065,000	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	620,040,311,393
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	26,231,040,645
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	147,169,063
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	38,993,163
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	292,180,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	232,375,000
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	240,406,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	454,548,990
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,669,994,570,892
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,468,354,151,463	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,184,315,735,721	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,130,482,543,762
0.0	391111	Ekuitas	0	21,381,983,527,128
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	341,638,622,549	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	558,190,461,024	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	54,967,822,908	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	245,538,166,530	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	102,572,019,724
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	1,165,245,808,006
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,600,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,055,358,347
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	942,968,232
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,670,243,213
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	76,032,000
3.0	425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	0	66,117,000,000
3.0	425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	1,341,149,510,000
3.1	425511	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	472,055,000	0
3.0	425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	4,688,183,475

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	1,254,290,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	10,251,040,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,691,402,484
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,322,700
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26,040,343,278
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,596,987,276
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,500,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	239,425,458
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	6,621,650,293
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	52,260,649
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	168,044,820,570	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	4,471,400
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,650,175	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	18,063
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13,505,151,814	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,986,832,557	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	1,021,908
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,381,605,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,065,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	356,740,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	355,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,251,778,652	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	10,902,311,760	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	941,460
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	28,841,486,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	1,230,250
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	161,060,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,687,160,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	20,172,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	10,447,226,900	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	800,000
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	185,480,235,101	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	219,820,560
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	222,243,012,621	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	14,593,277
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	15,834,883,460	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,533,064,867	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,562,911,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	38,160,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	108,861,550,350	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	1,530,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,678,672,297	0
3.1	521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,720
3.0	521211	Beban Bahan	13,065,317,182	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	78,883,766,874	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	65,520,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,200,719,992,850	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	2,103,000
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127,671,161,849	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	16,874,731,963	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	10,549,139
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,215,797,895	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,422,748,514	0
3.1	522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	1,789,295
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,447,560,659	0
3.1	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,737,644
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,501,330,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	77,549,942,531	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,690,739,700	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	13,088,366,724	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12,020,283,491	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,463,338,864	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	579,990,650	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108,102,950,606	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	70,410,000
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1,619,680,517	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,500,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	194,819,900	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,846,563,566	0
3.1	523199	Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	0	2,201,100
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	147,877,670,711	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	46,765,000
3.0	524112	Beban Perjalanan Tetap	694,823,605	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,468,506,619	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,202,796,099	0
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,017,673,900	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,384,961,811	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	177,386,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,019,339,938,837	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	110,745,588,188	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33,135,074,559	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	109,133,232,975	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,292,229,988	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5,500,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	9,067,983,341	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	58,867,625	0
3.0	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	19,528,775	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	80,201,291,300	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	69,489,521,141	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	826,668,510	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	189,100,656	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	186,938,879,259	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	188,158,895,521	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	32,738,047,600	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,047,094,205	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	381,769,214	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	627,205,520	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	11,198,900	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	411,457,763,919	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	36,755,576	0
JUMLAH			39,704,883,653,793	39,704,883,653,793

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,434,666,571,630	1,219,736,276,464	214,930,295,166	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,434,666,571,630	1,219,736,276,464	214,930,295,166	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,434,666,571,630	1,219,736,276,464	214,930,295,166	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	433,799,162,888	427,211,038,835	6,588,124,053	-
Beban Persediaan	71,918,384,560	60,340,157,300	11,578,227,260	-
Beban Barang dan Jasa	1,972,355,046,172	1,431,913,615,522	540,441,430,650	-
Beban Pemeliharaan	193,861,201,069	150,145,292,125	43,715,908,944	-
Beban Perjalanan Dinas	191,777,053,745	231,980,118,482	(40,203,064,737)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	407,835,822,380	479,217,130,493	(71,381,308,113)	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,362,999,235,588	1,414,103,022,282	(51,103,786,694)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	2,413,369	(2,413,369)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	4,634,545,906,402	4,194,912,788,408	439,633,117,994	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,199,879,334,772)	(2,975,176,511,944)	(224,702,822,828)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(409,432,837,340)	(228,709,704,515)	(180,723,132,825)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,024,926,579	949,221,661	1,075,704,918	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	411,457,763,919	229,658,926,176	181,798,837,743	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	38,299,808,620	196,713,165,661	(158,413,357,041)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	38,336,564,196	310,471,628,848	(272,135,064,652)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,755,576	113,758,463,187	(113,721,707,611)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(371,133,028,720)	(31,996,538,854)	(339,136,489,866)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,571,012,363,492)	(3,007,173,050,798)	(563,839,312,694)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,571,012,363,492)	(3,007,173,050,798)	(563,839,312,694)	-

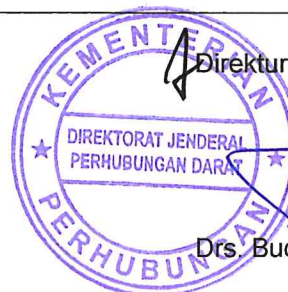
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	27,779,212,782
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	122,971,895
117114	Suku Cadang	28,771,150
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,261,508,663,508
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	2,143,910,253,702
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,668,627,207,994
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	84,732,118,799
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9,911,050,130
117131	Bahan Baku	6,744,940,789
117199	Persediaan Lainnya	15,366,172,258
131111	Tanah	2,321,144,264,579
132111	Peralatan dan Mesin	9,427,477,452,797
133111	Gedung dan Bangunan	4,095,896,949,002
134111	Jalan dan Jembatan	1,111,482,787,523
134112	Irigasi	1,523,075,686,283
134113	Jaringan	38,868,809,437
135111	Aset Tetap Renovasi	281,418,846,109
135121	Aset Tetap Lainnya	10,891,173,809
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,117,789,445,907
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,964,123,935,731)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(667,063,725,200)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(192,066,295,765)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(290,890,294,677)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(16,266,595,446)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(22,000,000)
162151	Software	44,089,527,334
162161	Lisensi	588,676,250
162171	Hasil Kajian/Penelitian	540,762,418,164
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	401,871,963,390
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,580,275,670,920
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	80,596,065,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(620,040,311,393)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(26,231,040,645)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(147,169,063)
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(38,993,163)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(292,180,000)
J U M L A H		22,018,212,558,428



Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	27,982,782,425
10107	NATURA DAN PAKAN	11,109,000
Jumlah NATURA DAN PAKAN		27,993,891,425
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	123,621,895
Jumlah ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR		123,621,895
117114	Suku Cadang	
10102	SUKU CADANG	28,771,150
Jumlah SUKU CADANG		28,771,150
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	3,276,420,708,834
Jumlah PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		3,276,420,708,834
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	2,151,953,475,702
Jumlah PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		2,151,953,475,702
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	1,801,236,454,566
Jumlah PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		1,801,236,454,566
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	108,564,466,058
Jumlah PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		108,564,466,058
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	9,911,050,130
Jumlah PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		9,911,050,130
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
10109	PERSEDIAAN DALAM PROSES	2,592,029,789
Jumlah PERSEDIAAN DALAM PROSES		2,592,029,789
117131	Bahan Baku	
10101	BAHAN	6,744,940,789
Jumlah BAHAN		6,744,940,789
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	106,217,725
10201	KOMPONEN	12,362,267,533
10203	RAMBU-RAMBU	2,897,687,000
Jumlah RAMBU-RAMBU		15,366,172,258
Jumlah		7,400,935,582,596

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



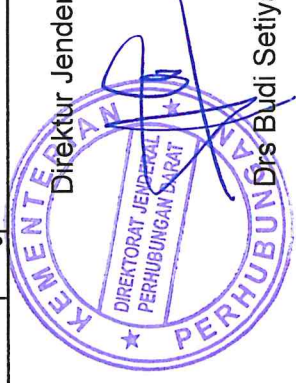
Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DIREKTORAT PERHUBUNGAN DARAT

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,215,972,400,000	1,468,354,151,463	252,381,751,463	121	1,030,326,926,000	1,233,405,670,587	203,078,744,587	120
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,215,972,400,000	1,468,354,151,463	252,381,751,463	121	1,030,326,926,000	1,233,405,670,587	203,078,744,587	120
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	448,546,986,000	433,799,162,888	(14,747,823,112)	97	447,943,007,000	427,317,380,464	(20,625,626,536)	95
	BELANJA BARANG	2,763,756,047,000	2,724,669,949,443	(39,086,097,557)	99	2,692,737,524,000	2,629,271,105,390	(63,466,418,610)	98
	BELANJA MODAL	2,521,949,815,000	2,511,525,458,561	(10,424,356,439)	100	2,608,168,247,000	2,574,585,443,339	(33,582,803,661)	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	5,734,252,848,000	5,669,994,570,892	(64,258,277,108)	99	5,748,848,778,000	5,631,173,929,193	(117,674,848,807)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs Budi Setiyadi, SH., M.Si

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	198,914,281,000	173,810,678,000	168,044,820,570	4,471,400	168,040,349,170	96.68	5,770,328,830
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,189,000	3,932,000	2,650,175	18,063	2,632,112	66.94	1,299,888
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,763,043,000	13,711,627,000	13,505,151,814	0	13,505,151,814	98.49	206,475,186
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,455,294,000	4,295,182,000	3,986,832,557	1,021,908	3,985,810,649	92.8	309,371,351
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,212,480,000	2,424,257,000	2,381,605,000	1,065,000	2,380,540,000	98.2	43,717,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	553,770,000	377,005,000	356,740,000	355,000	356,385,000	94.53	20,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,224,727,000	1,961,749,000	1,251,778,652	0	1,251,778,652	63.81	709,970,348
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,378,899,000	11,188,542,000	10,902,311,760	941,460	10,901,370,300	97.43	287,171,700
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,772,412,000	31,461,360,000	28,841,486,000	1,230,250	28,840,255,750	91.67	2,621,104,250
511129	Belanja Uang Makan PNS	153,600,000	161,917,000	161,060,000	0	161,060,000	99.47	857,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	9,483,037,000	8,921,786,000	8,687,160,000	20,172,000	8,666,988,000	97.14	254,798,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	281,915,732,000	248,318,035,000	238,121,596,528	29,275,081	238,092,321,447	95.89	10,225,713,553
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111								
5122	Belanja Lembur	14,201,350,000	11,170,841,000	10,447,226,900	800,000	10,446,426,900	93.52	724,414,100
512211	Belanja Uang Lembur	14,201,350,000	11,170,841,000	10,447,226,900	800,000	10,446,426,900	93.52	724,414,100
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122								
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	244,988,364,000	189,058,110,000	185,480,235,101	219,820,560	185,260,414,541	97.99	3,797,695,459
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	244,988,364,000	189,058,110,000	185,480,235,101	219,820,560	185,260,414,541	98.11	3,797,695,459
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124								
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51		541,105,446,000	448,546,986,000	434,049,058,529	249,895,641	433,799,162,888	96.77	147,478,231,112
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	194,526,789,000	223,731,063,000	222,243,012,621	14,593,277	222,228,419,344	99.33	1,502,643,656
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	83,370,000	0	0	0	0	0	0
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	27,186,009,000	16,088,698,000	15,816,853,460	0	15,816,853,460	98.31	271,844,540
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,214,355,000	1,628,470,000	1,533,064,867	0	1,533,064,867	94.14	95,405,133
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,186,659,000	19,095,828,000	18,558,911,000	38,160,000	18,520,751,000	96.99	575,077,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	112,781,542,000	110,124,414,000	109,051,549,350	1,530,000	109,060,019,350	99.03	1,064,394,650
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,361,000,000	36,959,731,000	36,678,672,297	12,720	36,678,689,577	99.24	281,071,423
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	357,339,724,000	407,628,204,000	403,892,063,595	54,295,997	403,837,767,598	99.08	3,790,436,402
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211								
5212	Belanja Barang Non Operasional	18,635,084,000	13,254,315,000	13,065,317,182	0	13,065,317,182	98.57	188,997,818
521211	Belanja Bahan	121,011,813,000	80,892,586,000	78,883,766,874	65,520,000	78,818,246,874	97.44	2,074,339,126
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,589,696,502,000	1,221,404,777,000	1,201,200,187,85	2,103,000	1,201,198,084,85	98.35	20,206,692,150
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90,336,243,000	128,290,521,000	127,671,161,849	0	127,671,161,849	99.52	619,359,151
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,819,679,642,000	1,443,842,199,000	1,420,820,433,755	67,623,000	1,420,752,810,755	98.41	23,089,388,245	
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,613,059,000	55,018,618,000	54,732,607,800	8,818,821	54,723,788,979	99.46	294,829,021	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	336,634,000	104,870,000	104,870,000	0	104,870,000	100	0	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	120,000,000	119,463,300	0	119,463,300	99.55	536,700	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	19,949,693,000	55,243,488,000	54,956,941,100	8,818,821	54,948,122,279	99.48	295,365,721	
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	27,052,950,000	17,932,543,000	16,874,731,963	10,549,139	16,864,182,824	94.04	1,068,360,176	
522112	Belanja Langganan Telepon	3,613,540,000	3,379,878,000	3,215,797,895	0	3,215,797,895	95.15	164,080,105	
522113	Belanja Langganan Air	2,664,915,000	1,670,591,000	1,422,748,514	1,789,295	1,420,959,219	85.06	249,631,781	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17,169,032,000	13,335,734,000	12,447,560,659	3,737,644	12,443,823,015	93.31	891,910,985	
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,775,600,000	1,535,739,000	1,501,330,900	0	1,501,330,900	97.76	34,408,100	
522141	Belanja Jasa Sewa	71,294,719,000	78,742,078,000	77,549,942,531	0	77,549,942,531	98.49	1,192,135,469	
522151	Belanja Jasa Profesi	20,361,999,000	10,948,750,000	9,690,739,700	0	9,690,739,700	88.51	1,258,010,300	
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,772,340,000	14,984,152,000	14,317,611,224	0	14,317,611,224	95.55	666,540,776	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,820,492,000	12,020,283,491	0	12,020,283,491	93.76	800,208,509	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	157,705,095,000	155,349,957,000	149,040,746,877	16,076,078	149,024,670,799	95.94	6,325,286,201	
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,113,133,000	80,970,317,000	80,463,338,864	0	80,463,338,864	99.37	506,978,136	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	890,000,000	825,349,000	760,641,238	0	760,641,238	92.16	64,707,762	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	200,000,000	580,000,000	579,990,650	0	579,990,650	100	9,350	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207,752,576,000	108,836,814,000	108,137,611,856	70,410,000	108,067,201,856	99.29	769,612,144	
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	3,359,401,000	1,620,624,000	1,619,680,517	0	1,619,680,517	99.94	943,483	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	2,084,258,000	1,799,106,000	1,755,179,869	0	1,755,179,869	97.56	43,926,131	
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100,000,000	99,500,000	0	99,500,000	99.5	500,000	
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	195,000,000	194,819,900	0	194,819,900	99.91	180,100	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	9,052,979,000	1,914,208,000	1,846,563,566	2,201,100	1,844,362,466	96.35	69,845,534	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	325,452,347,000	196,841,418,000	195,457,326,460	72,611,100	195,384,715,360	99.3	1,456,702,640	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	198,205,282,000	148,602,469,000	147,877,670,711	46,765,000	147,830,905,711	99.48	771,563,289	
524112	Belanja Perjalanan Tetap	1,549,314,000	695,856,000	694,823,605	0	694,823,605	99.85	1,032,395	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,258,470,000	2,580,128,000	2,468,506,619	0	2,468,506,619	95.67	111,621,381	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,402,121,000	9,433,091,000	9,202,796,099	0	9,202,796,099	97.56	230,294,901	
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-	462,851,000	1,017,980,000	1,017,673,900	0	1,017,673,900	99.97	306,100	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,289,928,000	31,120,161,000	30,384,961,811	0	30,384,961,811	97.64	735,199,189	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	283,167,966,000	193,449,685,000	191,646,432,745	46,765,000	191,599,667,745	99.07	1,850,017,255	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	7=5+6		
1	2	3	4	5	6			8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri								
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	4,011,751,000	177,386,000	177,386,000	0	177,386,000	0	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,011,751,000	177,386,000	177,386,000	0	177,386,000	0	100	0
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/								
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	316,125,389,000	164,246,311,000	163,803,360,146	0	163,803,360,146	0	99.73	442,950,854
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	106,498,871,000	61,989,216,000	61,117,770,470	0	61,117,770,470	0	98.59	871,445,530
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada	0	77,746,619,000	76,840,997,459	0	76,840,997,459	0	98.84	905,621,541
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	422,624,260,000	303,982,146,000	301,762,128,075	0	301,762,128,075	0	99.27	2,220,017,925
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada								
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	19,676,058,000	7,241,564,000	7,184,791,716	2,110,884	7,182,680,832	7,182,680,832	99.19	58,883,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	19,676,058,000	7,241,564,000	7,184,791,716	2,110,884	7,182,680,832	7,182,680,832	99.22	58,883,168
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,409,606,536,000	2,763,756,047,000	2,724,938,250,323	268,300,880	2,724,669,949,443	2,724,669,949,443	98.6	39086097557
53	BELANJA MODAL								
5311	Belanja Modal Tanah								
531111	Belanja Modal Tanah	50,000,000,000	8,652,115,000	8,400,201,680	0	8,400,201,680	0	97.09	251,913,320
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	3,760,000,000	3,759,060,000	0	3,759,060,000	0	99.98	940,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	46,000,000	4,354,380	0	4,354,380	0	9.47	41,645,620
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	50,000,000,000	12,458,115,000	12,163,616,060	0	12,163,616,060	0	97.64	294,498,940
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,195,189,794,00	972,357,406,000	968,826,003,199	62,272,300	968,763,730,899	968,763,730,899	99.63	3,593,675,101
532118	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	87,000,000	86,903,500	0	86,903,500	0	99.89	96,500
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	109,574,564,000	108,850,155,644	38,257,682	108,811,897,962	108,811,897,962	99.3	762,666,038
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,800,000,000	1,755,724,500	0	1,755,724,500	0	97.54	44,275,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,195,189,794,000	1,083,818,970,000	1,079,518,786,843	100,529,982	1,079,418,256,861	1,079,418,256,861	99.6	4,400,713,139
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,818,627,911,00	1,104,613,958,00	1,100,720,591,73	12,859,681	1,100,707,732,04	1,100,707,732,04	99.65	3,906,225,951
533118	Belanja Modal Perijanaan Gedung dan Bangunan	38,148,319,000	9,145,166,000	9,145,165,600	0	9,145,165,600	0	100	400
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	38,395,360,000	38,373,902,952	0	38,373,902,952	0	99.94	21,457,048
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	290,219,784,000	134,209,214,000	133,869,046,121	0	133,869,046,121	0	99.75	340,167,879
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,146,996,014,000	1,286,363,698,000	1,282,108,706,403	12,859,681	1,282,095,846,722	1,282,095,846,722	99.67	4,267,851,278

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	198,914,281,000	173,810,678,000	168,044,820,570	4,471,400	168,040,349,170	96.68	5,770,328,830
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,189,000	3,932,000	2,650,175	18,063	2,632,112	66.94	1,299,888
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,763,043,000	13,711,627,000	13,505,151,814	0	13,505,151,814	98.49	206,475,186
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,455,294,000	4,295,182,000	3,986,832,557	1,021,908	3,985,810,649	92.8	309,371,351
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,212,480,000	2,424,257,000	2,381,605,000	1,065,000	2,380,540,000	98.2	43,717,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	553,770,000	377,005,000	356,740,000	355,000	356,385,000	94.53	20,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,224,727,000	1,961,749,000	1,251,778,652	0	1,251,778,652	63.81	709,970,348
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,378,899,000	11,188,542,000	10,902,311,760	941,460	10,901,370,300	97.43	287,171,700
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	37,772,412,000	31,461,360,000	28,841,486,000	1,230,250	28,840,255,750	91.67	2,621,104,250
511129	Belanja Uang Makan PNS	153,600,000	161,917,000	161,060,000	0	161,060,000	99.47	857,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	9,483,037,000	8,921,786,000	8,687,160,000	20,172,000	8,666,988,000	97.14	254,798,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	281,915,732,000	248,318,035,000	238,121,596,528	29,275,081	238,092,321,447	95.89	10,225,713,553
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	14,201,350,000	11,170,841,000	10,447,226,900	800,000	10,446,426,900	93.52	724,414,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	14,201,350,000	11,170,841,000	10,447,226,900	800,000	10,446,426,900	93.52	724,414,100
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	244,988,364,000	189,058,110,000	185,480,235,101	219,820,560	185,260,414,541	97.99	3,797,695,459
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	244,988,364,000	189,058,110,000	185,480,235,101	219,820,560	185,260,414,541	98.11	3,797,695,459
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	541,105,446,000	448,546,986,000	434,049,058,529	249,895,641	433,799,162,888	96.77	14747823112
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	194,526,789,000	223,731,063,000	222,243,012,621	14,593,277	222,228,419,344	99.33	1,502,643,656
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	83,370,000	0	0	0	0	0	0
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,186,009,000	16,088,698,000	15,816,853,460	0	15,816,853,460	98.31	271,844,540
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,214,355,000	1,628,470,000	1,533,064,867	0	1,533,064,867	94.14	95,405,133
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,186,659,000	19,095,828,000	18,558,911,000	38,160,000	18,520,751,000	96.99	575,077,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	112,781,542,000	110,124,414,000	109,061,549,350	1,530,000	109,060,019,350	99.03	1,064,394,650
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	3,361,000,000	36,959,731,000	36,678,672,297	12,720	36,678,659,577	99.24	281,071,423
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	357,339,724,000	407,628,204,000	403,892,063,595	54,295,997	403,837,767,598	99.08	3,790,436,402
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,635,084,000	13,254,315,000	13,065,317,182	0	13,065,317,182	98.57	188,997,818
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	121,011,813,000	80,892,586,000	78,883,766,874	65,520,000	78,818,246,874	97.44	2,074,339,126
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,589,696,502,00	1,221,404,777,00	1,201,200,187,85	2,103,000	1,201,198,084,85	98.35	20,206,692,150
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	90,336,243,000	128,290,521,000	127,671,161,849	0	127,671,161,849	99.52	619,359,151

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				Jumlah S/D Bulan Ini	Pengembalian S/D Bulan Ini	Jumlah Netto S/D Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5212	1,819,679,642,000	1,443,842,199,000	1,420,820,433,755	67,623,000	1,420,752,810,755	98.41	23,089,388,245
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,613,059,000	55,018,618,000	54,732,607,800	8,818,821	54,723,788,979	99.46	294,829,021
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	336,634,000	104,870,000	104,870,000	0	104,870,000	100	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	120,000,000	119,463,300	0	119,463,300	99.55	536,700
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5218	19,949,693,000	55,243,488,000	54,956,941,100	8,818,821	54,948,122,279	99.48	295,365,721
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	27,052,950,000	17,932,543,000	16,874,731,963	10,549,139	16,864,182,824	94.04	1,068,360,176
522112	Belanja Langganan Telepon	3,613,540,000	3,379,878,000	3,215,797,895	0	3,215,797,895	95.15	164,080,105
522113	Belanja Langganan Air	2,664,915,000	1,670,591,000	1,422,748,514	1,789,295	1,420,959,219	85.06	249,631,781
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17,169,032,000	13,335,734,000	12,447,560,659	3,737,644	12,443,823,015	93.31	891,910,985
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,775,600,000	1,535,739,000	1,501,330,900	0	1,501,330,900	97.76	34,408,100
522141	Belanja Sewa	71,294,719,000	78,742,078,000	77,549,942,531	0	77,549,942,531	98.49	1,192,135,469
522151	Belanja Jasa Profesi	20,361,999,000	10,948,750,000	9,690,739,700	0	9,690,739,700	88.51	1,258,010,300
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,772,340,000	14,984,152,000	14,317,611,224	0	14,317,611,224	95.55	666,540,776
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,820,492,000	12,020,283,491	0	12,020,283,491	93.76	800,208,509
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5221	157,705,095,000	155,349,957,000	149,040,746,877	16,076,078	149,024,670,799	95.94	6,325,286,201
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,113,133,000	80,970,317,000	80,463,338,864	0	80,463,338,864	99.37	506,978,136
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	890,000,000	825,349,000	760,641,238	0	760,641,238	92.16	64,707,762
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	200,000,000	580,000,000	579,990,650	0	579,990,650	100	9,350
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207,752,576,000	108,836,814,000	108,137,611,856	70,410,000	108,067,201,856	99.29	769,612,144
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	3,359,401,000	1,620,624,000	1,619,680,517	0	1,619,680,517	99.94	943,483
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	2,084,258,000	1,799,106,000	1,755,179,869	0	1,755,179,869	97.56	43,926,131
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100,000,000	99,500,000	0	99,500,000	99.5	500,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	195,000,000	194,819,900	0	194,819,900	99.91	180,100
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	9,052,979,000	1,914,208,000	1,846,563,566	2,201,100	1,844,362,466	96.35	69,845,534
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5231	325,452,347,000	196,841,418,000	195,457,326,460	72,611,100	195,384,715,360	99.3	1,456,702,640
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	198,205,282,000	148,602,469,000	147,877,670,711	46,765,000	147,830,905,711	99.48	771,563,289
524112	Belanja Perjalanan Tetap	1,549,314,000	695,856,000	694,823,605	0	694,823,605	99.85	1,032,395
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,258,470,000	2,580,128,000	2,468,506,619	0	2,468,506,619	95.67	111,621,381
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,402,121,000	9,433,091,000	9,202,796,099	0	9,202,796,099	97.56	230,294,901
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-	462,851,000	1,017,980,000	1,017,673,900	0	1,017,673,900	99.97	306,100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,289,928,000	31,120,161,000	30,384,961,811	0	30,384,961,811	97.64	735,199,189
	Jumlah Sub Kelompok Belanja 5241	283,167,966,000	193,449,685,000	191,646,432,745	46,765,000	191,599,667,745	99.07	1,850,017,255

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	4,011,751,000	177,386,000	177,386,000	0	177,386,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,011,751,000	177,386,000	177,386,000	0	177,386,000	100	0
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	316,125,389,000	164,246,311,000	163,803,360,146	0	163,803,360,146	99.73	442,950,854
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	106,498,871,000	61,989,216,000	61,117,770,470	0	61,117,770,470	98.59	871,445,530
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada	0	77,746,619,000	76,840,997,459	0	76,840,997,459	98.84	905,621,541
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	422,624,260,000	303,982,146,000	301,762,128,075	0	301,762,128,075	99.27	2,220,017,925
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	19,676,058,000	7,241,564,000	7,184,791,716	2,110,884	7,182,680,832	99.19	58,883,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	19,676,058,000	7,241,564,000	7,184,791,716	2,110,884	7,182,680,832	99.22	58,883,168
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,409,606,536,000	2,763,756,047,000	2,724,938,250,323	268,300,880	2,724,669,949,443	98.6	39086097557
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	50,000,000,000	8,652,115,000	8,400,201,680	0	8,400,201,680	97.09	251,913,320
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	3,760,000,000	3,759,060,000	0	3,759,060,000	99.98	940,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	46,000,000	4,354,380	0	4,354,380	9.47	41,645,620
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	50,000,000,000	12,458,115,000	12,163,616,060	0	12,163,616,060	97.64	294,498,940
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,195,189,794,000	972,357,406,000	968,826,003,199	62,272,300	968,763,730,899	99.63	3,593,675,101
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	87,000,000	86,903,500	0	86,903,500	99.89	96,500
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	109,574,564,000	108,850,155,644	38,257,682	108,811,897,962	99.3	762,666,038
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,800,000,000	1,755,724,500	0	1,755,724,500	97.54	44,275,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,195,189,794,000	1,083,818,970,000	1,079,518,786,843	100,529,982	1,079,418,256,861	99.6	4,400,713,139
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,818,627,911,000	1,104,613,958,000	1,100,720,591,73	12,859,681	1,100,707,732,04	99.65	3,906,225,951
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	38,148,319,000	9,145,166,000	9,145,165,600	0	9,145,165,600	100	400
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	38,395,360,000	38,373,902,952	0	38,373,902,952	99.94	21,457,048
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	290,219,784,000	134,209,214,000	133,869,046,121	0	133,869,046,121	99.75	340,167,879
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	2,146,996,014,000	1,286,363,698,000	1,282,108,706,403	12,859,681	1,282,095,846,722	99.67	4,267,851,278

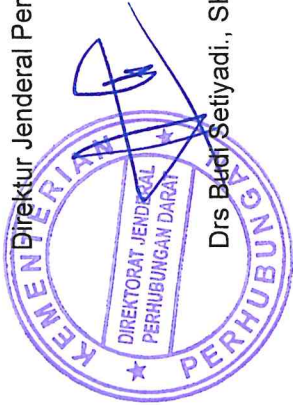
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
 TINGKAT ESELON I
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
 ESELON I : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	165,655,288,000	139,309,032,000	137,847,738,918		137,847,738,918	98.95	1,461,293,082
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	165,655,288,000	139,309,032,000	137,847,738,918	0	137,847,738,918	98.95	1,461,293,082
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,557,841,096,000	2,521,949,815,000	2,511,638,848,224	113,389,663	2,511,525,458,561	99.59	10424356439
	JUMLAH BELANJA	7,508,553,078,000	5,734,252,848,000	5,670,626,157,076	631,586,184	5,669,994,570,892	98.89	64,258,277,108

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs Budi Setiyadi., SH., M.Si

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021		
KODE	URAIAN	KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI
				KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
131111	Tanah	6,130,543	2,290,533,011,448	1,781,879	655,637,363,088	2,322,427	625,026,109,957	5,589,995	2,321,144,264,579		
20101	TANAH PERSIL	5,460,815	2,114,756,017,930	1,572,506	550,699,066,118	2,141,978	520,793,108,017	4,891,343	2,144,661,976,031		
20102	TANAH NON PERSIL	662,038	175,466,093,518	209,373	104,938,296,970	180,449	104,233,001,940	690,962	176,171,388,548		
20103	LAPANGAN	7,690	310,900,000	0	0	0	0	7,690	310,900,000		
132111	Peralatan dan Mesin	274,092	8,567,284,592,680	99,364	3,251,236,375,529	81,848	2,391,043,515,412	291,608	9,427,477,452,797		
30101	ALAT BESAR DARAT	9	5,654,901,795	1	7,700,000	1	7,700,000	9	5,654,901,795		
30103	ALAT BANTU	208	40,934,389,801	102	5,942,332,067	90	3,268,851,841	220	43,607,870,027		
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,911	1,268,861,613,586	1,100	799,893,982,000	930	719,045,052,318	2,081	1,349,710,543,268		
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	520	1,809,248,450	457	1,223,801,793	384	968,931,333	593	2,064,118,910		
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	77	1,075,075,872,661	32	244,766,871,138	46	399,050,709,296	63	920,792,034,503		
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	58	7,982,569,923	23	485,992,860	15	19,853,000	66	8,448,709,783		
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	142	6,804,298,170	41	201,261,647	21	98,446,550	162	6,907,113,267		
30303	ALAT UKUR	960	151,616,995,527	438	268,070,365,717	316	153,971,164,170	1,082	285,716,197,074		
30401	ALAT PENGOLAHAN	348	1,508,022,279	104	347,829,130	59	178,478,876	393	1,677,372,533		
30501	ALAT KANTOR	46,389	1,341,255,314,996	37,071	149,809,311,676	45,093	52,080,440,374	38,367	1,438,984,186,298		
30502	ALAT RUMAH TANGGA	18,847	101,768,797,284	6,347	60,473,448,312	4,266	42,372,105,184	20,938	119,870,140,412		
30601	ALAT STUDIO	910	24,578,497,418	293	2,184,837,161	206	1,108,541,344	997	25,654,793,235		
30602	ALAT KOMUNIKASI	2,091	16,231,476,819	900	7,712,022,315	670	5,855,461,478	2,321	18,088,037,656		
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,147	54,158,354,759	277	5,902,079,501	239	4,051,337,255	1,185	56,009,097,005		
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	8	2,257,063,426	3	496,760,000	1	475,475,000	10	2,278,348,426		
30701	ALAT KEDOKTERAN	1,720	7,854,552,422	693	1,952,767,898	501	859,704,252	1,912	8,947,616,068		
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	29	1,413,876,200	3	9,400,000	1	2,000,000	31	1,421,276,200		
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,857	287,841,771,119	556	48,509,921,095	519	75,237,839,733	1,894	261,113,852,481		
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	33	1,590,123,900	6	1,549,221,500	5	1,400,721,500	34	1,738,623,900		
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	246	1,380,417,192	102	335,914,166	82	128,866,660	266	1,587,464,698		
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	20	59,950,000	1	3,700,000	3	13,050,000	18	50,600,000		
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	1	16,390,000	0	0	0	0	1	16,390,000		
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	19	1,152,885,800	4	165,550,000	2	50,600,000	21	1,267,835,800		
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	99	76,582,908,891	10	15,510,517,400	5	15,661,631,000	104	76,431,795,291		
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	37	900,948,474	27	395,487,000	11	219,050,000	53	1,077,385,474		
30901	SENJATA API	2	13,080,000	0	0	0	0	2	13,080,000		
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	755	2,667,412,175	373	1,207,890,200	352	1,177,230,000	776	2,698,072,375		
30903	SENJATA SINAR	2	10,000,000	0	0	0	0	2	10,000,000		
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	486	35,150,497,571	167	95,084,022,477	155	87,018,562,823	498	43,215,957,225		
31001	KOMPUTER UNIT	3,766	62,301,099,759	1,068	15,616,964,018	601	7,385,257,851	4,233	70,532,805,926		
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,549	44,812,997,456	1,289	28,247,087,298	801	7,763,454,802	4,037	65,296,629,952		
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	27	163,885,540	1	2,750,000	1	2,750,000	27	163,885,540		

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	4,530,315,000	0	0	0	0	10	4,530,315,000	
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	2,113,727,800	0	0	0	0	4	2,113,727,800	
31301	SUMUR	4	387,965,400	2	243,224,859	0	0	6	631,190,259	
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1	41,750,000	2	83,500,000	2	83,500,000	1	41,750,000	
31501	ALAT DETEKSI	2	2,438,095,000	0	0	1	149,985,000	1	2,288,110,000	
31502	ALAT PELINDUNG	9	136,777,350	11	219,626,000	5	6,875,000	15	349,528,350	
31503	ALAT SAR	181	1,163,912,984	30	656,984,942	8	64,544,942	203	1,756,352,984	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	717	47,612,870,378	209	2,906,288,330	180	1,899,819,277	746	48,619,339,431	
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	209,750,000	0	0	0	0	2	209,750,000	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	22	465,864,217	5	44,381,000	2	25,500,000	25	484,745,217	
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	186,434	3,854,800,490,372	47,297	1,477,571,919,995	26,150	804,564,031,732	207,581	4,527,808,378,635	
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	131	15,027,568,448	127	5,057,762,174	126	4,087,746,998	132	16,017,573,624	
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	286	13,791,483,338	189	8,337,969,860	2	625,295,823	473	21,504,147,375	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	16	153,809,000	3	4,950,000	6	82,950,000	13	75,809,000	
133111	Gedung dan Bangunan	49,220	3,710,905,585,133	8,301	2,211,570,384,226	842	1,826,579,020,357	56,679	4,095,896,949,002	
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	46,634	266,976,630,500	7,511	58,817,047,624	173	17,096,045,542	53,972	308,697,632,582	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2,290	3,340,295,609,419	679	2,101,155,256,698	565	1,773,378,979,354	2,404	3,668,071,886,763	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	81	27,902,555,063	37	9,436,656,637	35	7,110,362,229	83	30,228,849,471	
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	887,899,997	2	871,899,997	3	871,899,997	3	887,899,997	
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	56	30,203,880,728	21	14,144,742,099	16	9,077,944,000	61	35,270,678,827	
40401	TUGUTANDA BATAS	155	44,639,009,426	51	27,144,781,171	50	19,043,789,235	156	52,740,001,362	
134111	Jalan dan Jembatan	608,411	1,350,555,665,213	299,755	464,771,087,353	387,569	703,843,965,043	520,597	1,111,482,787,523	
50101	JALAN	313,057	158,268,782,276	91,630	93,438,842,718	85,849	36,535,885,770	318,838	215,171,739,224	
50102	JEMBATAN	295,354	1,192,286,882,937	208,125	371,332,244,635	301,720	667,308,079,273	201,759	896,311,048,299	
134112	Irigasi	185	963,671,428,452	157	1,721,699,466,748	94	1,162,295,208,917	248	1,523,075,686,283	
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	26	10,963,749,558	5	1,207,015,057	3	317,367,336	28	11,853,397,279	
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	2	173,627,000	2	125,057,000	1	62,528,500	3	236,155,500	
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	90	946,683,820,483	114	1,716,606,720,647	63	1,160,272,225,731	141	1,503,018,315,399	
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	4	22,398,330	4	158,053,994	3	5,399,000	5	175,053,324	
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	59	3,904,966,081	30	3,594,172,050	22	1,629,240,350	67	5,869,897,781	
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	4	1,922,867,000	2	8,448,000	2	8,448,000	4	1,922,867,000	
134113	Jaringan	329	37,648,658,649	120	20,343,257,336	116	19,123,106,548	333	38,868,809,437	
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	7	99,035,959	4	253,680,904	1	8,600,000	10	344,116,863	
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1	24,500,000	1	626,325,884	0	0	2	650,825,884	
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	4	34,781,010	6	22,740,000	5	22,590,000	5	34,931,010	
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	12	12,580,768,500	5	5,580,917,000	5	5,580,917,000	12	12,580,768,500	

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2021			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021			
KODE	URAIAN	KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH			BERKURANG			KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI
				KUAN- TITAS	NILAI		KUAN- TITAS	NILAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	10	885,512,288	0	0	0	0	0	10		885,512,288		
50307	INSTALASI PERTAHANAN	1	43,603,725	0	0	0	0	0	1		43,603,725		
50309	INSTALASI PENGAMAN	4	464,189,238	1	42,008,238		1	42,008,238	4		464,189,238		
50310	INSTALASI LAIN	102	12,829,041,288	3	9,442,945,300		3	9,442,945,300	102		12,829,041,288		
50401	JARINGAN AIR MINUM	2	1,488,010,000	1	10,000		1	10,000	2		1,488,010,000		
50402	JARINGAN LISTRIK	184	9,178,518,641	98	4,373,930,010		99	4,025,336,010	183		9,527,112,641		
50403	JARINGAN TELEPON	2	20,698,000	1	700,000		1	700,000	2		20,698,000		
135111	Aset Tetap Renovasi	186	366,017,004,197	22	46,581,100,773		83	131,179,258,861	125		281,418,846,109		
60701	TANAH DALAM RENOVASI	2	5,483,212,000	0	0		0	0	2		5,483,212,000		
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	4	2,664,295,000	0	0		0	0	4		2,664,295,000		
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	45	40,595,437,806	14	28,402,831,773		45	41,278,510,646	14		27,719,758,933		
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	5	4,140,419,060	0	0		1	88,229,522	4		4,052,189,538		
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	130	313,133,640,331	8	18,178,269,000		37	89,812,518,693	101		241,499,390,638		
135121	Aset Tetap Lainnya	2,445	23,504,471,809	9	1,640,764,560		25	14,254,062,560	2,429		10,891,173,809		
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2,423	17,832,147,569	5	498,490,000		10	13,110,638,000	2,418		5,219,999,569		
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	2	3,702,549,680	0	0		0	0	2		3,702,549,680		
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	13	789,740,000	0	0		11	1,150,000	2		788,590,000		
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	2	1,162,050,560	2	1,142,050,560		2	1,142,050,560	2		1,162,050,560		
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	4	17,969,000	1	209,000		1	209,000	4		17,969,000		
60601	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	1	15,000	1	15,000		1	15,000	1		15,000		
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	2,537	1,990,539,645,380	1,602	293,388,460,142		1,117	703,652,434,602	3,022		1,580,275,670,920		
20101	TANAH PERSIL	1	1,725,799,345	0	0		0	0	1		1,725,799,345		
30103	ALAT BANTU	15	444,362,000	11	347,272,200		10	341,363,200	16		450,271,000		
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	6,052,537,025	12	335,037,000		14	341,037,000	27		6,046,537,025		
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	25	99,495,000	21	77,724,490		20	75,095,000	26		102,124,490		
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	28	257,032,028,372	5	33,015,335,000		20	210,792,718,422	13		79,254,644,950		
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	16,650,000	2	3,250,000		2	3,250,000	3		16,650,000		
30303	ALAT UKUR	23	19,894,505,179	10	5,717,838,395		9	5,688,038,395	24		19,924,305,179		
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	(699,000)	6	9,140,000		0	0	6		8,441,000		
30501	ALAT KANTOR	406	55,104,787,133	223	3,264,448,474		168	31,752,656,784	461		26,616,578,823		
30502	ALAT RUMAH TANGGA	791	1,511,354,777	701	1,218,804,376		427	692,693,317	1,065		2,037,465,836		
30601	ALAT STUDIO	47	171,063,413	57	183,961,249		46	138,496,413	58		216,528,249		
30602	ALAT KOMUNIKASI	133	3,745,887,057	108	3,649,026,617		97	3,626,016,957	144		3,768,896,717		
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	34,413,400	4	99,470,000		1	21,000,000	6		112,883,400		
30701	ALAT KEDOKTERAN	47	69,687,800	48	74,424,120		1	3,300,000	94		140,811,920		
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	106	19,296,026,058	59	2,704,697,458		64	2,861,568,101	101		19,139,155,415		
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	5,000,000	7	13,117,660		1	5,000,000	7		13,117,660		

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021		
		Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Nilai	Kuantitas	Nilai	
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0	0	2	9,350,000	0	0	0	2	9,350,000	
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	3	7,067,500	0	0	0	0	0	3	7,067,500	
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	228,661,237	0	0	0	0	0	1	228,661,237	
30804	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	15	29,984,696,810	12	15,637,734,000	4	16,018,349,000	23	29,604,081,810		
31001	KOMPUTER UNIT	89	1,283,751,125	76	1,004,730,168	25	285,485,025	140	2,002,996,268		
31002	PERALATAN KOMPUTER	139	558,127,283	95	289,164,813	62	296,167,955	172	551,124,141		
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1	19,584,400	0	0	0	0	0	1	19,584,400	
31503	ALAT SAR	1	1,923,375	0	0	0	0	0	1	1,923,375	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	17	719,757,540	12	68,096,500	11	52,229,000	18	735,625,040		
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	288	77,440,578,288	21	5,973,191,390	21	7,735,057,890	288	75,678,711,788		
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1	990,005,176	0	0	1	990,005,176	0	0		
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	54	185,537,017,957	45	13,025,679,815	33	21,583,165,449	66	176,979,532,323		
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	220,943,000	1	220,943,000	1	220,943,000	1	220,943,000		
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	18	11,022,793,000	5	1,771,860,000	9	3,460,000,000	14	9,334,653,000		
40401	TUGU/TANDA BATAS	5	219,199,000	6	6,487,063,617	5	219,199,000	6	6,487,063,617		
50101	JALAN	(1)	(1,175,540,300)	1	1,175,540,300	0	0	0	0		
50102	JEMBATAN	206	850,681,143,472	13	36,023,212,000	33	169,154,173,002	186	717,550,182,470		
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	1,397,700,000	0	0	1	1,397,700,000	0	0		
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	23	425,729,808,750	10	125,736,169,500	13	195,039,301,500	20	356,426,676,750		
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	0	0	0	0	0	0		
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	4	5,481,389,000	4	5,481,389,000	4	5,481,389,000	4	5,481,389,000		
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0		
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	6	12,712,083,000	4	4,814,035,000	2	7,898,048,000		
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	11	1,150,000	0	0	11	1,150,000		
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000		
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	12	34,986,141,208	7	17,055,566,000	9	20,561,001,016	10	31,480,696,192		
TOTAL			19,300,660,062,961		8,666,868,259,755		7,576,996,682,257		20,390,531,640,459		

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DARAT

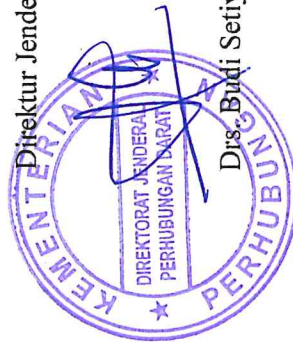
Drs. Budri Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2021		PENAMBAHAN		KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF		JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2021		KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI		NILAI		NILAI		NILAI		
1	2	3		4		5		6		7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,525,254,297,773		2,343,888,169,430		2,751,353,021,296		1,117,789,445,907		
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	9,426,187,000		0		9,228,887,000		197,300,000		
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	16,505,433,500		1,020,595,631,764		1,016,647,339,764		20,453,725,500		
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1,453,411,734,080		1,287,094,012,176		1,646,200,550,849		1,094,305,195,407		
7010101004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	45,354,026,693		0		42,520,801,693		2,833,225,000		
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	556,916,500		36,198,525,490		36,755,441,990		0		
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434,000,000		92,265,564,915		92,265,564,915		434,000,000		
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	434,000,000		92,265,564,915		92,265,564,915		434,000,000		
TOTAL		1,525,688,297,773		2,436,153,734,345		2,843,618,586,211		1,118,223,445,907		

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021				MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021		
		URAIAN		KUANITITAS		NILAI		BERTAMBAH		BERKURANG		
								KUANITITAS	NILAI	KUANITITAS	NILAI	
KODE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
162141	Paten	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0			
162151	Software	173	40,337,023,740	166	31,243,150,734	31	27,490,647,140	308	44,089,527,334			
80101	ASET TAK BERWUJUD	173	40,337,023,740	166	31,243,150,734	31	27,490,647,140	308	44,089,527,334			
162161	Lisensi	78	895,631,250	1	306,955,000	2	613,910,000	77	588,676,250			
80101	ASET TAK BERWUJUD	78	895,631,250	1	306,955,000	2	613,910,000	77	588,676,250			
162171	Hasil Kajian/Penelitian	748	509,179,815,499	235	149,962,830,735	162	118,380,228,070	821	540,762,418,164			
80101	ASET TAK BERWUJUD	748	509,179,815,499	235	149,962,830,735	162	118,380,228,070	821	540,762,418,164			
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	665	529,894,037,571	91	57,539,714,435	258	185,561,788,616	498	401,871,963,390			
80101	ASET TAK BERWUJUD	665	529,894,037,571	91	57,539,714,435	258	185,561,788,616	498	401,871,963,390			
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	238	170,966,820,990	10	6,995,378,900	148	97,366,134,890	100	80,596,065,000			
80101	ASET TAK BERWUJUD	238	170,966,820,990	10	6,995,378,900	148	97,366,134,890	100	80,596,065,000			
TOTAL			1,251,273,329,050		246,048,029,804		429,412,708,716		1,067,908,650,138			

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Tanggal : 17/05/22 10:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	
1	2	4	5	6	7	8=5+6-7
132111	Peralatan dan Mesin	9,427,477,452,797	4,963,329,211,450	1,007,529,850,288	(6,735,126,007)	5,964,123,935,731
30101	ALAT BESAR DARAT	5,654,901,795	5,342,503,433	39,374,874	(406,389)	5,381,471,918
30103	ALAT BANTU	43,607,870,027	18,149,699,369	5,122,398,871	522,533,046	23,794,631,286
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,349,710,543,268	826,484,831,206	185,848,817,157	110,898,585,524	1,123,232,233,887
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2,064,118,910	742,863,112	590,399,133	356,668,620	1,689,930,865
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	920,792,034,503	400,100,241,473	95,332,423,861	(130,602,505,556)	364,830,159,778
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	8,448,709,783	4,664,408,570	764,736,786	495,000	5,429,640,356
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6,907,113,267	6,531,427,961	107,998,399	(36,035,509)	6,603,390,851
30303	ALAT UKUR	265,716,197,074	114,799,363,893	26,700,027,974	7,195,615,006	148,695,006,873
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,677,372,533	825,756,218	309,401,283	(3,704,979)	1,131,452,522
30501	ALAT KANTOR	1,438,984,186,298	1,203,843,398,849	57,827,185,142	39,290,450,929	1,300,961,034,920
30502	ALAT RUMAH TANGGA	119,870,140,412	53,347,737,497	16,907,656,421	811,024,142	71,066,418,060
30601	ALAT STUDIO	25,654,793,235	17,467,132,818	2,020,170,164	(199,316,331)	19,287,986,651
30602	ALAT KOMUNIKASI	18,088,037,656	11,892,307,935	1,703,953,190	147,998,379	13,744,259,504
30603	PERALATAN PEMANCAR	56,009,097,005	21,685,310,347	6,034,582,864	319,089,437	28,038,982,648
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2,278,348,426	634,474,249	163,092,666	72,706,667	870,273,582
30701	ALAT KEDOKTERAN	8,947,616,068	5,810,954,573	757,903,940	(53,624,395)	6,515,234,118
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1,421,276,200	1,364,452,280	14,121,240	0	1,378,573,520
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	261,113,852,481	186,215,144,272	23,822,824,108	(23,303,266,331)	186,734,702,049
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1,738,623,900	928,488,032	116,096,600	89,329,838	1,133,914,470
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1,587,464,698	356,935,886	101,982,790	(6,650,189)	452,268,487
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	50,600,000	17,919,408	5,641,594	(5,973,612)	17,587,390
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	16,390,000	2,458,500	1,639,000	0	4,097,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1,267,835,800	629,073,881	159,725,452	37,138,096	825,937,429
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	76,431,795,291	20,849,759,060	4,155,967,411	10,535,821,458	35,541,546,929
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1,077,385,474	631,931,219	47,672,426	6,256,112	685,659,757
30901	SENJATA API	13,080,000	4,039,736	1,331,684	0	5,371,420
30902	Persenjataan non senjata api	2,698,072,375	1,993,809,824	352,588,381	15,904,166	2,362,302,371
30903	SENJATA SINAR	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	43,215,957,225	17,796,262,270	7,741,024,612	109,988,675	25,647,275,557
31001	KOMPUTER UNIT	70,532,805,926	40,829,866,058	9,822,200,966	(30,139,559)	50,621,927,465
31002	PERALATAN KOMPUTER	65,296,629,952	31,262,935,431	7,658,969,878	2,920,207,026	41,842,112,335
31101	ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	163,885,540	88,024,998	23,191,752	0	111,216,750
31102	ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	4,530,315,000	3,993,832,834	395,827,466	0	4,389,660,300
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	2,113,727,800	528,431,950	211,372,780	0	739,804,730
31301	SUMUR	631,190,259	279,445,480	36,787,926	12,161,243	328,394,649
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	41,750,000	34,791,668	1,391,667	1,391,666	37,575,001
31501	ALAT DETEKSI	2,288,110,000	2,046,874,056	254,234,444	(14,998,500)	2,288,110,000
						0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 03 DIT.JEN PERHUBUNGAN DARAT

Tanggal : 17/05/22 10:44 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7
31502	ALAT PELINDUNG	349,528,350	124,017,890	32,450,860	(773,440)	155,695,310
31503	ALAT SAR	1,756,352,984	1,041,026,130	260,943,868	13,866,238	1,315,856,236
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	48,619,339,431	20,532,971,794	4,727,981,230	(99,483,706)	25,161,469,318
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	209,750,000	111,237,500	20,975,000	0	132,212,500
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	484,745,217	265,459,101	43,795,318	0	309,254,419
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4,527,808,378,635	1,922,420,976,258	545,141,813,026	(26,338,381,043)	2,441,224,408,241
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	16,017,573,624	13,398,491,894	940,395,509	528,399,346	14,887,286,749
31803	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	21,504,147,375	3,170,574,704	1,194,970,408	93,670,418	4,459,215,530
31901	PERALATAN OLAH RAGA	75,809,000	75,568,833	11,810,167	(19,187,500)	68,191,500
133111	Gedung dan Bangunan	4,095,896,949,002	536,813,630,622	108,956,906,965	21,293,167,613	667,063,725,200
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	308,697,632,582	162,870,074,197	34,399,075,043	7,279,079,355	204,548,228,595
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,668,071,886,763	361,776,537,263	71,730,327,213	15,375,258,480	448,882,122,956
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30,228,849,471	4,651,476,142	650,299,893	(1,234,022,427)	4,067,753,608
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	887,899,997	171,448,259	18,319,485	20,561,573	210,329,317
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	35,270,678,827	2,386,852,506	1,035,556,650	68,485,455	3,490,894,611
40401	TUGUTANDA BATAS	52,740,001,362	4,957,242,255	1,123,328,681	(216,174,823)	5,864,396,113
134111	Jalan dan Jembatan	1,111,482,787,523	176,973,721,458	32,710,258,130	(17,617,683,823)	192,066,295,765
50101	JALAN	215,171,739,224	98,964,560,445	15,712,748,309	3,675,016,434	118,352,325,188
50102	JEMBATAN	896,311,048,299	78,009,161,013	16,997,509,821	(21,292,700,257)	73,713,970,577
134112	Irigasi	1,523,075,686,283	678,454,878,057	105,407,838,876	(492,972,422,256)	290,890,294,677
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	11,853,397,279	940,022,416	241,194,186	76,382,191	1,257,598,793
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	236,155,500	20,619,370	4,097,825	2,501,140	27,216,335
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1,503,018,315,399	676,442,560,771	104,960,896,505	(493,443,686,851)	287,959,772,425
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	175,053,324	6,080,074	5,838,938	2,544,250	14,463,262
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	5,869,897,781	704,488,087	147,779,347	389,773,014	1,242,040,448
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	1,922,867,000	341,107,339	48,030,075	64,000	389,201,414
134113	Jaringan	38,868,809,437	5,759,918,786	1,285,897,472	9,220,779,188	16,266,595,446
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	344,116,863	21,786,780	8,094,999	624,682	30,506,461
50302	INSTALASI AIR KOTOR	650,825,884	5,308,332	11,255,431	0	16,563,763
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	34,931,010	30,098,010	1,761,000	711,000	32,570,010
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	12,580,768,500	1,619,169,915	327,557,889	9,952,800	1,956,680,604
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	885,512,288	203,893,761	22,417,180	0	226,310,941
50307	INSTALASI PERTAHANAN	43,603,725	21,075,139	1,453,458	0	22,526,597
50309	INSTALASI PENGAMAN	464,189,238	140,783,375	23,523,491	0	164,306,866
50310	INSTALASI LAIN	12,829,041,288	1,297,926,548	625,978,500	9,438,085,300	11,361,990,348
50401	JARINGAN AIR MINUM	1,488,010,000	679,314,348	64,695,652	0	744,010,000
50402	JARINGAN LISTRIK	9,527,112,641	1,732,283,336	198,079,980	(228,594,594)	1,701,768,722
50403	JARINGAN TELEPON	20,698,000	8,279,242	1,079,892	0	9,359,134

193,833,040	440,496,748	23,457,870,113	77,537,500	175,490,798	2,086,583,970,394	1,150,286,875	17,044,931,845	7,617,500	3,428,833,223,802	104,149,403,987	3,219,189,763,807	26,161,095,863	677,570,680	31,779,784,216	46,875,605,249	919,416,491,758	96,819,414,036	822,597,077,722	1,232,185,391,606	10,595,798,486	208,937,165	1,215,058,542,974	160,590,062	4,627,857,333	1,533,665,566	22,602,213,991	313,610,402	634,262,121	21,075,128	299,882,372	1,467,050,940	744,000,000	7,825,343,919	11,338,866
-------------	-------------	----------------	------------	-------------	-------------------	---------------	----------------	-----------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------	---------------	----------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	---------------	------------

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 03 DIT.JEN PERHUBUNGAN DARAT

Tanggal : 17/05/22 10:44 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
135111	Aset Tetap Renovasi	34,436,243,471	2,344,146,668	0	(2,344,146,668)	0	34,436,243,471
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	2,664,295,000	0	0	0	0	2,664,295,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	27,719,758,933	2,344,146,668	0	(2,344,146,668)	0	27,719,758,933
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	4,052,189,538	0	0	0	0	4,052,189,538
135121	Aset Tetap Lainnya	1,162,050,560	16,500,000	5,500,000	0	22,000,000	1,140,050,560
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,162,050,560	16,500,000	5,500,000	0	22,000,000	1,140,050,560
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,539,169,977,383	759,691,646,930	80,201,124,633	(219,852,460,170)	620,040,311,393	919,129,665,990
30103	ALAT BANTU	450,271,000	400,899,530	38,324,699	3,606,793	442,831,022	7,439,978
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6,046,537,025	4,523,291,490	1,019,497,024	(6,000,000)	5,536,788,514	509,748,511
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	102,124,490	99,495,000	0	2,629,490	102,124,490	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	79,254,644,950	150,962,088,862	9,898,688,328	(112,547,886,366)	48,312,870,824	30,941,774,126
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	16,650,000	16,650,000	0	0	16,650,000	0
30303	ALAT UKUR	19,924,305,179	19,894,505,179	0	29,800,000	19,924,305,179	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	8,441,000	(699,000)	0	9,140,000	8,441,000	0
30501	ALAT KANTOR	26,616,578,823	55,093,149,870	8,140,076	(28,488,390,195)	26,612,899,751	3,679,072
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,037,465,836	1,490,389,299	11,948,259	527,968,772	2,030,306,330	7,159,506
30601	ALAT STUDIO	216,528,249	171,063,413	2,522,914	42,941,922	216,528,249	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	3,768,896,717	3,673,663,273	25,722,164	29,828,088	3,729,213,525	39,683,192
30603	PERALATAN PEMANCAR	112,883,400	20,993,266	8,417,645	55,862,664	85,273,575	27,609,825
30701	ALAT KEDOKTERAN	140,811,920	69,687,800	0	71,124,120	140,811,920	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	19,139,155,415	16,854,212,295	974,613,484	(125,633,361)	17,703,192,418	1,435,962,987
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	13,117,660	666,668	484,189	4,951,354	6,102,211	7,015,449
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	9,350,000	0	562,732	5,973,612	6,536,344	2,813,656
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7,067,500	5,553,036	1,009,643	0	6,562,679	504,821
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	228,661,237	83,842,451	15,244,082	0	99,086,533	129,574,704
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	29,604,081,810	29,984,696,810	0	(380,615,000)	29,604,081,810	0
31001	KOMPUTER UNIT	2,002,996,268	1,277,869,791	2,940,667	719,245,143	2,000,055,601	2,940,667
31002	PERALATAN KOMPUTER	551,124,141	557,247,283	880,000	(7,003,142)	551,124,141	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	19,594,400	16,023,600	2,373,867	0	16,397,467	1,186,933
31503	ALAT SAR	1,923,375	1,923,375	0	0	1,923,375	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	735,625,040	544,434,218	69,859,076	10,589,714	624,883,008	110,742,032
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	75,678,711,788	69,175,888,195	5,339,046,401	(1,461,391,524)	73,053,543,072	2,625,168,716
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	0	990,005,176	0	(990,005,176)	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	176,979,532,323	28,778,211,116	3,676,298,203	(671,907,990)	31,782,601,329	145,196,930,994
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	220,943,000	61,924,572	4,479,392	0	66,403,964	154,539,036
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	9,334,653,000	2,352,562,104	258,404,240	(431,601,589)	2,179,364,755	7,155,288,245
40401	TUGUTANDA BATAS	6,487,063,617	20,695,894	89,181,635	1,863,419,210	1,973,286,739	4,513,766,878
50101	JALAN	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Tanggal : 17/05/22 10:44 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			KOREKSI	TOTAL
1	2	4	SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	6	7	8=5+6+7
50102	JEMBATAN	717,550,182,470	100,908,390,385	15,000,360,228	0	(14,867,879,864)	101,010,870,749
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	0	87,258,364	0	0	(87,258,364)	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	356,426,676,750	271,079,731,335	43,607,622,301	0	(63,133,968,481)	251,553,385,155
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0	0	0	0	0	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	5,481,389,000	495,332,280	144,523,384	0	0	639,855,664
50310	INSTALASI LAIN	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENJIAN	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	JUMLAH	17,771,569,956,	7,123,383,653,9	1,336,097,376,3	0	(709,007,872,12	7,750,473,158,2
							10,021,096,798,244

A Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 022
: 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,381,983,527,128	20,332,749,464,060	1,049,234,063,068	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,571,012,363,492)	(3,007,173,050,798)	(563,839,312,694)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(35,089,265,005)	(649,740,259,889)	614,650,994,884	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(341,638,622,549)	51,488,996	(341,690,111,545)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	1,165,245,808,006	(97,428,494,280)	1,262,674,302,286	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	(33,007,694,541)	33,007,694,541	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(613,158,283,932)	(79,284,049,564)	(533,874,234,368)	-
LAIN-LAIN	(245,538,166,530)	(440,071,510,500)	194,533,343,970	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,250,379,247,194	4,706,147,373,755	(455,768,126,561)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	644,277,618,697	1,049,234,063,068	(404,956,444,371)	-
EKUITAS AKHIR	22,026,261,145,825	21,381,983,527,128	644,277,618,697	-

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs Budi Setiyadi, SH., M.Si

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	7.227.707.280.394	6.444.833.276.908	782.874.003.486	12,15
Aset Tetap	12.797.612.568.627	12.471.682.708.313	325.929.860.314	2,61
Aset Lainnya	2.001.868.626.794	2.466.030.622.555	(464.161.995.761)	(18,82)
Jumlah Aset	22.027.188.475.815	21.382.546.607.776	644.641.868.039	3,01
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	927.329.990	563.080.648	364.249.342	64,69
Ekuitas				
Ekuitas	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128	644.277.618.697	3,01
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	22.027.188.475.815	21.382.546.607.776	644.641.868.039	3,01

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.434.666.571.630,00**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp4.634.545.906.402,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(3.199.879.334.772,00)**. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp(371.133.028.720,00)** dan sebesar **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(3.571.012.363.492,00)**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.434.666.571.630	1.219.736.276.464	214.930.295.166	
Beban Operasional	4.634.545.906.402	4.194.912.788.408	439.633.117.994	
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>(3.199.879.334.772)</i>	<i>(2.975.176.511.944)</i>	<i>(224.702.822.828)</i>	
Kegiatan Non Operasional				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(409.432.837.340)	(228.709.704.515)	(180.723.132.825)	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	38.299.808.620	196.713.165.661	(158.413.357.041)	
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>(371.133.028.720)</i>	<i>(31.996.538.854)</i>	<i>(339.136.489.866)</i>	
Surplus (Defisit) – LO	(3.571.012.363.492)	(3.007.173.050.798)	(563.839.312.694)	

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp21.381.983.527.128,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(3.571.012.363.492,00)** dikurangi dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas senilai **Rp(35.089.265.005,00)** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp4.250.379.247.194,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp22.026.261.145.825,00**.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	21.381.983.527.128	20.332.749.464.060	1.049.234.063.068	
Surplus (Defisit) – LO	(3.571.012.363.492)	(3.007.173.050.798)	(563.839.312.694)	
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(35.089.265.005)	(649.740.259.889)	614.650.994.884	
Transaksi Antar Entitas	4.250.379.247.194	4.706.147.373.755	(455.768.126.561)	
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	644.277.618.697	1.049.234.063.068	(404.956.444.371)	
Ekuitas Akhir	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128	644.277.618.697	

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.215.972.400.000	1.468.354.151.463	120,76	1.233.405.670.587
JUMLAH PENDAPATAN		1.215.972.400.000	1.468.354.151.463	120,76	1.233.405.670.587
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	448.546.986.000	433.799.162.888	96,71	427.317.380.464
Belanja Barang	B.4	2.763.756.047.000	2.724.669.949.443	98,59	2.629.271.105.390
Belanja Modal	B.5	2.521.949.815.000	2.511.525.458.561	99,59	2.574.585.443.339
JUMLAH BELANJA		5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	98,88	5.631.173.929.193

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	454.548.990	55.638.398
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.2	-	14.490.108.184
Piutang Bukan Pajak	C.3	9.009.297.384	242.122.923.862
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.4	(487.928.987)	(1.653.497.119)
Persediaan	C.5	7.218.731.363.007	6.189.818.103.583
Jumlah Aset Lancar		7.227.707.280.394	6.444.833.276.908
ASET TETAP			
Tanah	C.6	2.321.144.264.579	2.290.533.011.448
Peralatan dan Mesin	C.7	9.427.477.452.797	8.567.284.592.680
Gedung dan Bangunan	C.8	4.095.896.949.002	3.710.905.585.133
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.9	2.673.427.283.243	2.351.875.752.314
Aset Tetap Lainnya	C.10	292.310.019.918	389.521.476.006
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.11	1.117.789.445.907	1.525.254.297.773
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(7.130.432.846.819)	(6.363.692.007.041)
Jumlah Aset Tetap		12.797.612.568.627	12.471.682.708.313
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	987.312.585.138	1.080.306.508.060
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.14	434.000.000	434.000.000
Aset Lain-Lain	C.15	1.660.871.735.920	2.161.506.466.370
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(646.749.694.264)	(776.216.351.875)
Jumlah Aset Lainnya		2.001.868.626.794	2.466.030.622.555
JUMLAH ASET		22.027.188.475.815	21.382.546.607.776
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	472.781.000	507.442.250
Uang Muka dari KPPN	C.18	454.548.990	55.638.398
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		927.329.990	563.080.648
JUMLAH KEWAJIBAN		927.329.990	563.080.648
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128
JUMLAH EKUITAS		22.026.261.145.825	21.381.983.527.128
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.027.188.475.815	21.382.546.607.776

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.434.666.571.630	1.219.736.276.464
JUMLAH PENDAPATAN		1.434.666.571.630	1.219.736.276.464
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	433.799.162.888	427.211.038.835
Beban Persediaan	D.3	71.918.384.560	60.340.157.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.972.355.046.172	1.431.913.615.522
Beban Pemeliharaan	D.5	193.861.201.069	150.145.292.125
Beban Perjalanan Dinas	D.6	191.777.053.745	231.980.118.482
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	407.835.822.380	479.217.130.493
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.362.999.235.588	1.414.103.022.282
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	2.413.369
JUMLAH BEBAN		4.634.545.906.402	4.194.912.788.408
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.199.879.334.772)	(2.975.176.511.944)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		2.024.926.579	949.221.661
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(411.457.763.919)	(229.658.926.176)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		38.336.564.196	310.471.628.848
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(36.755.576)	(113.758.463.187)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(371.133.028.720)	(31.996.538.854)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.571.012.363.492)	(3.007.173.050.798)
POS LUAR BIASA	D.12		
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.571.012.363.492)	(3.007.173.050.798)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	21.381.983.527.128	20.332.749.464.060
Surplus/Defisit - LO	E.2	(3.571.012.363.492)	(3.007.173.050.798)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	(35.089.265.005)	(649.740.259.889)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	(341.638.622.549)	51.488.996
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	1.165.245.808.006	(97.428.494.280)
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	-	(33.007.694.541)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(613.158.283.932)	(79.284.049.564)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	(245.538.166.530)	(440.071.510.500)
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.250.379.247.194	4.706.147.373.755
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		644.277.618.697	1.049.234.063.068
EKUITAS AKHIR	E.5	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Stabilitas Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3429/KU.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.6012/PL.201/DRJD/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

A.2 Profil, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat digambarkan sebagai berikut:



A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 32 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	√	
2	352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	√	
3	352597	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	√	
4	352598	Direktorat Lalu Lintas Jalan	√	
5	352599	Direktorat Angkutan Jalan	√	
6	352600	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	
7	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	√	
8	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I		√
9	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II		√
10	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III		√
11	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV		√
12	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V		√
13	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI		√
14	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII		√
15	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII		√
16	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX		√
17	403850	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X		√
18	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI		√
19	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII		√
20	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII		√
21	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV		√
22	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV		√

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan	
			KP	KD
23	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI		√
24	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII		√
25	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII		√
27	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX		√
28	403863	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI		√
29	403864	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII		√
30	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII		√
31	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV		√
32	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV		√
Jumlah			7	25

A.4 Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh

aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- 7) Persediaan untuk diserahkan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, yang sudah diajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya:
 - o dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
 - o tidak disajikan dalam neraca; dan
 - o diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN tersebut, Kuasa Pengguna Barang menghapus Persediaan tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
- 9) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:

- mengeluarkan Persediaan dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
 - menyajikan kembali Persediaan ke dalam Neraca;
 - melakukan penatausahaan sebagai aset lancar.
- 10) Inventarisasi fisik (*stock opname*) tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik sudah tidak dikuasai atau telah diserahkan kepada masyarakat/pemda dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam

rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

6)

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja, dari DIPA Awal sebesar **Rp7.508.553.078.000,00** setelah revisi terakhir menjadi sebesar **Rp5.734.252.848.000,00**.

Sehingga Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Perubahan Pagu Anggaran 2021			
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan (Penurunan)	% Perubahan
PENDAPATAN				
Pendapatan PNPB	1.215.972.400.000	1.215.972.400.000	0	0
BELANJA				
Belanja Pegawai	541.105.446.000	448.546.986.000	(92.558.460.000)	(17,11)
Belanja Barang	3.409.606.536.000	2.763.756.047.000	(645.850.489.000)	(18,94)
Belanja Modal	3.557.841.096.000	2.521.949.815.000	(1.035.891.281.000)	(29,12)
Jumlah Belanja	7.508.553.078.000	5.734.252.848.000	(1.774.300.230.000)	(23,63)

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.468.354.151.463,00** atau **120,67 persen**. Realisasi Pendapatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan, Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya, Pendapatan dari Penjualan BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Penjualan Peralatan dan Mesin, Pengelolaan BMN berupa Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
sampai dengan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		Pendapatan	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN	0	3.801.601.792	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	22.051.225.000	66.117.000.000	299,83
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.181.321.400.000	1.340.647.055.000	113,49
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.679.980.000	4.688.183.475	127,40
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	1.254.290.000	0
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	8.919.795.000	10.251.040.000	114,92
Pendapatan Denda	0	9.691.402.484	0
Pendapatan Lain-lain	0	31.903.578.712	0
Jumlah	1.215.972.400.000	1.468.354.151.463	120,76

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 19 persen dibandingkan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Lain-Lain, yaitu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Yang Lalu, diantaranya yang signifikan terdapat pada:

1. Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp1.383.657.821,00;
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp1.137.175.922,00;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp954.989.513,00;
4. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Prov. Sulawesi Utara sebesar Rp706.028.312,00;
5. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Prov. Jawa Barat sebesar Rp279.618.246,00.

Rincian Pendapatan
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	3.801.601.792	3.026.482.484	775.119.308	25,61
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	30.400.000	0	30.400.000	0
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.600.000	360.000.000	(333.400.000)	(92,61)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.055.358.347	43.820.000	1.011.538.347	2.308,39
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	942.968.232	545.401.661	397.566.571	72,89
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.670.243.213	2.077.260.823	(407.017.610)	(19,59)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	76.032.000	0	76.032.000	0
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	66.117.000.000	59.276.450.000	6.840.550.000	11,54
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	66.117.000.000	59.276.450.000	6.840.550.000	11,54
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	1.356.840.568.475	1.149.714.894.762	207.125.673.713	18,02
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.340.647.055.000	1.136.547.385.000	204.099.670.000	17,96
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	4.688.183.475	3.565.419.762	1.122.763.713	31,49
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	1.254.290.000	0	1.254.290.000	0
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	10.251.040.000	9.602.090.000	648.950.000	6,76
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	121.757	(121.757)	(100,00)
Pendapatan Denda	9.691.402.484	8.664.065.050	1.027.337.434	11,86
Pendapatan Lain-lain	31.903.578.712	12.723.656.534	19.179.922.178	150,74
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	25.322.700	18.496.240	6.826.460	36,91
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	26.040.343.278	5.538.617.495	20.501.725.783	370,16
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.596.987.276	7.163.058.727	(1.566.071.451)	(21,86)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.500.000	3.000.000	(1.500.000)	(50,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	239.425.458	484.072	238.941.386	49.360,71
Jumlah	1.468.354.151.463	1.233.405.670.587	234.948.480.876	19,05

Pendapatan PNBPN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat paling signifikan berasal dari Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berupa:

1. Jasa Layanan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp1.326.112.435.000,00;
2. Jasa Layanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.678.020.000.

Selain itu, pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan juga terdapat pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan yang merupakan Jasa Layanan Penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Rancang Bangun Kendaraan Bermotor sebesar Rp59.264.500.000,00.

Pada tahun 2021 terdapat Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara sebesar Rp30.400.000,00 pada satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang merupakan kesalahan pemilihan akun pada saat input transaksi Pendapatan PNBPN pada aplikasi SAIBA. Pendapatan tersebut seharusnya merupakan Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan NTPN: 291A36U8E31HG091 tanggal 06 Oktober 2021.

B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp5.669.994.570.892,00** atau **98,88** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp5.734.252.848.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

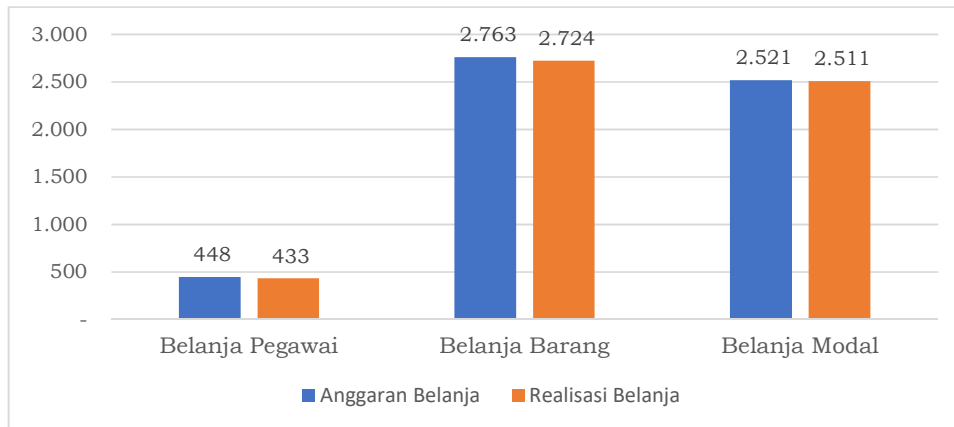
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021			31 Desember 2020	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	448.546.986.000	433.799.162.888	96,71	427.317.380.464	1,52
Belanja Barang	2.763.756.047.000	2.724.669.949.443	98,59	2.629.271.105.390	3,63
Belanja Modal	2.521.949.815.000	2.511.525.458.561	99,59	2.574.585.443.339	(2,45)
Jumlah	5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	98,88	5.631.173.929.193	0,69

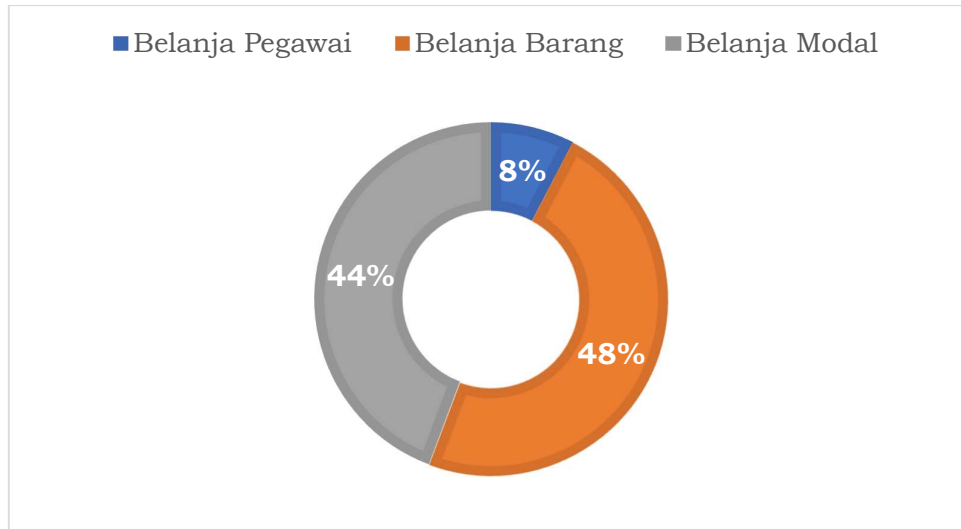
Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen dari realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020.

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2021
(dalam miliar rupiah)*



*Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
sampai dengan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)*



B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp433.799.162.888,00** dan **Rp427.317.380.464,00**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar **1,52** persen dari 31 Desember 2020.

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	173.810.678.000	168.040.349.170	96,68	164.197.425.819	2,34
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.932.000	2.632.112	66,94	2.460.968	6,95
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.711.627.000	13.505.151.814	98,49	13.408.775.070	0,72
Belanja Tunj. Anak PNS	4.295.182.000	3.985.810.649	92,80	3.967.220.874	0,47
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.424.257.000	2.380.540.000	98,20	2.390.730.000	(0,43)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	377.005.000	356.385.000	94,53	235.765.000	51,16
Belanja Tunj. PPh PNS	1.961.749.000	1.251.778.652	63,81	918.290.301	36,32
Belanja Tunj. Beras PNS	11.188.542.000	10.901.370.300	97,43	9.234.900.340	18,05
Belanja Uang Makan PNS	31.461.360.000	28.840.255.750	91,67	27.617.413.004	4,43
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	161.917.000	161.060.000	99,47	61.825.000	160,51
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.921.786.000	8.666.988.000	97,14	8.420.730.000	2,92
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	248.318.035.000	238.092.321.447	95,88	230.455.536.376	3,31
Belanja Lembur					
Belanja Uang Lembur	11.170.841.000	10.446.426.900	93,52	15.151.167.670	(31,05)
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	11.170.841.000	10.446.426.900	93,52	15.151.167.670	(31,05)
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito					
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	189.058.110.000	185.260.414.541	97,99	181.710.676.418	1,95
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	189.058.110.000	185.260.414.541	97,99	181.710.676.418	1,95
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	448.546.986.000	433.799.162.888	96,71	427.317.380.464	1,52

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.724.669.949.443,00** dan **Rp2.629.271.105.390,00**.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan **3,63** persen dari realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2020.

Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	407.628.204.000	403.837.767.598	99,07	407.538.872.064	(0,91)
Belanja Barang Non Operasional	1.443.842.199.000	1.420.752.810.755	98,40	830.103.752.082	71,15
Belanja Barang Persediaan	55.243.488.000	54.948.122.279	99,47	32.713.384.635	67,97
Belanja Jasa	155.349.957.000	149.024.670.799	95,93	198.256.186.180	(24,83)
Belanja Pemeliharaan	196.841.418.000	195.384.715.360	99,26	199.197.715.142	(1,91)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	193.449.685.000	191.599.667.745	99,04	230.754.824.710	(16,97)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	177.386.000	177.386.000	100,00	1.225.293.772	(85,52)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	303.982.146.000	301.762.128.075	99,27	688.220.034.241	(56,15)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	7.241.564.000	7.182.680.832	99,19	41.261.042.564	(82,59)
Jumlah	2.763.756.047.000	2.724.669.949.443	98,59	2.629.271.105.390	3,63

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran belanja sebesar **Rp256.955.343.000,00**, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Uraian	Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
52	BELANJA BARANG			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.959.731.000	36.678.659.577	99,24
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	128.290.521.000	127.671.161.849	99,52
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	120.000.000	119.463.300	99,55
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	12.820.492.000	12.020.283.491	93,76
524115	Belanja Perjalanan Dalam Negeri - Penanganan Pandemi COVID-19	1.017.980.000	1.017.673.900	99,97
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah - Penanganan Pandemi COVID-19	77.746.619.000	76.840.997.459	98,84
	Jumlah	256.955.343.000	254.348.239.576	98,99

Realisasi Belanja Barang dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar **Rp254.348.239.576,00**, diantaranya yang signifikan terdapat pada:

1. Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp46.783.315.959,00;
2. Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp72.883.464.542,00;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Prov. Jawa Barat sebesar Rp3.991.760.570,00;
4. Satker Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp35.135.627.876,00;
5. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp23.432.501.932,00;
6. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Prov. Jawa Timur sebesar Rp7.353.325,00.

Penggunaan Belanja Barang dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), diantaranya digunakan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, vitamin (penambah daya tahan tubuh lainnya), *rapid test kits/ swab test kits*, penyemprotan desinfektan (pada Gedung Kantor, Terminal Tipe A, UPPKB, Pelabuhan Penyeberangan), pengadaan tempat cuci tangan pertabel maupun permanen, pengadaan bilik desinfektan, pelaksanaan *screening test*

(rapid test/swab test) untuk pegawai menggunakan jasa pihak ketiga, biaya karantina/isolasi mandiri untuk pegawai, pengadaan lisensi *video conference*, biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring penanggulangan/ penanganan pandemic COVID-19, biaya perjalanan dinas Posko Pembatasan Angkutan Lebaran (Angleb), Natal dan Tahun Baru (NATARU) dan Pembatasan Sosial Bersekala Besa (PSBB)/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Rincian Belanja Barang dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.511.525.458.561,00** dan **Rp2.574.585.443.339,00**. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 mengalami penurunan **2,45** persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

*Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	12.458.115.000	12.163.616.060	97,64	45.896.183.137	(73,50)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.083.818.970.000	1.079.418.256.861	99,59	984.369.371.906	9,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.286.363.698.000	1.282.095.846.722	99,67	1.331.133.998.399	(3,68)
Belanja Modal Lainnya	139.309.032.000	137.847.738.918	98,95	213.185.889.897	(35,34)
Jumlah	2.521.949.815.000	2.511.525.458.561	99,59	2.574.585.443.339	(2,45)

Selanjutnya, dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan Belanja Modal sebesar **Rp147.969.924.000,00**, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Uraian	Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
53	BELANJA MODAL			
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	109.574.564.000	108.811.897.962	99,30
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	38.395.360.000	38.373.902.952	99,94
	Jumlah	147.969.924.000	147.185.800.914	99,47

Realisasi Belanja Modal dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp147.185.800.914,00, diantaranya yang signifikan terdapat pada:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Prov. Jawa Barat sebesar Rp45.381.927.106,00;
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Prov. Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp13.015.315.077,00;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Prov. Jawa Timur sebesar Rp20.494.085.591,00;
4. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Prov. Kalimantan Utara dan Timur sebesar Rp785.316.000,00;
5. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Prov. Papua dan Papua Barat sebesar Rp14.537.330.000.

Penggunaan Belanja Modal dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), diantaranya digunakan untuk Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional untuk

mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Revitalisasi/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A dan Revitalisasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan, Pengadaan Perlengkapan Pendukung Operasional Terminal, Pembangunan Arterial Transport Management System (Atms) Pantura Karawang-Indramayu dan Banyumas-DIY, dan Pengadaan Alat Penerangan Jalan Pendukung Kegiatan Buy The Service Bidang Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional menuju Pelabuhan.

Rincian Belanja Modal dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp12.163.616.060,00** dan **Rp45.896.183.137,00**. Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrative sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **73,50** persen dibandingkan 31 Desember 2020. Rincian Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL TANAH					
Belanja Modal Tanah	8.652.115.000	8.400.201.680	97,09	45.426.935.000	(81,51)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	3.760.000.000	3.759.060.000	99,98	390.248.137	863,25
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	46.000.000	4.354.380	9,47	79.000.000	(94,49)
Jumlah Belanja Kotor	12.458.115.000	12.163.616.060	97,64	45.896.183.137	(73,50)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0
Jumlah	12.458.115.000	12.163.616.060	97,64	45.896.183.137	(73,50)

Belanja Modal Tanah terdapat pada:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp11.785.680,00 yang merupakan biaya pembebasan BPHTB Sertifikat Tanah Pengadaan UPPKB;
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara sebesar Rp7.038.416.000,00 yang merupakan pengadaan lahan fasilitas Pelayanan Terpadu Ditjen Perhubungan Darat Wilayah Maluku Utara;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Prov. Papua dan Papua Barat sebesar Rp1.350.000.000,00 yang merupakan pengadaan lahan jalan akses Terminal Internasional Barang Skouw.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.079.418.256.861,00** dan **Rp984.369.371.906,00**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar **9,66** persen dibandingkan 31 Desember 2020.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.357.406.000	968.826.003.199	99,64	932.054.840.661	3,95
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	87.000.000	86.903.500	99,89	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	109.574.564.000	108.850.155.644	99,34	50.231.754.381	116,70
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.800.000.000	1.755.724.500	97,54	2.238.822.890	(21,58)
Jumlah Belanja Kotor	1.083.818.970.000	1.079.518.786.843	99,60	984.525.417.932	9,65
Pengembalian Belanja	0	100.529.982	0	156.046.026	(35,58)
Jumlah	1.083.818.970.000	1.079.418.256.861	99,59	984.369.371.906	9,66

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan yang cukup signifikan disebabkan oleh *refocusing* kegiatan untuk Belanja dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), seperti pengadaan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), pengadaan bilik desinfektan di Terminal Tipe A/UPPKB/Pelabuhan Penyeberangan dan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang signifikan, diantaranya terdapat pada:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp84.888.025.697,00 yang merupakan pembangunan pengadaan pembangunan ITS Kota Palembang, pembangunan kapal penyeberangan penumpang Roro 150 GT Lintas Sri Menanti-Karang Baru, Pengadaan Alat Kalibrasi, Pembangunan Zoss di Kabupaten OKI Kecamatan Kayu Agung, Pembangunan Command Center Transportasi Darat dan Pengadaan serta pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Prov. Jawa Tengah sebesar Rp54.291.751.865,00 yang merupakan pembangunan ATCS Kabupaten Gunung Kidul, Boyolali, Yogyakarta, Surakarta, dan Kabupaten Semarang, Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta, Pembangunan Command Center Transportasi Darat BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY dan Peralatan Penunjang data dan Survei perlengkapan jalan;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp52.821.300.220,00 yang merupakan pembangunan ATCS Aglomerasi Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, Maros, Takalar), Pembangunan Zoss di BPTD Sulselbar, Pengadaan Alat Kalibrasi, Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas pada KSPN Kab Toraja dan Toraja Utara, Ruas Jalan Dalam Kota Makassar, Gowa, Pangkep dan Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat serta pengadaan alat kantor dan meubelair kantor pada Kantor BPTD Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat;
4. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Prov. Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp49.771.595.578,00 yang merupakan pembangunan ATCS Kota Tanjung Pinang, Pengadaan Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah di Wilayah Riau, Pembangunan dan Pembangunan Rambu di DAS Kampar, Indragiri, dan Siak, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Ruas Jalan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;
5. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Prov. Sumatera Utara sebesar Rp48.061.769.926,00 yang merupakan pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat dalam rangka pendukung pengawasan pembangunan prasarana, Pembangunan ATCS/ITS Kota Medan, Pembangunan Zoss di Provinsi Sumatera Utara, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional pada ruas jalan di Provinsi Sumatera Utara, (Simpang Pangkalan Susu-Tanjung Pura-Bts Kota Binjai, Ruas 012-087, Ruas 018-019, Ruas 020-022,

Ruas 027, Ruas 028-029, Ruas 031, Ruas 032, Ruas 033, Ruas 047, Ruas 055-056, Ruas 076-077, Ruas 078, Ruas KSPN Danau Toba, Pengadaan Peralatan Kantor dan Meubelair Lainnya pada Kantor BPTD;

6. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB sebesar Rp41.497.779.424,00 yang merupakan pengadaan Trafo Terminal Mengwi, Pengadaan Meubelair Gedung Terminal Pelabuhan Sampatan, Pembangunan ATCS/ITS Prioritas Nasional Kota Denpasar, Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss) di Provinsi Bali, Pengadaan Kalibrasi, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional (Ruas Cekik-Bts Kota Negara, Ruas Jalan Nasional Provinsi Bali, Ruas Bts Kota Singaraja, Ruas Kota Dompu, Ruas Klungkung-Penelokan-Ulindaru, Ruas Jalan Nasional UPPKB Cekik dan Akses Terminal Mengwi), dan Pengadaan Alat Meubelair dan Peralatan Kantor Lainnya;
7. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp45.215.808.347,00 yang merupakan Pengadaan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional di Ruas Jalan Nasional Papua (Ruas Jalan 03, Ruas Jalan 032 Hamadi-Holtekam-Skow, Ruas Jalan Nimbotong-Binggo, Ruas Jalan Timika-SP Pelra-Pomako, Ruas Jalan Biak-Adoki, Ruas Jalan Sentani-Bongkrang) dan Pengadaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Papua Barat (Ruas Bts Kota Sorong-Almas-Klamono, Ruas Bts Sorong Selatan-Kambuya, Ruas Jalan Maruni-Kota Manokwari, Ruas Jalan Maruni-Oransbari)
8. Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp 25.554.814.254,00 yang merupakan Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan Jalan Pendukung KSPN Mandalika, Pemantauan dan Peralatan Pendukung Penegakan Hukum Lalu Lintas, Peralatan Pendukung Peralatan Penunjang dan Survey Andalalin, dan pengadaan Alat Kantor (Notebook, Personal Komputer, Printer, Perlengkapan Video Conference)
9. Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp29.154.763.039,00 yang merupakan Pengadaan Perangkat Keras

Sistem Penimbangan dan Integrasi Sistem Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Online, Pengadaan Weighft inMotion, Pengadaan Perangkat Terminal Online System, Aplikasi Terminal System;

10. Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp54.409.596.112,00 yang merupakan Pengadaan Alat Pemeriksaan Laik Fungsi Kendaraan Bermotor Non Statis Paket 1 s.d Paket 5, Pengadaan Peralatan Pendukung Sistem Informasi Keselamatan, Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Rem Kendaraan dan Uji Smoke Tester, Pengadaan Penunjang Uji Kompetensi Kendaraan Bermotor, dan Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Alat Kantor dan Perangkat Lainnya (Peralatan Tim Media Digital, Printer, PC, Laptop Operasional, dan Perangkat Video Conference Lainnya).

Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid sebesar Rp108.850.155.644,00 terdapat pada 5 (lima) satker antara lain sebagai berikut:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp38.802.895.231,00 yang merupakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Karawang-Pamanukan, Ruas Jalan Pamanukan-Bts Cirebon, Bts Kab. Cirebon-Losari, Ruas Jalan Cianjur-Puncak, Ruas Jalan Cikembang-Ciawi, Ruas Jalan Banjar-Pangandaran-Bts Prov. Jateng, Ruas Jalan Cimerak-Cipatujah, Ruas Jalan Pangandaran-Cimerak, Ruas Jalan Cikembang-Bagbapan dan Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan di UPPKB;
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp18.970.820.273,00 yang merupakan Peningkatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Perkotaan di Kota Banyuwangi dan Kota Jember serta Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas Btas Kota Ngawi-Madiun, Batas Kab Ngawi-Caruban, Ruas Glonggong-Bts Kota Pacitan, Ruas Bts Kota Pacitan-Bts Kab Trenggalek, Bts Kota Pandaan-Bts Kab. Malang, dan Ruas Jalan di wilayah UPPKB Jawa Timur (Termasuk Supervisi)

3. Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp44.096.306.717,00 yang merupakan Pembangunan Arterial Transport Management System Pantura Karawang-Indramayu, Pembangunan Arterial Transport Management System Pansela Banyumas-DI Yogyakarta dan Pengadaan Alat Penerangan Jalan Pendukung Kegiatan Buy The Service Bidang Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional menuju Pelabuhan;
4. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp4.819.741.700,00 yang merupakan Pengadaan Laptop dan Printer (penunjang penanganan Covid), Pengadaan Hepa Filler di ruangan Setditjen Hubdat (Bagian Perencanaan, Keuangan, Umum)
5. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.160.391.723,00 yang merupakan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka, paku jalan, dan LPJU dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Program Padat Karya

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.282.095.846.722,00** dan **Rp1.331.133.998.399,00**. Belanja modal gedung dan bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **3,68** persen dibandingkan 31 Desember 2020.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.104.613.958.000	1.100.720.591.730	99,65	1.009.269.484.520	9,06
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	9.145.166.000	9.145.165.600	100,00	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	38.395.360.000	38.373.902.952	99,94	106.577.362.060	(63,99)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	134.209.214.000	133.869.046.121	99,75	215.455.503.319	(37,87)
Jumlah Belanja Kotor	1.286.363.698.000	1.282.108.706.403	99,67	1.331.302.349.899	(3,70)
Pengembalian Belanja	0	12.859.681	0	168.351.502	(92,36)
Jumlah	1.286.363.698.000	1.282.095.846.722	99,67	1.331.133.998.397	(3,68)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan disebabkan oleh refocusing kegiatan untuk Belanja dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), seperti pembangunan tempat cuci tangan permanen/*protable* pada Kantor BPTD/Terminal Penumpang Tipe A/UPPKB/Pelabuhan Penyeberangan, pembangunan dan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang Internasional (TBI), UPPKB dan Pelabuhan Penyeberangan, Pembangunan Gedung Kantor BPTD, dan pembangunan fasilitas/prasarana untuk penerapan protokol kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang signifikan diantaranya terdapat pada:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Prov. Papua dan Papua Barat sebesar Rp153.895.527.860,00 yang dipergunakan untuk Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw Perbatasan Papua Nugini Tahap V, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Salawati, Pelabuhan Penyeberangan Batanta, Pelabuhan Penyeberangan Bade, Pelabuhan Penyeberangan Kaimana, Pelabuhan Penyeberangan Klademark Tahap III, Pelabuhan Sungai Akat, pelabuhan Penyeberangan Sungai Agats, Pelabuhan Penyeberangan Sungai Ewer, Pelabuhan Penyeberangan Sungai Sawaema, dan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Pepera Tahap II)

2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Prov. Sumatera Utara sebesar Rp138.601.867.533,00 yang diperuntukkan untuk pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap I, Pelabuhan Silalahi Tahap I, Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo, Pelabuhan Sigapiton Tahap I, Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli Kab. Nias, Revitalisasi/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Tanjung Pinggir dan Terminal Tipe A Amplas.
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Prov. Kalimantan Tengah sebesar Rp121.077.006.100,00 yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan sungai (Pembangunan Dermaga Palambahan-Pangkot, Dermaga Maluku-Badiri, Dermaga Sungai Kapar, Dermaga Terusan Karya Bataguh, Dermaga Sungai Mantangai, Dermaga Lupak, Dermaga Sei Ijum, Dermaga Sungai Mentaya, Peningkatan dan Rehabilitasi UPPKB Anjir Serapat, Rehabilitasi Dermaga Mintin dan Anjir Serapat.
4. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Prov. Bali dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp118.652.621.282,00 yang diperuntukkan untuk Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di KSPN Mandalika termasuk Supervisi, Pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sampalan, Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul dan Manajemen Konstruksi, serta Rehabilitasi Terminal Tipe A Mengwi.
5. Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp106.583.389.383,00 yang diperuntukkan Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti, Leuwi Panjang, Tirtonadi, dan Terminal Tipe A Kebumen

Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid sebesar Rp38.373.902.952,00 dengan nilai signifikan terdapat pada 3 (tiga) satker antara lain sebagai berikut:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX sebesar Rp6.580.554.875,00 yang diperuntukkan untuk rehabilitasi UPPKB Tomo dan Revitalisasi Terminal Tipe A Banjar;

2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp14.537.330.000,00 yang diperukkan untuk pembangunan Dermaga Danau Sentani;
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp13.015.315.077,00 diperuntukkan untuk peningkatan/revitalisasi Terminal Bobotsari dan rehabilitasi UPPKB Banyudono (termasuk supervisi)

Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp137.847.738.918,00** dan **Rp213.185.889.897,00**. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar **35,34** persen dibandingkan 31 Desember 2020.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal Lainnya	139.309.032.000	137.847.738.918	98,95	213.366.454.897	(35,39)
Jumlah Belanja Kotor	139.309.032.000	137.847.738.918	98,95	213.366.454.897	(35,39)
Pengembalian Belanja	0	0	0	180.565.000	(100,00)
Jumlah	139.309.032.000	137.847.738.918	98,95	213.185.889.897	(35,34)

Belanja Modal Lainnya yang signifikan diantaranya terdapat pada:

- a. Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp29.917.428.635,00 dengan nilai signifikan merupakan realisasi studi desain Kapal, Sungai dan Danau, Penyusunan Alur Pelayaran di Selat Sunda dan Lombok, Penyusunan Rencana Induk Sungai Musi, Sungai Kabupaten Asmat, Sungai Mahakam, dan Sungai Batanghari, Manajemen Lalu Lintas Danau Toba,

Penyusunan studi pelayaran Danau Toba, Penyusunan Pedoman Teknis Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau serta Digitalisasi pengawasan operasional transportasi sungai, danau dan penyeberangan;

- b. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Prov. sebesar Rp25.483.248.200,00;
- c. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp20.005.188.200,00 yang diantaranya merupakan pengembangan sumber data e-Hubdat, Evaluasi Hasil Pengembangan Ditjen Perhubungan Darat, Penyusunan Profil dan Mitigasi risiko, kajian pengembangan arsitektur system dan jaringan.
- d. Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp16.761.148.020,00 yang diantaranya merupakan penyusunan masterplan dan DED pembangunan terminal penumpang tipe A Purworejo dan Jepara, Review DED Revitalisasi Terminal Tipe A Purboyo, Kertonegoro, dan Tamanan, Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Sumatera Selatan, Penyusunan Pedoman Teknis WIM, Penyusunan DED Fasilitas Integrasi, Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Tipe A Kebumen, Penyusunan Studi KPBU.

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

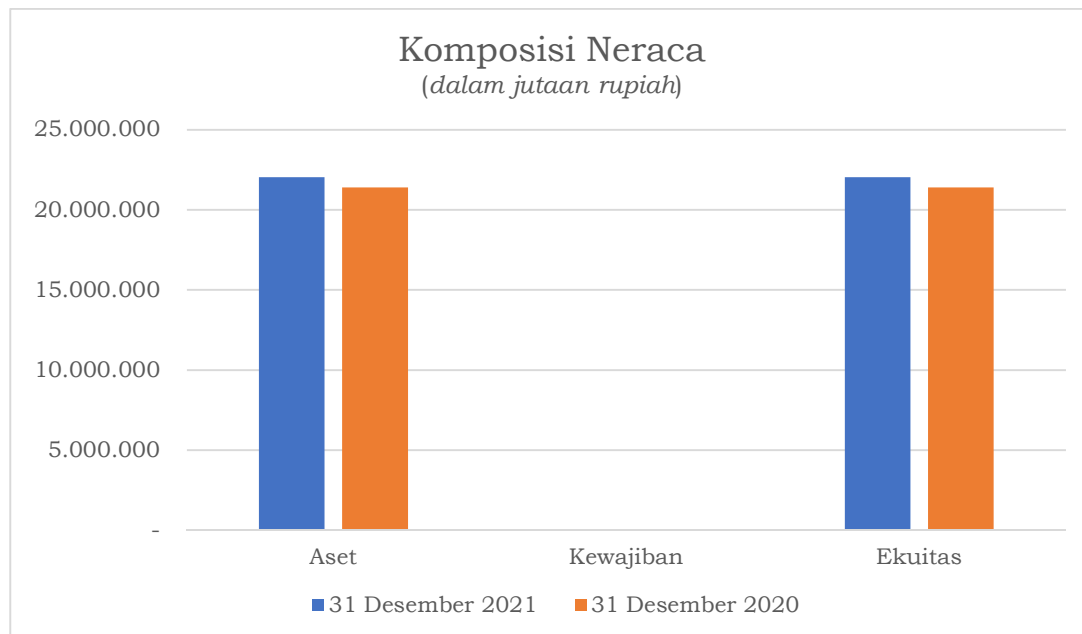
Neraca
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
Aset Lancar	7.227.707.280.394	6.444.833.276.908	782.874.003.486	12,15
Aset Tetap	12.797.612.568.627	12.471.682.708.313	325.929.860.314	2,61
Aset Lainnya	2.001.868.626.794	2.466.030.622.555	(464.161.995.761)	(18,82)
JUMLAH ASET	22.027.188.475.815	21.382.546.607.776	644.641.868.039	3,01
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	927.329.990	563.080.648	364.249.342	64,69
EKUITAS	22.026.261.145.825	21.381.983.527.128	644.277.618.697	3,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22.027.188.475.815	21.382.546.607.776	644.641.868.039	3,01

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp22.027.188.475.815,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.227.707.280.394,00, Aset Tetap sebesar Rp12.797.612.568.627,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp2.001.868.626.794,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp927.329.990,00** yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp22.026.261.145.825,00**.

Jumlah Aset per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp644.641.868.039,00** dari jumlah Aset per 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disertai dengan kenaikan Kewajiban sebesar **Rp364.249.342,00** dan kenaikan Ekuitas sebesar **Rp644.277.618.697,00**.

Grafik komposisi Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:



C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp454.548.990,00** dan **Rp55.638.398,00**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	135.847	0	135.847	0
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP				
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	219.233.693	0	219.233.693	0
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	235.179.450	0	235.179.450	0
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	55.638.398	(55.638.398)	(100,00)
Jumlah	454.548.990	55.638.398	398.910.592	716,97

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran UP pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 03 Januari 2022 dengan NTPN: 9CC836U8E3885L9F.

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2022 dengan NTPN: D850B8N3E0LE272R dan 4 Januari 2022 dengan NTPN: 6D5147QLU632MH7C. Sedangkan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 03 Januari 2022 dengan NTPN: 2700E7QLTTQKIKFS.

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp14.490.108.184,00**. Belanja Dibayar di Muka muncul karena progres penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2020 belum selesai 100% namun pembayarannya sudah dilakukan secara penuh atau 100%. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
BELANJA DIBAYAR DIMUKA				
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	900.000.000	(900.000.000)	(100,00)
BPTD Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat	0	13.590.108.184	(13.590.108.184)	(100,00)
Jumlah	0	14.490.108.184	(14.490.108.184)	(100,00)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka mengalami penurunan sebesar Rp14.490.108.184,00 atau 100% dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2020.

Penurunan saldo Belanja Dibayar Dimuka disebabkan telah diselesaikan pekerjaan pada Direktorat Transprotasi Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa pengiriman dan peluncuran (mobilisasi) ke lokasi lintasan untuk 2 (dua) unit Bus Air Danau Sentani untuk dukungan PON XX Papua sebesar Rp900.000.000,00 dan pekerjaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat berupa Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Nanga Badau Tahap II sebesar Rp1.121.827.400,00 dan Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Sambas Tahap III sebesar Rp12.468.280.784,00.

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp9.009.297.384,00** dan **Rp242.122.923.862,00**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG PNBP				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	8.909.265.000	241.640.250.000	(232.730.985.000)	(96,31)
PIUTANG LAINNYA				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	0	129.277.932	(129.277.932)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I	24.392.945	0	0	0
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	0	255.101.696	(255.101.696)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	14.439.066	78.608.759	(64.169.693)	(81,63)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	33.150.000			
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	28.050.373	19.685.475	8.364.898	42,49
Jumlah	9.009.297.384	242.122.923.862	(233.171.169.423)	(96,30)

Nilai Piutang Bukan Pajak yang signifikan berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas Potensi Kekurangan PNBP atas Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2017 senilai **Rp683.751.900.000,00**, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Lainnya Tahun 2016 dan 2017 Nomor 82/HP/XIV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah mengajukan revidi kepada Se Inspektorat Jenderal terhadap Piutang PNBPN atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan hasil revidi sebagai berikut:

1. Reviu kesatu dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp442.111.650.000 (empat ratus empat puluh dua miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada koreksi audited LK Tahun 2020;
2. Reviu kedua dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp206.270.400.000 (dua ratus enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Triwulan III Tahun 2021;
3. Reviu ketiga nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp32.902.750.000 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari nilai Rp32.902.750.000,00 yang telah disetujui oleh Inspektorat sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor KU.102/1/1/ITJEN/2022 tanggal 05 Januari 2022, telah penyesuaian/koreksi nilai Piutang PNBPN senilai Rp26.460.585.000,00 dalam jurnal koreksi Laporan Keuangan Tahun 2021 *audited*, dan sisanya belum diakui oleh Tim Pemeriksa BPK.

Rincian Piutang PNBPN dan Pembayaran Piutang PNBPN per Agen Pemegang Merek (APM)/Importir pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan per 31 Desember 2021 beserta dengan mutasi piutang adalah sebagai berikut:

No	Nama APM	Nilai Temuan SRUT (LHP Kinerja BPK RI)	Penyesuaian Nilai Piutang PNPB pada Laporan Keuangan	Sisa Piutang PNPB pada Laporan Keuangan	Penyesuaian Nilai Piutang PNPB pada Laporan Keuangan	Sisa Piutang PNPB pada Laporan Keuangan	Hasil Reviu Ketiga Inspektorat Jenderal	Sisa Piutang PNPB 31 Desember 2021 Audited
			Koreksi Audited	31 Desember 2020 Audited	Reviu Kedua	30 September 2021	Penyesuaian Piutang PNPB 31 Desember 2021	
a	b	c	e	f = c - e	g	h = f - g	j	k = h - j
1	PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia	190.000.000	190.000.000	-	-	-	-	-
2	PT. Tjahja Sakti Motor (BMW, MINI, Peugeot)	1.692.000.000	1.691.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-
3	PT. TVS Motor Company Indonesia	117.600.000	115.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-
4	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	130.551.100.000	119.050.500.000	11.500.600.000	11.500.600.000	-	-	-
5	PT. Astra Honda Motor	434.660.200.000	239.476.200.000	195.184.000.000	176.510.800.000	18.673.200.000	18.673.200.000	-
6	PT. Garuda Mataram Motor (VW dan Audi)	286.000.000	144.500.000	141.500.000	1.000.000	140.500.000	96.500.000	44.000.000
7	PT. Tata Motor Indonesia	347.750.000	81.500.000	266.250.000	-	266.250.000	-	266.250.000
8	PT. Hyundai Indonesia Motor	484.000.000	330.500.000	153.500.000	11.750.000	141.750.000	-	141.750.000
9	PT. Astra Daihatsu Motor	9.994.750.000	5.988.000.000	4.006.750.000	2.208.250.000	1.798.500.000	-	1.798.500.000
10	PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia	15.001.250.000	14.423.500.000	577.750.000	-	577.750.000	-	577.750.000
11	PT. Kawasaki Motor Indonesia	3.922.900.000	964.300.000	2.958.600.000	508.100.000	2.450.500.000	2.368.300.000	82.200.000
12	PT Suzuki Indomobil Motor	31.360.100.000	21.201.600.000	10.158.500.000	7.234.850.000	2.923.650.000	700.000	2.922.950.000
13	PT. Toyota - Astra Motor	50.061.500.000	37.234.250.000	12.827.250.000	6.618.250.000	6.209.000.000	3.711.750.000	2.497.250.000
14	PT. Eurokars Motor Indonesia (Mazda)	600.750.000	600.750.000	-	-	-	-	-
15	PT. Honda Prospect Motor (Honda Mobil)	3.043.000.000	314.500.000	2.728.500.000	1.674.000.000	1.054.500.000	1.049.385.000	5.115.000
16	PT. Hino Motor Sales Indonesia	4.750.000	4.750.000	-	-	-	-	-
17	PT. Nissan Motor Distributor Indonesia	860.750.000	300.000.000	560.750.000	-	560.750.000	560.750.000	-
18	PT. Kia Indonesia Motor	318.000.000	-	318.000.000	-	318.000.000	-	318.000.000
19	PT. Auto Euro Indonesia (Renault)	255.500.000	-	255.500.000	-	255.500.000	-	255.500.000
Jumlah		683.751.900.000	442.111.650.000	241.640.250.000	206.270.400.000	35.369.850.000	26.460.585.000	8.909.265.000

Selanjutnya, saldo Piutang Lainnya merupakan pengakuan piutang atas Pengembalian Belanja akibat kelebihan pembayaran/kekurangan volume pekerjaan atau tidak sesuai pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak, yang terdapat pada:

1. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh atas pekerjaan Rehabilitasi Terminal Tipe A Langsa dan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Paya Ilang, sebesar Rp24.392.945,00 yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 07 April 2022 dengan NTPN: 9AB4E7QLU6C2JJOG dan F54547QLU6C2JKMG.
2. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp14.439.066,00 yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 15 Maret 2022 dengan NTPN: C6A2048VURVPSHUO.
3. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat sebesar Rp33.150.000,00 yang telah dilakukan penyetoran

kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 12 April 2022 dengan NTPN: 910E561QUH7F50EO.

4. Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp28.050.373,00 yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal tanggal 21 Januari 2022 dengan NTPN: 9920655DEMCB6RVQ.

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp487.928.987,00** dan **Rp1.653.497.119,00**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Piutang Bukan Pajak

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	9.009.297.384	242.122.923.862	(233.113.626.478)	(96,28)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(487.928.987)	(1.653.497.119)	1.165.568.132	(70,49)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	8.521.368.397	240.469.426.743	(231.948.058.346)	(96,46)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak – Piutang Bukan Pajak

Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
1	2	3	4	5
Lancar	8.435.797.384	0,5%	(42.178.987)	8.393.618.397
Kurang Lancar	0	10%	0	0
Diragukan	255.500.000	50%	(127.750.000)	127.750.000
Macet	318.000.000	100%	(318.000.000)	0
Jumlah	9.009.297.384		(487.928.987)	8.521.368.397

Rincian Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.5 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp7.218.731.363.007,00** dan **Rp6.189.818.103.583,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, dan Persediaan Lainnya) dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
Barang Konsumsi	27.779.212.782	43.835.991.750	(16.056.778.968)	(36,63)
Bahan untuk Pemeliharaan	122.971.895	23.046.238	99.925.657	433,59
Suku Cadang	28.771.150	132.500	28.638.650	21.614,08
Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	3.261.508.663.508	2.633.471.389.391	628.037.274.117	23,85
Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	2.143.910.253.702	2.139.399.851.481	4.510.402.221	0,21
Jalan Irigasi dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.668.627.207.994	1.229.503.285.968	439.123.922.026	35,72
Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	84.732.118.799	119.403.091.799	(34.670.973.000)	(29,04)
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	9.911.050.130	0	9.911.050.130	0
Bahan Baku	6.744.940.789	1.159.500	6.743.781.289	581.611,15
Persediaan Lainnya	15.366.172.258	24.180.154.956	(8.813.982.698)	(36,45)
Jumlah	7.218.731.363.007	6.189.818.103.583	1.028.913.259.424	16,62

Per 31 Desember 2021, Persediaan yang dalam kondisi Rusak sebesar Rp431.174.824,00 dan Rp0,00 (tidak ada) dalam kondisi Usang.

Persediaan dengan kondisi Rusak terdapat pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Rupiah
Blangko SRUT 2017	2.824	12.419.248
Blangko SRUT 2018	123.525	413.067.600
Blangko SUT 2018	471	1.575.024
Blangko SUT 2018	133	4.389.000
Jumlah	126.953	431.174.824

Persediaan Blangko SRUT mengalami kerusakan disebabkan oleh kesalahan/kerusakan dalam proses pencetakan isian Blangko SRUT (proses *print out* isian Blangko).

Terhadap persediaan rusak tersebut, sedang diusulkan untuk proses penghapusan dengan pemusnahan.

Dari nilai Barang Konsumsi sebesar Rp27.779.212.782,00, diantaranya yang memiliki nilai signifikan terdapat pada:

1. Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp25.861.484.236,00, berupa:
 - a. Blangko Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 2018 sebesar Rp5.024.360.000,00;
 - b. Kartu Uji (Kartu Pintar) 2021 sebesar Rp2.767.160.000,00; dan
 - c. Tanda Uji (Stiker) 2021 sebesar Rp1.303.210.000,00.
2. Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp6.776.644.192,00 berupa blanko Tilang; dan
3. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp723.934.200,00 berupa blanko Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Nilai saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp7.168.689.294.133,00 terdiri dari Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp3.261.508.663.508,00; Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp2.143.910.253.702,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.668.627.207.994,00, Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp84.732.118.799,00, dan Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp9.911.050.130,00.

Dari Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp4.4891.624.132.281,00, Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp365.487.738.428,00, Bus sebesar Rp1.142.568.664.207, *Air Traffic Control System* (ATCS) sebesar Rp270.098.133.543,00, Rambu-Rambu Lalu Lintas sebesar Rp396.180.355.585,00, Terminal sebesar Rp45.292.053.169,00, dan Barang Lainnya yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya sebesar Rp57.438.216.920,00.

Jenis	Jumlah NUP	Nilai	%
Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	417	4.891.624.132.281	68,24
Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan	39	365.487.738.428	5,10
Bus	595	1.142.568.664.207	15,94
ATCS	109	270.098.133.543	3,77
Rambu-Rambu Lalu Lintas	328	396.180.355.585	5,53
Terminal	5	45.292.053.169	0,63
Barang Lainnya	80	57.438.216.920	0,80
Jumlah	1.573	7.168.689.294.133	100

Saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat bersifat signifikan disebabkan oleh proses

pemindahtanganan (hibah) kepada Pemerintah Daerah/ Masyarakat, masih dalam proses pengumpulan data dukung pemindahtanganan atau telah diusulkan persetujuan pemindahtanganan, namun sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan belum terbit surat persetujuan pemindahtanganan.

Rincian proses pemindahtanganan terhadap barang, yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar **Rp4.891.624.132.281,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan**, dengan rincian:
 - 1) sebesar **Rp3.502.187.035.975,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp1.260.576.819.409,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**, dimana sebesar **Rp403.689.480.338,00** Pemerintah Daerah atau penerima hibah menyatakan **berkeberatan menerima hibah aset**;
 - 3) sebesar **Rp22.196.123.200,00** merupakan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan yang **baru selesai 100% pada Tahun 2021**;
 - 4) sebesar **Rp69.117.027.536,00** masih dalam proses pengerjaan konstruksi aset; dan
 - 5) sebesar **Rp37.547.126.161,00** akan di reklasifikasi ke Aset Tetap dikarenakan akan dikelola atau dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat.
- b. Sebesar **Rp365.487.738.428,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan**, dengan rincian:
 - 1) sebesar **Rp161.910.927.228,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;

- 2) sebesar **Rp12.418.920.050,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**;
 - 3) sebesar **Rp63.054.999.600,00** masih dalam **proses pengerjaan konstruksi** aset; dan
 - 4) sebesar **Rp128.102.891.550,00** akan **direklasifikasi ke Aset Tetap** dikarenakan akan diserahkan kepada PT. ASDP dengan menggunakan mekanisme penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP).
- c. Sebesar **Rp1.142.568.664.207,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Bus**, dengan rincian:
- 1) sebesar **Rp304.951.774.960,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp807.143.744.747,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**; dan
 - 3) sebesar **Rp30.473.144.500** merupakan Pengadaan Bus yang pada Tahun 2021.
- d. Sebesar **Rp270.098.133.543,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Air Traffic Control System (ATCS)**, dengan Rincian:
- 1) sebesar **Rp159.888.659.023,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp96.938.904.397,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**;
 - 3) sebesar **Rp13.270.570.123,00** merupakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ATCS yang **baru selesai 100% pada Tahun 2021**;
- e. Sebesar **Rp396.180.355.585,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Rambu-Rambu Lalu Lintas**, dengan Rincian:

- 1) sebesar **Rp134.672.912.072,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp142.944.861.919,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**;
 - 3) sebesar **Rp90.875.562.944,00** merupakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu yang **baru selesai 100% pada Tahun 2021**; dan
 - 4) sebesar **Rp27.687.018.650,00** akan di reklasifikasi ke Aset Tetap dikarenakan akan dikelola atau dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat.
- f. Sebesar **Rp45.292.053.169,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Terminal**, dengan rincian:
- 1) sebesar **Rp1.220.894.606,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp4.865.640.000,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**; dan
 - 3) sebesar **Rp39.205.518.563,00** akan di reklasifikasi ke Aset Tetap dikarenakan akan dikelola atau dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat.
- g. Sebesar **Rp57.438.216.920,00** merupakan nilai Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah berupa **Barang Lainnya**, dengan Rincian:
- 1) sebesar **Rp10.958.006.614,00** telah diusulkan **proses permohonan persetujuan pemindahtanganan** sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) sebesar **Rp41.246.916.766,00** masih dalam tahap **proses inventarisasi dan pengumpulan data dukung**; dan
 - 3) sebesar **Rp5.233.293.540,00** akan di reklasifikasi ke Aset Tetap dikarenakan akan dikelola atau dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat.

Selanjutnya, mengacu ketentuan pada Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dalam hal Barang Milik Negara (BMN) dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda, untuk diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan selanjutnya, diatur beberapa ketentuan terkait Barang Persediaan yang Tidak dikuasai, yaitu barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang sudah tidak berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang (KPB), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan belum tuntas.

Rincian Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dimasukkan ke dalam **Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai** per 31 Desember 2021, terdapat pada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT dan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp341.745.212.218,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Nilai	No Surat Usulan	Nomor Persetujuan Hibah
BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung				
1	Dermaga Sungai Jakabaring	12.095.485.344	PL.301/3/11/DJPD/2020 Tanggal 10 Juni 2020	B-20/KSN/PB.02,01/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 S-354/MK.6/2021 tanggal 19 Agustus 2021
2	DERMAGA GASING	9.143.996.234	PL.301/5/2/DJPD/2020 Tanggal 20 Oktober 2020	PL.301/9/14/PHB 2021 Tanggal 29 Juni 2021
3	DERMAGA MUARA TELANG	7.371.767.896	PL.301/5/4/DJPD/2020 tanggal 30 Oktober 2020	PL.301/15/22/PHB 2021 Tanggal 03 Desember 2020

No.	Uraian Barang	Nilai	No Surat Usulan	Nomor Persetujuan Hibah
BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung				
4	DERMAGA SUNGAI PENUGUAN	3.400.862.000	PL.301/5/3/DJPD/2020 Tanggal 20 Oktober 2020	PL.301/15/21/PHB 2021 Tanggal 03 Desember 2020
5	TERMINAL TIPE B INDRALAYA KAB. OGAN ILIR	10.524.155.369	Naskah BAST Hibah Nomor BA.21 Tahun 2015 dan Nomor 988.b/HUBKOMINFO-OI/2015 tanggal 01 Juli	
6	ATCS Kota Palembang (termasuk Supervisi) TA. 2018	7.297.000.000	PL.201/4/20/DJPD/2020 tanggal 07 Desember 2020	PL.301/2/10/PHB 2021 Tanggal 10 Februari 2021
7	Pekerjaan SBNP di Kabupaten Belitung	1.916.112.000	PL.201/4/19/DJPD/2020 Tanggal 7 Desember 2020	PL.301/1/3/PHB 2021 Tanggal 05 Januari 2021
8	KDP DERMAGA MANGGAR TAHAP I-IV (LLASDP BABEL)	19.188.259.156	PL.301/3/12/DJPD/2020 Tanggal 16 Juni 2020	B-20/KSN/PB.02.01/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 S-355/MK.6/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
9	Rehabilitas Dermaga Tanjung Ru (Termasuk Supervisi) LLASDP BABEL	8.485.680.000	PL.201/4/20/DJPD/2020 tanggal 7 Desember 2020	PL.301/1/4/PHB 2021 Tanggal 05 Januari 2021
BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT				
10	Pelabuhan Penyeberangan Hansisi	19.887.379.000	PL.201/1/8/DJPD/2020 8 Januari 2020 dan PL.301/2/9/DJPD/2020 tanggal 29 April 2020	B-20/KSN/PB.02.01/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 S-330/MK.6/2021 tanggal 8 Agustus 2021
11	Pelabuhan Penyeberangan Maropokot	39.901.768.000	PL.201/8/13/DJPD/2019 Tanggal 6 Desember 2019	B-09/KSN/S/PB.02.01/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 S-27/MK.6/2022 tanggal 13 Januari 2022
12	KMP. SIRUNG	34.568.780.948	PL.201/1/12/DJPD/2020 Tanggal 13 Januari 2020	B-7/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 S-108/MK.06/2021 tanggal 4 maret 2021
BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan				
13	Pelabuhan Penyeberangan Sebuku Kab. Kotabaru (Selesai)	119.765.107.271	PL.301/6/13/DJPD/2019 Tanggal 18 Juli 2019	B-177/Kemensetneg/Ses/PB.02/04/2020 tanggal 22 April 2020 S-294/MK.6/2021 tanggal 14 Juli 2021
14	Dermaga Sungai di Banjaraya Kota Banjarmasin Tahap I II dan III	25.062.662.000	PL.201/4/7/DJPD/2019 Tanggal 17 juni 2019	S-417/MK-6/2021 Tanggal 17 September 2021
15	KDP TANAH & BANGUNAN Dermaga Penyeberangan Pulau Laut (SDP KALSEL)	23.136.197.000	PL.201/5/2/DJPD/2019 Tanggal 18 Juli 2019	B-177/Kemensetneg/Ses/PB.02/04/2020 tanggal 22 April 2020 S-294/MK.6/2021 tanggal 14 Juli 2021
Jumlah		341.745.212.218		

Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.6 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.321.144.264.579,00** dan **Rp2.290.533.011.448,00**. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Tanah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
100	Koreksi Saldo Awal	38.957.424.000,
101	Pembelian	1.978.140.060,
102	Transfer Masuk	527.147.924.587,
103	Hibah (Masuk)	36.928.221.761,
107	Reklasifikasi Masuk	670.224.000,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	30.529.280.000,
202	Pengembangan Nilai Aset	10.185.476.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(11.381.320,)
208	Pengembangan Melalui KDP	9.228.887.000,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(30.529.280.000,)
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
301	Penghapusan	(40.000.000,)
302	Transfer Keluar	(578.001.194.237,)
304	Reklasifikasi Keluar	(16.420.683.040,)
305	Koreksi Pencatatan	(11.785.680,)
	Jumlah	2.321.144.264.579,

Saldo akhir Tanah per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp30.611.253.131,00 atau 1,33 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Koreksi saldo awal pada satker Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp38.957.424.000,00 berupa Pencatatan Tanah Pelabuhan Penyeberangan di Alor dan Terminal Tipe A Mangkang, Kab Semarang.
2. Pembelian senilai Rp1.978.140.060,00 merupakan:

- a. Pengadaan Lahan Terminal Barang Internasional Skouw senilai Rp1.200.000.000,00 di satker BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat.
 - b. Pengadaan Lahan Pelabuhan Porsea senilai Rp762.000.000,00 di satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Pengeluaran biaya sertifikasi senilai Rp11.785.680,00 untuk lahan pada BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
3. Hibah (Masuk) Tanah senilai total Rp36.928.221.761,00 berupa Tanah Terminal Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan Pelabuhan Penyeberangan dari Pemerintah Daerah pada Satker Setditjen Perhubungan Darat.
4. Pengembangan Nilai Aset senilai total Rp10.185.476.000,00 antara lain merupakan transaksi:
 - a. pengadaan tanah untuk mess pegawai satuan pelayanan senilai Rp7.038.416.000,00 pada BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara;
 - b. pengembangan tanah Pelabuhan Porsea senilai Rp2.997.060.000,00 pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
 - c. sertifikasi tanah Terminal Barang Internasional Skouw senilai Rp150.000.000,00 pada BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Pengembangan Nilai KDP senilai total Rp9.228.887.000,00 merupakan transaksi kapitalisasi nilai pengurukan Tanah *test track* Tahap IV ke dalam nilai tanah kantor Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
6. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp30.529.280.000,00 pada BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dikarenakan perbaikan data tidak normal.
7. Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN senilai Rp30.529.280.000,00 pada BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten sebagai tindak lanjut Normalisasi BMN yang dikarenakan perbaikan data tidak normal.

8. Transfer Masuk senilai Rp527.147.924.587,- dan Transfer Keluar senilai Rp578.001.194.237,- antara lain merupakan transaksi:
- a. pemindahan pencatatan Tanah Terminal Penumpang Tipe A, UPPKB, dan Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat senilai Rp74.331.044.267,00 dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. pemindahan pencatatan tanah yang akan dilakukan pembangunan menggunakan skema KPBU senilai Rp5.216.848.970,00 dari BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kep. Riau, senilai Rp45.636.420.680,00 dan BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung kepada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - c. transfer keluar tanah yang akan dilakukan pembangunan menggunakan skema KPBU senilai Rp50.853.269.650,00 kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang, Kementerian PUPR;
 - d. likuidasi aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869) senilai Rp312.357.401.087,00 karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD;
 - e. transfer keluar antar unit pembantu KPB pada BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (403869) senilai Rp89.606.209.583,00.
9. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp16.420.683.040,00 terdapat pada:
- a. Satker BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan senilai - Rp6.858.136.040,00 yang merupakan reklasifikasi tanah untuk perbaikan pencatatan Dermaga Pasar Lima dan tanah Dermaga Sungai Pendalaman yang sebelumnya tercatat sebagai Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya,
 - b. Satker BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp8.892.323.000,00 merupakan reklasifikasi tanah dikarenakan salah pencatatan yang seharusnya merupakan jalan, dan

- c. BPTD Wilayah XIII merupakan reklasifikasi tanah (perbaikan kode barang) Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi yang sebelumnya tercatat sebagai Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya.
10. Penghapusan pada satker BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp40.000.000,00 merupakan penghapusan UPPKB Simpang Dua yang dihibahkan kepada Pemkot Pematang Siantar sesuai dengan SK Penghapusan KPB Nomor KP_BPTD II 44 Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021.

Rincian Tanah per 31 Desember 2021 dan Rincian Mutasi Tanah per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp9.427.477.452.797,00** dan **Rp8.567.284.592.680,00**. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	8.567.284.592.680,
100	Koreksi Saldo Awal	32.970.700.558,
101	Pembelian	57.137.133.482,
102	Transfer Masuk	467.002.025.209,
103	Hibah (Masuk)	2.353.501.699,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.046.009.033.626,
106	Pembatalan Penghapusan	445.613.000,
107	Reklasifikasi Masuk	744.785.525.546,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	103.146.088,
166	Transaksi Semu Perolehan K3 - Aktif	22.935.000,
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	57.072.219.125,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	827.929.686.160,
202	Pengembangan Nilai Aset	1.218.519.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12.366.368.428,
208	Pengembangan Melalui KDP	943.500.000,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(851.952.916.417,)
266	Transaksi Semu Perubahan K3 - Aktif	(34.815.000,)
301	Penghapusan	(2.338.877.000,)
302	Transfer Keluar	(433.027.639.243,)

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
303	Hibah (Keluar)	(87.649.793.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(812.050.991.358,)
305	Koreksi Pencatatan	(51.021.543.804,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(77.087.748.062,)
351	Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(1.308.614.010,)
366	Transaksi Semu Penghapusan K3 - Aktif	(6.435.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(73.687.673.910,)
	Jumlah	9.427.477.452.797,

Saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp860.192.860.117,00 atau 10,04 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal senilai total Rp32.970.700.558,00 antara lain merupakan transaksi:
 - a. Penginputan saldo awal sebagai tindak lanjut normalisasi atas BMN yang tidak dapat disusutkan sejumlah 30.643 NUP senilai Rp17.245.961.820,00 pada BPTD Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,
 - b. Penginputan saldo awal senilai Rp12.795.508.000,00 pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa Alat Uji *Chasis* dan *Noise Test*,
 - c. Penginputan saldo awal pada satker Setditjen Perhubungan Darat senilai Rp218.709.112,00 berupa Pencatatan Peralatan Mesin atas Pelabuhan Penyeberangan di Alor dan Terminal Tipe A Mangkang, Kab Semarang.
2. Hibah Masuk aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp2.353.501.699,00 pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Pembelian senilai Rp57.137.133.482,00 diantaranya merupakan transaksi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional sebesar Rp5.895.154.165,00;

4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP merupakan transaksi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Nasional sebesar Rp1.046.009.033.626,00.
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp744.785.525.546,00 dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp812.050.991.358,00 diantaranya merupakan transaksi:
 - a. perbaikan pencatatan BMN berupa perlengkapan jalan yang tercatat dalam 1 (satu) paket untuk disesuaikan pencatatannya sesuai dengan jumlah unit dan nilai satuannya sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke SIMAK-BMN atas Bus Bantuan yang akan dialihstatuskan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada Perum Damri senilai Rp87.445.156.168,00 sesuai dengan BASTO Nomor KU.003/100/BASTO/BS/SATKER-DAJ/I/2022 tanggal 20 Januari 2022;
 - c. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke Aset Tetap atas Kapal Passenger (KMP Ngafi) yang termasuk dalam BPYBDS kepada PT. ASDP Indonesia Ferry yang telah terbit Peraturan Pemerintah pada BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara senilai Rp18.228.150.062,00;
 - d. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke Aset Tetap atas BMN berupa Kapal yang termasuk dalam BPYBDS kepada PT. ASDP Indonesia Ferry yang telah terbit Peraturan Pemerintah pada BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara berupa KMP Porodisa senilai Rp16.437.706.500,00;
 - e. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke Aset Tetap atas BMN berupa Kapal yang akan diusulkan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT. ASDP Indonesia Ferry senilai Rp79.683.868.189,00 pada Direktorat Transportasi Sungai,

- Danau, dan Penyeberangan berupa KMP Takabonerate, KM. Itaufili, dan KM Emfote;
- f. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke Aset Tetap atas BMN berupa Kapal yang akan diusulkan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT. ASDP Indonesia Ferry senilai Rp23.615.449.000,00 pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara berupa KM. Asa-Asa dan KM. Jurung-Jurung;
 - g. reklasifikasi masuk dari Persediaan ke Aset Tetap atas BMN berupa Kapal yang Pemerintah Daerah keberatan menerima hibahnya senilai Rp79.683.868.189,00 pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa KMP Takabonerate, KM. Itaufili, dan KM Emfote;
 - h. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan atas BMN berupa Kapal yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah senilai Rp79.683.868.189,00 pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa KMP Takabonerate, KM. Itaufili, dan KM Emfote.
6. Hibah Keluar sebesar Rp87.649.793.000,00 merupakan transaksi:
 - a. Hibah keluar pada satker BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB kepada Pemerintah Daerah berupa ATCS; dan
 - b. hibah keluar pada satker BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku kepada Pemerintah Daerah berupa KMP Bobot Masiwang, KMP Marsela, dan KMP Tanjung Kabat.
 7. Transfer Keluar sebesar Rp432.867.639.243,00 dan Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp466.842.025.209,00 yang merupakan transaksi:
 - a. pemindahan pencatatan aset Terminal Tipe A dan UPPKB dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. transfer Kendaraan dan Peralatan Pengujian dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan kepada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi;

- c. Pemindahan Pencatatan Aset berupa Terminal dari Direktorat Prasarana kepada BPTD Wilayah X dan BPTD Wilayah III;
 - d. Likuidasi Aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869), karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD;
 - e. transfer keluar Bantuan Bus Sekolah kepada Politeknik Penerbangan Jayapura dan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebesar Rp1.057.600.000,00;
 - f. alih status Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada satker berupa politeknik di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp962.897.150,00 dan sekolah tinggi di bawah Kementerian Agama sebesar Rp2.468.807.150,00;
 - g. likuidasi Aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869), karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD.
8. Reklasifikasi BMN ke BPYBDS merupakan transaksi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat peralatan dan mesin kepada PT. ASDP Indonesia Ferry pada BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara berupa KMP Dalente Woba dan KMP Porodisa, pada BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara berupa KMP Ngafi.
 9. Koreksi Pencatatan senilai Rp(51.021.543.804,00) diantaranya merupakan transaksi koreksi pencatatan Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin (Deliniator) dan Pita Penggaduh yang tidak memenuhi persyaratan untuk diakui/dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp(33.204.214.331,00).
 10. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp(851.952.916.417,00) merupakan transaksi normalisasi atas data anomali pada SIMAK BMN;
 11. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp827.929.686.160,00 merupakan hasil tindak lanjut atas transaksi normalisasi terhadap data anomali pada SIMAK BMN .

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilakukan penyesuaian pencatatan terhadap aset Perlengkapan Jalan per unit sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cara melakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk.

Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin, dan Pita Penggaduh dilakukan koreksi pencatatan untuk dibebankan sebagai Beban Barang dan selanjutnya dianggarkan menggunakan Belanja Non Operasional Lainnya sesuai dengan SE Bagan Akun Nomor SE-DRJD Nomor 7 Tahun 2021.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp4.095.896.949.002.00** dan **Rp3.710.905.585.133,00**. Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	3.710.905.585.133,
100	Koreksi Saldo Awal	49.870.746.522,
101	Pembelian	92.000.000,
102	Transfer Masuk	1.083.475.701.340,
103	Hibah (Masuk)	46.894.235.914,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	237.134.015.723,
107	Reklasifikasi Masuk	497.767.624.771,
166	Transaksi Semu Perolehan K3 - Aktif	16.064.059.000,
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.779.779.600,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	126.473.142.520,
202	Pengembangan Nilai Aset	1.723.505.487,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	7.940.317.257,
208	Pengembangan Melalui KDP	132.506.554.583,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(118.751.218.932,)

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
301	Penghapusan	(2.285.248.409,)
302	Transfer Keluar	(1.071.303.791.649,)
303	Hibah (Keluar)	(3.069.917.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(555.337.175.625,)
305	Koreksi Pencatatan	(5.459.242.551,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(3.967.611.000,)
351	Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(18.448.113.250,)
366	Transaksi Semu Penghapusan K3 - Aktif	(17.519.930.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(20.588.070.432,)
	Jumlah	4.095.896.949.002,

Saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp384.991.363.869,00 atau 10,37 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Koreksi Saldo Awal merupakan Koreksi saldo awal pada satker Setditjen Perhubungan Darat senilai Rp49.870.746.522,00 berupa Pencatatan Tanah Pelabuhan Penyeberangan di Alor dan Terminal Tipe A Mangkang, Kab Semarang.
2. Penyelesaian melalui KDP merupakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Revitalisasi Gedung Terminal Tipe A, Gedung UPPKB, dan Dermaga Penyeberangan sebesar Rp286.645.266.016;
3. Hibah Masuk aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp46.894.235.914,00 pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Reklasifikasi Masuk senilai Rp497.767.624.771,00 dan Reklasifikasi Keluar senilai Rp(555.337.175.625,00) yang paling signifikan merupakan transaksi:
 - a. reklasifikasi masuk berupa *guardrail* sebagai salah satu perbaikan pencatatan atas pengadaan perlengkapan jalan (peralatan mesin) yang tercatat dalam 1 (satu) paket untuk disesuaikan pencatatannya sesuai dengan jumlah unit dan nilai satuannya;

- b. perbaikan pencatatan gedung dan bangunan Terminal Tipe A yang disesuaikan dengan jumlah unit gedung.
- 5. Pengembangan Melalui KDP senilai Rp133.151.339.110,00 yang signifikan merupakan transaksi:
 - a. revitalisasi Terminal Tipe A Kebumen, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Terminal tipe A Harjamukti senilai Rp90.055.657.383,00 pada satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. pengembangan Terminal Tipe A Takengon dan Terminal Tipe A Langsa senilai Rp30.400.000.000,00 pada satker BPTD Wilayah I Provinsi Aceh;
 - c. pengembangan Terminal Tipe A Anak Air dan gedung bangunan pada Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus senilai Rp11.815.017.200,00 pada satker BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat.
- 6. Transfer Keluar senilai Rp1.071.303.791.649,00 dan Transfer Masuk senilai Rp1.083.475.701.340,00 atas Gedung dan Bangunan merupakan:
 - a. pemindahan pencatatan aset Terminal Tipe A dan UPPKB dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. pemindahan pencatatan dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Gedung dan Bangunan Terminal Tipe A kepada satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
 - c. Likuidasi Aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869), karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD.
- 7. Penghapusan bongkaran Gedung dan Bangunan Lama aset Terminal Tipe A atau UPPKB sebesar Rp2.285.248.409,00 pada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dan

Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

8. Penghapusan senilai Rp18.448.113.250,00 merupakan transaksi penghapusan pada Satker Balai Pengelola Transportasi Wilayah II Provinsi Sumatera Utara berupa.
9. Transaksi Semu Penghapusan K3 – Aktif senilai Rp17.519.930.000,00 merupakan transaksi semu tindak lanjut K3.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.673.427.283.243,00** dan **Rp2.351.875.752.314,00**. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
Jalan dan jembatan	1.111.482.787.523	1.350.555.665.213	(239.072.877.690)	(17,70)
Irigasi	1.523.075.686.283	963.671.428.452	559.404.257.831	58,05
Jaringan	38.868.809.437	37.648.658.649	1.220.150.788	3,24
Jumlah	2.673.427.283.243	2.351.875.752.314	321.551.530.929	13,67

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
a	B	c
000	Saldo Awal	2.351.875.752.314,
100	Koreksi Saldo Awal	13.478.006.017,
101	Pembelian	5.000.000,
102	Transfer Masuk	219.460.391.659,
103	Hibah (Masuk)	10.844.942.450,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	877.859.488.795,
107	Reklasifikasi Masuk	385.676.083.680,

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	98.553.000,
166	Transaksi Semu Perolehan K3 - Aktif	173.529.000,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	207.801.900.320,
202	Pengembangan Nilai Aset	193.745.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	43.612.050.024,
208	Pengembangan Melalui KDP	447.027.881.569,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(98.524.781.884,)
301	Penghapusan	(6.058.234.300,)
302	Transfer Keluar	(52.829.118.159,)
303	Hibah Keluar	(12.878.904.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.135.065.780.153,)
305	Koreksi Pencatatan	(110.430.028.589,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(301.437.274.000,)
351	Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(41.620.000,)
366	Transaksi Semu Penghapusan K3 - Aktif	(173.529.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(167.240.770.500,)
	Jumlah	2.673.427.283.243,

Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp321.551.530.929,00 atau 13,67 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya berasal dari transaksi:

1. Penyelesaian Pembangunan melalui KDP merupakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Revitalisasi Dermaga Penyeberangan sebesar Rp877.859.488.795,00 dengan transaksi signifikan antara lain:
 - a. Pengembangan Dermaga di Danau Toba senilai Rp341.503.574.980,00 berupa Dermaga Porsea, Dermaga Balige, Dermaga Bakkara, Dermaga Ajibata, Dermaga Sigapiton, Dermaga Muara, Dermaga Tongging, Dermaga Simanindo, Dermaga Teluk, Dermaga Ambarita pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pengembangan Dermaga senilai Rp134.783.887.000,00 berupa Dermaga Sungai Agats, Dermaga Sungai Ewer, Dermaga Sungai Sawaerma, Dermaga Sungai Pepera, Dermaga Ponton, dan Dermaga Penyeberangan Bade pada BPTD Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - c. Pengembangan Dermaga senilai Rp106.150.454.100,00 berupa Dermaga Kumai Hilir, Dermaga Maluku-Badir, Dermaga M Krama,

Dermaga Mintin dan Anjir, Dermaga Mantang Ai, Dermaga Terusan Karya, Dermaga B. Hulu dan Dermaga Baping, dan Dermaga Lupak pada BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah.

- d. Pengembangan Dermaga senilai Rp94.871.000.000,00 berupa Pada BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - e. Pengembangan Dermaga senilai Rp78.451.644.959,00 berupa Dermaga Tanjung pada BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 - f. Pengembangan Jalan senilai Rp42.520.801.693,00 berupa Pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Hibah Masuk aset Terminal Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan Pelabuhan Penyeberangan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp10.844.942.450,00 pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 3. Reklasifikasi Masuk senilai Rp385.676.083.680,00 dan reklasifikasi keluar senilai Rp(1.135.065.780.153,00) diantaranya yang merupakan transaksi signifikan:
 - a. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berupa aset Dermaga Paciran yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp546.346.504.000,00;
 - b. reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk sebagai perbaikan pencatatan dengan menggabungkan NUP atas Dermaga Ajibata, Dermaga Simanindo, Dermaga Muara, dan Dermaga Tigaras senilai Rp226.371.547.907,00 pada BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara;
 - c. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa aset Dermaga (Dermaga Sungai Pamotan, Dermaga Danau Crata, Dermaga Sungai Muara Gembong, Danau Siguling Jabar)

yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp175.604.088.000,00.

- d. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT berupa aset Dermaga Waiwerang, Dermaga Solor, dan Dermaga Hansisi yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp42.157.839.000,00;
- e. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset Dermaga Parigi, Dermaga Baturube, dan Dermaga Kolondale yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp26.971.309.000,00;
- f. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara berupa aset Dermaga Lembah, Dermaga Amurang, Dermaga Likupang, Dermaga Marampit, Dermaga Kabaruan, Dermaga Melonguane, Dermaga Musi, dan Dermaga Miangas yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp59.121.254.200;
- g. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku berupa aset Dermaga Ilwaki yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp13.187.809.000,00;
- h. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah berupa aset Dermaga Sungai Kotawaringin Barat, Dermaga Mentaya BSRH Hulu yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp8.933.592.884,00;
- i. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan pada Satker BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri berupa aset Dermaga Alai Insit yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah senilai Rp6.366.159.200,00;
- j. reklasifikasi keluar berupa perbaikan pencatatan Jaringan Listrik Laboratorium senilai Rp2.911.995.000,00 yang dikapitalisasi

dengan DED-nya pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

4. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Tanah sebesar Rp52.829.118.159,00 diantaranya merupakan:
 - a. pemindahan pencatatan aset Terminal Tipe A dan UPPKB dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. pemindahan pencatatan aset fasilitas pejalan kaki (trotoar) di Pekanbaru, Riau dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Prov. Riau dan Kep. Riau.
 - c. Likuidasi Aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869), karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD.
5. Hibah Keluar sebesar Rp12.878.904.000,00 pada Satker BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah yang merupakan Hibah berupa Dermaga yang diserahkan ke Pemerintah Daerah yang telah terbit persetujuan Hibah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SK.018.1/PL.301/BPTDXVI/2021 dan SK.019.1/PL.301/BPTDXVI/2021.
6. Reklasifikasi Keluar BMN ke BPYBDS senilai Rp301.437.274.000,00 antara lain merupakan transaksi:
 - a. reklasifikasi keluar ke BPYBDS pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan senilai Rp265.704.662.000,00 berupa Dermaga V Merak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021;
 - b. reklasifikasi keluar ke BPYBDS pada satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur senilai Rp18.946.784.000,00 berupa Dermaga III Ketapang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021;
 - c. reklasifikasi keluar ke BPYBDS pada satker BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara senilai Rp16.785.828.000,00 berupa

Dermaga Bastiong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp292.310.019.918,00** dan **Rp389.521.476.006,00**. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TETAP LAINNYA				
Aset Tetap Renovasi	281.418.846.109	366.017.004.197	(84.598.158.088)	(23,11)
Aset Tetap Lainnya	10.891.173.809	23.504.471.809	(12.613.298.000)	(53,66)
Jumlah	292.310.019.918	389.521.476.006	(97.211.456.088)	(24,96)

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp96.414.216.088,00 atau 24,75 persen dari saldo per 31 Desember 2020.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Renovasi
a	b	c
000	Saldo Awal	366.017.004.197,
102	Transfer Masuk	24.825.834.472,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	145.170.000,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	21.610.096.301,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(21.610.096.301,)
302	Transfer Keluar	(7.770.278.472,)
303	Hibah (Keluar)	(38.898.389.700,)

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Renovasi
a	b	c
304	Reklasifikasi Keluar	(45.033.196.988,)
305	Koreksi Pencatatan	(811.741.400,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(17.055.556.000,)
	Jumlah	281.418.846.109,

Mutasi Aset Tetap Renovasi diantaranya berasal dari transaksi:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp145.170.000,00 pada satker BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Hibah (Keluar) BMN sebesar Rp38.898.389.700,00 pada satker BPTD Wilayah VI Provinsi Kalimantan Tengah berupa Dermaga yang Diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
3. Transfer keluar Likuidasi Aset BPTD Wilayah X Provinsi Jateng DIY (403850) menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY (403869), karena perubahan tempat kedudukan Kantor BPTD dan Kode Satker BPTD;
4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp45.033.196.988,00 antara lain merupakan transaksi:
 - a. reklasifikasi Aset Tetap Renovasi yang aset induknya telah menjadi aset pemerintah pusat; dan
 - b. reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Persediaan untuk BMN yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
a	B	c
000	Saldo Awal	23.504.471.809,
102	Transfer Masuk	2.224.000,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	498.490.000,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	1.140.050.560,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(1.140.050.560,)
302	Transfer Keluar	(224.000,)
305	Koreksi Pencatatan	(398.555.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(12.715.233.000,)
	Jumlah	10.891.173.809,

Mutasi Aset Tetap Lainnya diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp498.490.000,00 pada satker BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalteng;
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp398.555.000,00 pada satker BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalteng; dan
3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp12.715.233.000,00 pada satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2021 dan Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.117.789.445.907,00** dan **Rp1.525.254.297.773,00**. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	0	51.749.688.693,	(51.749.688.693)	0
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	30.100.000.000	493.637.750.361,	(463.537.750.361)	(0,94)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	17.796.000.000	46.538.204.016,	(28.742.204.016)	(0,62)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	71.322.357.712	79.917.451.796,	(8.595.094.084)	(0,11)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	25.049.522.450	8.773.567.450,	16.275.955.000	1,86
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	0	5.469.177.581,	(5.469.177.581)	(1,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	62.914.725.413	22.804.457.510,	40.110.267.903	1,76
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	126.793.314.370	114.920.861.750,	11.872.452.620	0,10
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	121.870.797.599	137.834.073.099,	(15.963.275.500)	(0,12)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	207.248.148.913	156.042.735.113,	51.205.413.800	0,33
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	20.944.956.000	0,	20.944.956.000	0,00
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	64.246.296.405	17.081.778.165,	47.164.518.240	2,76
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII	83.713.268.900	107.140.470.457,	(23.427.201.557)	(0,22)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX	41.337.639.100	37.006.456.600,	4.331.182.500	0,12
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	13.623.405.400	0,	13.623.405.400	0,00
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII	25.392.440.632	15.885.325.224,	9.507.115.408	0,60
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	68.703.024.193	68.703.024.193,	0	0,00
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	26.026.749.830	9.444.620.222,	16.582.129.608	1,76
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV	93.706.798.390	152.304.655.543,	(58.597.857.153)	(0,38)
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	17.000.000.600	0	17.000.000.600	0,00

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
Jumlah	1.117.789.445.907,	1.525.254.297.773,	(407.464.851.866	(30,54)

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp(7.130.432.846.819,00)** dan **Rp(6.363.692.007.041,00)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Peralatan dan Mesin	9.427.477.452.797	5.964.123.935.731	3.463.353.517.066
2	Gedung dan Bangunan	4.095.896.949.002	667.063.725.200	3.428.833.223.802
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.673.427.283.243	499.223.185.888	2.174.204.097.355
4	Aset Tetap Lainnya	292.310.019.918	22.000.000	292.288.019.918
Total		16.489.111.704.960	7.130.432.846.819	9.358.678.858.141

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp987.312.585.138,00** dan

Rp1.080.306.508.060,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	0	0	0	0
Software	44.089.527.334	40.337.023.740	3.752.503.594	9,30
Lisensi	588.676.250	895.631.250	(306.955.000)	(34,27)
Hasil Kajian/Penelitian	540.762.418.164	509.179.815.499	31.582.602.665	6,20
Aset Tak Berwujud Lainnya	401.871.963.390	529.894.037.571	(128.022.074.181)	(24,16)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434.000.000			
Jumlah	987.312.585.138	1.080.306.508.060	(92.993.922.922)	(8,61)

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
a	b	c
000	Saldo Awal	1.080.306.508.060,
101	Pembelian	7.474.135.874,
102	Transfer Masuk	50.949.500.825,
103	Hibah (Masuk)	5.539.846.000,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	92.265.564.915,
107	Reklasifikasi Masuk	36.806.775.410,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.176.642.000,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	35.759.471.180,
209	Transaksi Normalisasi BMN	4.194.915.560,
301	Penghapusan	(227.866.344.501,)
302	Transfer Keluar	(48.147.685.325,)
304	Reklasifikasi Keluar	(39.426.331.660,)
305	Koreksi Pencatatan	(588.504.200,)
352	Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(2.873.591.100,)
353	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(1.264.919.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(6.993.398.900,)
	Jumlah	987.312.585.138,

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp92.993.922.922,00 atau 8,61 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Pembelian sebesar Rp7.474.135.874,00 merupakan Pengadaan Hasil Kajian/Studi pada Satker:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
 - b. Direktorat Sarana Transportasi Jalan,
 - c. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan,
 - d. Direktorat Lalu Lintas Jalan,
 - e. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor,
 - f. BPTD Wilayah I Provinsi Aceh,
 - g. BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara,
 - h. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,
 - i. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah,
 - j. BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan
 - k. BPTD Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
2. Hibah Masuk sebesar Rp5.539.846.000,00 berupa DED atas Pelabuhan Penyeberangan Singkil pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp92.265.564.915,00 merupakan penyelesaian pekerjaan hasil kajian/studi menggunakan KDP pada Satker:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
 - b. Direktorat Sarana Transportasi Jalan,
 - c. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan,
 - d. Direktorat Lalu Lintas Jalan,
 - e. Direktorat Angkutan Jalan,
 - f. BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kep. Riau.
4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp36.806.775.410,00 yang signifikan terdapat pada Satker:

- a. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senilai Rp26.695.944.000,00 yang berupa perbaikan pencatatan Software menggunakan Reklasifikasi Masuk – Reklasifikasi Keluar;
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan senilai Rp1.267.602.600,00 yang berupa Sistem Penilangan Online yang sebelumnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin;
 - c. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp8.398.139.750,00 yang berupa perbaikan pencatatan ATB Lainnya menggunakan Reklasifikasi Masuk – Reklasifikasi Keluar.
5. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp
- a. BPTD Wilayah I Provinsi Aceh senilai Rp5.539.846.000,00 yang merupakan transaksi kapitalisasi DED Pelabuhan Penyeberangan Singkil ke Induk Aset;
 - b. BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp1.181.935.000,00 berupa studi atas Pelabuhan yang direklasifikasi ke Persediaan;
 - c. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor senilai Rp1.027.344.000,00 berupa Perencanaan DED Layout Instalasi Jaringan Listrik, Perencanaan DED Instalasi Alat Uji, dan DED Gedung GVW dibawah 3,5 Ton yang dikapitalisasi ke aset induknya.
6. Transfer Masuk sebesar Rp50.949.500.825,00 yang signifikan terdapat pada Satker:
- a. Direktorat Lalu Lintas Jalan senilai Rp14.318.142.725,00 dari Direktorat Angkutan Jalan berupa Aset Tak Berwujud Lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi,
 - b. Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp12.737.583.250,00 dari Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Hasil Kajian/Penelitian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi,
 - c. BPTD Wilayah I Provinsi Aceh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada senilai

- Rp5.539.846.000,00 berupa DED Pelabuhan Penyeberangan Singkil,
- d. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senilai Rp12.864.246.450,00 kepada Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Hasil Kajian/Penelitian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan,
 - e. Direktorat Sarana Transportasi Jalan senilai Rp1.931.237.000,00 dari Satker Direktorat Angkutan Jalan berupa Aset Tak Berwujud Lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi,
 - f. Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan dari Satker Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp306.955.000,00 berupa Lisensi atas Audit Surveillance ISO 9001:2008 untuk Proses Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Pemberian Sertifikat SPM Kapal Angkutan Penyeberangan,
 - g. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta senilai Rp3.251.490.400,00 yang merupakan transaksi Transfer Hasil Kajian dalam rangka Likuidasi BPTD Wilayah X yang berubah Kode Satker akibat perubahan Kedudukan Kantor;
7. Transfer Keluar sebesar Rp(48.147.685.325,00) yang signifikan terdapat pada Satker:
- a. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp14.318.142.725,00 kepada Satker Direktorat Lalu Lintas Jalan berupa Aset Tak Berwujud Lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Lalu Lintas Jalan,
 - b. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp12.737.583.250,00 kepada Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Hasil Kajian/Penelitian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan,

- c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Satker BPTD Wilayah I Provinsi Aceh senilai Rp5.539.846.000,00 berupa DED Pelabuhan Penyeberangan Singkil,
 - d. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senilai Rp12.864.246.450,00 kepada Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Hasil Kajian/Penelitian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan,
 - e. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp1.931.237.000,00 kepada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa Aset Tak Berwujud Lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan,
 - f. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp306.955.000,00 kepada Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Lisensi atas Audit Surveillance ISO 9001:2008 untuk Proses Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dan Pemberian Sertifikat SPM Kapal Angkutan Penyeberangan,
 - g. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta senilai Rp3.251.490.400,00 yang merupakan transaksi Transfer Hasil Kajian dalam rangka Likuidasi BPTD Wilayah X yang berubah Kode Satker akibat perubahan Kedudukan Kantor;
8. Penghapusan Aset Tak Berwujud yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini sebesar Rp227.866.344.501,00 yang terdapat pada Satker:
- a. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
 - b. Direktorat Angkutan Jalan;
 - c. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten;
 - e. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB;
 - f. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalteng;

- g. BPTD Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
9. Penghapusan Aset Tak Berwujud Semester I Dokumen TAYL atas ATB yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini sebesar Rp2.873.591.100,00 yang terdapat pada Satker:
 - a. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Penghapusan Aset Tak Berwujud Semester II Dokumen TAYL atas ATB yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini sebesar Rp2.873.591.100,00 yang terdapat pada Satker BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.14 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp434.000.000,00** dan **Rp434.000.000,00**. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah ATB yang pengerjaannya melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai	Keterangan
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV	434.000.000	Reviu <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Terminal Tipe A Skouw
Total	434.000.000	

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.660.871.735.920,00** dan **Rp2.161.506.466.370,00**. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	1.580.275.670.920	1.990.539.645.380	(410.263.974.460)	(20,61)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	80.596.065.000	170.966.820.990	(90.370.755.990)	(52,86)
Jumlah	1.660.871.735.920	2.161.506.466.370	(500.634.730.450)	(23,16)

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Lainnya
a	b	c
000	Saldo Awal	2.161.506.466.370,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	298.280.702.742,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(91.228.462.174,)
371	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(1.980.000,)
372	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(3.989.700,)
374	Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(4.371.028.900,)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(72.246.418.600,)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(236.675.102.175,)
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(25.395.750.250,)
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(308.452.823.248,)
397	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (BMN yang dihentikan)	(1.687.879.420,)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(58.851.998.725,)
	Jumlah	1.660.871.735.920,

Saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp (500.634.730.450,00) atau -23,16 persen dari saldo per 31 Desember 2020, diantaranya yang signifikan berasal dari transaksi:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp298.280.702.742,00 diantaranya merupakan transaksi pada Satker:
 - a. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
 - c. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
 - e. BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT;
 - f. BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - g. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (403869).
2. Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp91.228.462.174,00 dilakukan atas data anomali K3 pada Satker:
 - a. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan,
 - b. Direktorat Lalu Lintas Jalan,
 - c. Direktorat Angkutan Jalan,
 - d. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan,
 - e. BPTD Wilayah I Provinsi Aceh,
 - f. BPTD Wilayah V Provinsi Jambi,
 - g. BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,
 - h. BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur,
 - i. BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT,
 - j. BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo,
 - k. BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, dan
 - l. BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku.
3. Penghapusan BMN Yang Dihentikan senilai Rp72.246.418.600,00 yang signifikan terdapat pada Satker:
 - a. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berupa Penghapusan Kajian/Studi yang sudah habis

- manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini senilai Rp31.387.114.200,00;
- b. Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa Penghapusan Kajian/Studi yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini senilai Rp8.097.725.000,00;
 - c. BPTD Wilayah V Provinsi Jambi berupa Penghapusan Kajian/Studi yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini senilai Rp5.027.741.000,00;
 - d. BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT berupa Penghapusan Kajian/Studi yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini senilai Rp3.199.306.400,00 dan penghapusan alat angkutan yang tidak beroperasi senilai Rp598.175.000,00;
 - e. Direktorat Angkutan Jalan berupa Penghapusan Kajian/Studi yang sudah habis manfaatnya, tidak bisa dikapitalisasi ke aset induk, dan tidak lagi relevan pada masa saat ini senilai Rp1.613.750.000,00;
4. Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp236.675.102.175,00 pada Satker BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam rangka Likuidasi karena perubahan Kode Satker akibat perubahan Kedudukan Kantor;
 5. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) senilai Rp25.395.750.250,00 diantaranya merupakan:
 - a. transaksi hibah keluar berupa KMP Teluk Ambon kepada Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp18.082.501.250,00 pada Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. transaksi hibah keluar berupa Prasarana untuk Angkutan Umum Massal (BRT), Fasilitas Pejalan Kaki, dan Penunjang ATCS di Kota Pekanbaru kepada Pemkot Pekanbaru senilai Rp4.371.028.900,00 pada Satker BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri;

c. transaksi hibah keluar berupa ... kepada ... senilai Rp 7.313.249.000,00 pada Satker BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Reklasifikasi Keluar (BMN Yang Dihentikan) Rp308.452.823.248,00
7. Reklasifikasi BMN ke BPYBDS senilai Rp1.687.879.420,00 berupa Dermaga Merak pada Satker Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah memiliki nilai yang cukup signifikan dapat dikelompokkan menjadi Barang Milik Negara yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, BMN yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), BMN Rusak Berat yang akan Dihapuskan dan BMN yang akan digunakan kembali serta dikapitalisasi ke Aset Tetap sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Akun	Uraian	Nilai	Aset Diserahkan	Rusak Berat	Reklas ke Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7
1	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.580.275.670.920	1.389.323.013.578	161.445.677.997	29.506.979.345
2	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	80.596.065.000	0	80.596.065.000	0
		TOTAL	1.660.871.735.920,	1.397.222.211.578	234.140.564.997	29.506.979.345

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp(646.749.694.264,00)** dan **Rp(776.216.351.875,00)**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	987.312.585.138	26.378.209.708	960.934.375.430
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	434.000.000	38.993.163	395.006.837
3	Aset Lain-Lain	1.660.871.735.920	620.332.491.393	1.040.539.244.527
Total		2.648.618.321.058	646.749.694.264	2.001.868.626.794

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan terhadap ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp472.781.000,00** dan **Rp507.442.250,00**.

Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, terdapat pada:

Direktorat Lalu Lintas Jalan, sebesar Rp232.375.000,00.

2. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar, terdapat pada:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Prov. Jawa Timur, sebesar Rp81.988.000,00 merupakan kekurangan pembayaran atas Paket Supervisi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yang disebabkan oleh keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran;
- b. Direktorat Lalu Lintas Jalan, sebesar Rp158.418.000,00.

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp454.548.990,00** dan **Rp55.638.398,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.19 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp22.026.261.145.825,00** dan **Rp21.381.983.527.128,00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar **Rp1.434.666.571.630,00** dan **Rp1.219.736.276.464,00**. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **17,62** persen dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan PNBP Lainnya		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.670.243.213	2.077.260.823
Pendapatan Pemanfaatan BMN Lainnya	76.032.000	0
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1.746.275.213	2.077.260.823
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	66.117.000.000	59.276.450.000
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.341.149.510.000	1.136.547.385.000
Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	(472.055.000)	0
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	4.688.183.475	3.565.419.762
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	1.254.290.000	0
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	10.251.040.000	9.602.090.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	121.757
Jumlah Pendapatan Jasa	1.422.987.968.475	1.208.991.466.519
Pendapatan Denda		
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.691.402.484	8.664.065.050
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	0
Pendapatan Denda Lainnya	0	0
Jumlah Pendapatan Denda	9.691.402.484	8.664.065.050
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Persekot/uang Muka Gaji	1.500.000	3.000.000
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	239.425.458	484.072
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	240.925.458	3.484.072
Jumlah	1.434.666.571.630	1.219.736.276.464

Terdapat selisih antara Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional senilai Rp218.694.171.630,00. Hal tersebut disebabkan karena Pengakuan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah sedangkan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran namun tidak dicatat dalam Pendapatan PNB-P-Laporan Operasional, antara lain: Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp26.600.000,00; Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.055.358.347,00; Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp942.968.232,00; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp25.322.700; Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp26.040.343.278; dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp5.596.987.276,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp433.799.162.888,00** dan **Rp427.211.038.835,00**.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	168.044.820.570	164.209.322.020	0,02
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(4.471.400)	(11.896.201)	(0,62)
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.650.175	2.483.519	0,07
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(18.063)	(22.551)	(0,20)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.505.151.814	13.409.172.680	0,01
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(1.021.908)	(397.610)	1,57
Beban Tunj. Anak PNS	3.986.832.557	3.967.228.662	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	2.381.605.000	2.391.470.000	(0,00)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(1.065.000)	(7.788)	135,75
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	(740.000)	(1,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	356.740.000	235.765.000	0,51
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(355.000)	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	1.251.778.652	918.290.301	0,36
Beban Tunj. Beras PNS	10.902.311.760	9.235.045.180	0,18
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	(941.460)	(144.840)	5,50
Beban Uang Makan PNS	28.841.486.000	27.542.067.775	0,05
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(1.230.250)	(30.996.400)	(0,96)
Beban Tunjangan Umum PNS	8.687.160.000	8.423.525.000	0,03
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(20.172.000)	(2.795.000)	6,22
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	0	0
Beban Uang Lembur	10.447.226.900	15.157.458.570	(0,31)
Pengembalian Beban Uang Lembur	(800.000)	(6.290.900)	(0,87)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	185.480.235.101	181.718.488.898	0,02
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(219.820.560)	(7.812.480)	27,14
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	161.060.000	61.825.000	1,61
Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	433.799.162.888	427.211.038.835	0,02

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp71.918.384.560,00** dan **Rp60.340.157.300,00**

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	69.489.521.141	57.737.629.202	20,35
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	2.047.094.205	1.843.673.552	11,03
Beban Persediaan Lainnya	381.769.214	758.854.546	(49,69)
Jumlah	71.918.384.560	60.340.157.300	19,19

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.972.355.046.172,00** dan **Rp1.431.913.615.522,00**. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,74 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	222.243.012.621	152.855.939.715	45,39
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(14.593.277)	(9.142.600)	59,62
Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	894.166.000	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	15.834.883.460	13.943.181.352	13,57
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.533.064.867	599.172.326	155,86
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.562.911.000	13.512.558.200	37,38
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(38.160.000)	(17.760.000)	114,86
Beban Barang Operasional Lainnya	108.861.550.350	194.256.219.376	(43,96)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(1.530.000)	(3.168.000)	(51,70)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36.678.672.297	0	0
Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	(12.720)		
Beban Bahan	13.065.317.182	11.198.521.038	16,67
Pengembalian Beban Bahan	0	0	0
Beban Honor Output Kegiatan	78.883.766.874	69.877.779.017	12,89
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(2.450.000)	(25.200.000)	(90,28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	726.932.298.488	686.010.655.412	5,97
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(70.001.426)	(10.513.000)	565,86
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.002.207.001	0	0
Beban Langganan Listrik	12.694.801.163	7.084.938.710	79,18
Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	1.790.357.604	1.317.605.596	35,88
Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	0	0
Beban Langganan Air	1.061.547.950	693.244.609	53,13
Pengembalian Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.242.546.413	19.162.011.118	(15,24)
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	2.238.505.000	1.123.054.000	99,32
Beban Sewa	83.605.676.215	73.184.623.834	14,24
Pengembalian Beban Sewa	0	(12.720.000)	(100,00)
Beban Jasa Profesi	10.836.003.934	8.510.598.500	27,32
Pengembalian Beban Profesi	0	(24.700.000)	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	50.040.776.800	14.391.436.010	247,71
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	13.840.248.601	0	0
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(7.985.000)	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.629.440.096	900.719.400	80,90
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	35.350.000	0	0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp193.861.201.069,00** dan **Rp150.145.292.125,00**.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.463.338.864	47.360.821.059	69,89
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4.966.292.250	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	579.990.650	546.474.250	6,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.102.950.606	84.659.640.258	27,69
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(70.410.000)	(3.040.500)	2.215,74
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.619.680.517	844.835.169	91,72
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.500.000	0	0
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	194.819.900	973.506.000	(79,99)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	(2.201.100)	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.846.563.566	8.408.752.954	(78,04)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	826.668.510	2.012.902.328	(58,93)
Beban Persediaan suku cadang	189.100.656	313.109.492	(39,61)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	11.198.900	61.998.865	(81,94)
Jumlah	193.861.201.069	150.145.292.125	29,12

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp191.777.053.745,00** dan **Rp231.980.118.482,00**.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	147.877.670.711	161.707.063.477	(8,55)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(46.765.000)	(117.906.100)	(60,34)
Beban Perjalanan Tetap	694.823.605	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.468.506.619	3.474.005.575	(28,94)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.202.796.099	13.645.463.578	(32,56)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.017.673.900	4.585.553.500	(77,81)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.384.961.811	47.465.148.680	(35,98)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	(4.504.000)	(100)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	177.386.000	1.225.293.772	(85,52)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	0	0	0
Jumlah	191.777.053.745	231.980.118.482	(17,33)

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp407.835.822.380,00** dan **Rp479.217.130.493,00**

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Persediaan pita cukai, materai, dan leges	0	53.999.000	(100)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	186.938.879.259	328.782.137.000	(43,14)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	188.158.895.521	114.619.157.808	64,16
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	32.738.047.600	34.450.223.685	(4,97)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	1.311.613.000	(100)
Jumlah	407.835.822.380	479.217.130.493	(14,90)

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.378.453.546.059,00** dan **Rp1.414.103.022.282,00**

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.027.074.548.972	1.087.687.612.672	(5,57)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.627.551.881	101.076.370.328	10,44
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	32.935.645.037	37.067.100.168	(11,15)
Beban Penyusutan Irigasi	109.325.962.491	52.891.718.244	106,70
Beban Penyusutan Jaringan	1.292.288.676	1.207.473.160	7,02
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.500.000	927.254.638	(99,41)
Beban Amortisasi Paten	0	0	0
Beban Amortisasi Software	9.057.508.341	6.919.652.236	0
Beban Amortisasi Lisensi	58.867.625	58.867.625	0
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	19.528.775	14.614.388	33,63
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	87.056.144.261	126.252.358.823	(31,05)
Jumlah	1.378.453.546.059	1.414.103.022.282	(2,52)

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp2.413.369,00**.

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.024.926.579	949.221.661	113,32
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(411.457.763.919)	(229.658.926.176)	79,16
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	38.336.564.196	310.471.628.848	(87,65)
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(36.755.576)	(113.758.463.187)	(99,97)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(371.133.028.720)	(31.996.538.854)	1.059,92

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp21.381.983.527.128,00** dan **Rp20.332.749.464.060,00**

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp3.571.012.363.492,00** dan **Rp3.007.173.050.798,00**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.4.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00**.

E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp(341.638.622.549,00)** dan **Rp51.488.996,00**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Rincian Nilai Koreksi Nilai Persediaan

Nama Satker	Nilai
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	(51.854.000)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	(54.735.669)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	79.423.317.999
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	94.357.927.948
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	167.963.966.271
TOTAL	341.638.622.549

Penjelasan koreksi nilai persediaan, antara lain sebagai berikut:

- l. Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II melakukan reklasifikasi keluar dari SIMAK ke Persediaan senilai Rp51.854.000,00 dan Rp54.735.669,00, namun belum dilakukan reklasifikasi masuk di aplikasi Persediaan sehingga nilai tersebut dicatat sebagai saldo awal pada Tahun Anggaran 2021;
- m. Nilai Persediaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV dengan total nilai Rp341.745.212.218,00 merupakan nilai *Off Balance Sheet* dan tercatat dalam Daftar Barang Persediaan Tidak Dikuasai.

E.4.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp1.165.245.808.006,00** dan **Rp97.428.494.280,00**. Koreksi Atas

Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap.

Rincian Nilai Transaksi Koreksi atas Reklasifikasi

Nama Satker	Nilai
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	(27.331.085.761,)
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	31.077.898,
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	(4,)
Direktorat Lalu Lintas Jalan	348.590.715,
Direktorat Angkutan Jalan	1.684.248.965,
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	(24.021.153.991,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I	1.077.304.620,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	9.629.152.662,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	5.996.929.808,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	(30.439.691.913,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V	(66.088.000,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI	(8.521.133.752,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	(745.125.105,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII	(399.055.238,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	7.621.897.912,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	(14.557.878.001,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	(537.940.099.009,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	1.051.567.976,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	(81.377.948.333,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	(10.786.822.049,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	2.495.294.510,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	(45.217.385.536,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII	(27.301.735.082,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX	3.017.073.235,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	(428.439.803,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII	(92.546.167.067,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	(77.007.470.970,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	(188.661.736.116,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV	(1.214.642.857,)

Nama Satker	Nilai
Balai Pengelola Transportasi Darat (Bptd) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan DIY	(29.635.287.720,)
Jumlah	(1.165.245.808.006)

E.4.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp(33.007.694.541,00)**

E.4.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp(613.158.283.932,00)** dan **Rp(79.284.049.564,00)** Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2021 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2021, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2021.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi senilai Rp558.190.461.024,00 dan Rp54.967.822.908,00, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Nama Satker	Nilai
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(53.827.217.949,)
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	3.408.437.923,
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	3.031.082.685,
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	530.187.806,
Direktorat Lalu Lintas Jalan	43.651.479.532,

Nama Satker	Nilai
Direktorat Angkutan Jalan	99.098.233.080,
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	256.726.497.961,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I	104.350.872,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	(5.193.535.594,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	8.795.246.879,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV	1.108.777.515,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V	(193.261.854,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI	8.816.250.448,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	26.858.109.865,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII	(13.462.230.630,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	(7.867.813.765,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	1.326.101.506,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	7.651.705.903,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	547.033.977,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	62.157.691.242,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	12.083.446.114,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	1.448.149.510,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	11.050.194.658,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	996.380.068,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII	339.525.000,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX	17.277.071.407,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	(5.604.018.756,)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI	13.500.076.679,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII	52.734.412.543,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	6.052.688.279,
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV	16.588.185.774,
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	(3.514.399.241,)
Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palu	(8.028.378.413,)
Jumlah	558.190.461.024

Rincian Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Nama Satker	Nilai
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(22.500.000)

Nama Satker	Nilai
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	2.381.834.800
Direktorat Lalu Lintas Jalan	18.342.286.103
Direktorat Angkutan Jalan	3.980.547.460
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	12.692.788.627
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	3.329.966.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	(2.080.250.772)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI	1.264.138.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII	127.419.381
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII	19.824.034
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV	2.862.091.100
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	496.269.200
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	92.235.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI	201.992.323
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII	7.519.023.358
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan DIY	3.760.158.294
Jumlah	54.967.822.908

E.4.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp(245.538.166.530,00)** **Rp(440.071.510.500,00)**. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Rincian Nilai Transaksi Koreksi Lainnya

Nama Satker	Nilai	Keterangan
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	231.695.961.617	Koreksi Piutang PNB SRUT dan Piutang Lainnya atas Pengembalian Belanja Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Terpusat dan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor

Nama Satker	Nilai	Keterangan
BPTD Wilayah I Prov. Aceh	(24.270.980)	Koreksi Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Terminal Tipe A Langsa dan Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon
BPTD Wilayah II Prov. Sumatera Utara	253.826.188	Koreksi Piutang Liannya atas Pengembalian Belanja Pembangunan Pelabuhan Ambarita Tahap II, Pelabuhan Simanindo Tahap III, Pelabuhan Balige Tahap II, Pelabuhan Muara Tahap III dan Pelabuhan Tiga Ras Tahap III
BPTD Wilayah VII Prov. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	63.848.844	Koreksi Piutang Liannya atas Pengembalian Belanja Pembangunan Dermaga 16 Ilir Tahap II, Dermaga II Pelabuhan Tj. Api-API, dan Pelabuhan Tj. Nyatoh Tahap III
BPTD Wilayah IX Prov. Jawa Barat	(32.984.250)	Koreksi Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran pelaksanaan pekerjaan Ketatalaksanaan Operasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan berbasis Excelent Service Terminal Tipe A Guntur Melati Garut
BPTD Wilayah XI Prov. Jawa Timur	(8.323.073)	Koreksi Piutang Liannya atas Pengembalian Belanja Pengadaan dan Pembangunan ATCS Kota Malang
BPTD Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat	1.121.827.400	Pengakuan Belanja dibayar dimuka atas Pekerjaan Pembangunan TBI Nanga Badau Tahap II TA. 2019
BPTD Wilayah XIV Prov. Kalimantan Barat	12.468.280.784	Pengakuan Belanja dibayar dimuka atas Pekerjaan Pembangunan TBI Aruk Sambas Tahap III TA. 2019
Jumlah	245.538.166.530	

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp4.250.379.247.194,00** dan **Rp4.706.147.373.755,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.669.994.570.892
Diterima dari Entitas Lain	(1.468.354.151.463)
Transfer Keluar	(2.184.315.735.721)
Transfer Masuk	2.130.482.543.762
Pengesahan Hibah Langsung	102.572.019.724
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	4.250.379.247.194

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
3. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun

anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar **Rp1.468.354.151.463,00** sedangkan DKEL sebesar **Rp5.669.994.570.892,00**.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.130.482.543.762,00**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.184.315.735.721,00**.

Terdapat selisih transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar **Rp53.833.191.959,00**, yang berasal dari transaksi:

1. Transfer Masuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang terdapat pada Jalan Nasional pada BPTD Wil. X Prov. Jawa Tengah dan DIY dari satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Prov. Jawa Tengah, Kementerian PUPR sebesar Rp1.046.161.038,00;
2. Transfer Keluar (alih status) Tanah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ke Kementerian PUPR dalam rangka KPBU, dengan rincian:
 - a. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau sebesar Rp5.216.848.970,00; dan
 - b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang sebesar Rp45.636.420.680,00.

3. Transfer Keluar (alih status) Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp687.783.679,00, dengan rincian:
 - a. Politeknik Negeri Padang sebesar Rp350.262.172,00; dan
 - b. Politeknis Negeri Indramayu sebesar Rp337.521.507,00.
4. Transfer Keluar (alih status) Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Agama sebesar Rp1.980.810.822,00, dengan rincian:
 - a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebesar Rp337.521.507,00;
 - b. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Hasanuddin Banten sebesar Rp339.026.457,00;
 - c. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan sebesar Rp432.042.858,00;
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga sebesar Rp432.042.858,00; dan
 - e. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja sebesar Rp440.177.142,00.
5. Transfer Keluar Peralatan Pengujian (*Blue Reader*) dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan kepada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, BPSDM Perhubungan sebesar Rp16.089.084,00;
6. Transfer Keluar Halte Bus di Bogor dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan kepada satker Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp398.953.333,00; dan
7. Transfer Keluar Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada BPSDM Perhubungan sebesar Rp942.446.429,00, dengan rincian:
 - a. Politeknik Penerbangan Jayapura sebesar Rp 475.328.572,00;
 - b. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebesar Rp467.117.857,00.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar memiliki nilai yang cukup besar, diantaranya merupakan:

1. Proses likuidasi yang disebabkan perubahan lokasi kedudukan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa

- Tengah dan DIY dari Semarang ke Surakarta yang mengakibatkan perubahan kode satker dari Kode Satker 403850 menjadi 403869;
2. Pemindahan pencatatan aset Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 3. Transfer Peralatan Pengujian (*Blue Reader*) dan Mobil Uji Keliling dari satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 4. Transfer Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang dari satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 5. Pemindahan pencatatan Bangunan Gedung pada Terminal Tipe A Mangkang, Terminal Purwokerto, dan Terminal Anak Air, dari Direktorat Prasarana kepada Balai Pengelola Transportasi Darat;
 6. Transfer Persediaan Blanko Tilang dari Direktorat Lalu Lintas Jalan dan Blanko Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp102.572.019.724,00**

Pengesahan Hibah Langsung berasal dari Hibah Masuk Aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp22.026.261.145.825,00** dan **Rp21.381.983.527.128,00**.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Terdapat 2 (dua) peristiwa penting pada Ditjen Perhubungan Darat yang terjadi setelah tanggal Neraca (31 Desember 2021), yaitu:

1. Tertabraknya Dermaga Jetty Pelabuhan Ewer (Pekerjaan BPTD Wil. XXV Prov. Papua dan Papua Barat)

- a. Pada hari Jumát, 07 Januari 2022 telah terjadi insiden tertabraknya Dermaga Jetty di Pelabuhan Ewer oleh Tongkang Noah 3002 yang mengakibatkan rubuhnya bagian depan Dermaga Pelabuhan Ewer. Kejadian tersebut, dipengaruhi oleh arus sungai yang cukup deras dan mesin kapal tunda (*Tugboat*) TB Nelly 63 tidak dalam kondisi prima sehingga laju *Berge* (tongkang) Noah 3002 (3141 GT) tidak dapat dikendalikan dan kemudian menabrak Dermaga Jetty Pelabuhan Ewer.
- b. Atas kejadian tersebut, KUPP Kelas III Agats telah memanggil dan memeriksa Nahkoda dan ABK serta tidak memberikan Surat Izin Berlayar.
- c. Menindaklanjuti kejadian tersebut, telah dilakukan rapat pembahasan bersama dengan para pihak dan PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri, Tbk. dengan itikad baik bersedia mengganti kerugian atas kerusakan Dermaga Pelabuhan Ewer yang diakibatkan tertabraknya Dermaga Pelabuhan Ewer oleh Tongkang Noah 3002 dengan membangun kembali Dermaga Pelabuhan Ewer seperti kondisi semula berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- d. Sebagai jaminan terhadap pemenuhan ganti kerugian tersebut, PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri, Tbk. bersedia untuk menyerahkan *Groose* Akta Asli Kapal *Tug Boat* TB Nelly 63 dan Tongkang Noah 3002 kepada Kementerian Perhubungan dan akan dikembalikan apabila seluruh pemenuhan ganti kerugian telah dilaksanakan. (Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi, terlampir).

2. Robohnya Dermaga di Palambahen-Pangkoh (Dukungan *Food Estate*) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Pekerjaan BPTD Wil. XVI Prov. Kalimantan Tengah)

- a. Pekerjaan Pembangunan Dermaga di Pelabuhan Palambahen Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan pada 6 Agustus s.d. 26 Desember 2021. Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan s.d. 28 Januari 2022 dengan mekanisme Bank Garansi dan pengenaan denda keterlambatan.
- b. Kejadian diduga berawal dari timbunan yang baru dikerjakan pada malam hari, tanggal 22 Januari 2022 (saat air pasang) menyebabkan tanah timbunan menjadi jenuh (*saturated soil*). Dengan bertambahnya massa berat tanah yang tiba-tiba surut pada siang hari mendorong tiga titik tiang pancang dermaga yang mengakibatkan terdorongnya semua sistem struktur tiang pancang dermaga dan struktur beton bertulang yang baru berusia umur beton 14 hari.
- c. Menindaklanjuti kejadian tersebut, telah dilakukan rapat pembahasan dengan para pihak dan PT. Gelora Megah Sejahtera selaku penyedia jasa bersedia untuk membangun kembali pekerjaan yang roboh dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.

F.2 Kebijakan Akuntansi dan Pedoman/Petunjuk Teknis atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan – Bentuk Barang

Mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Oktober 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, telah dilakukan penyeragaman kebijakan

akuntansi atas belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), telah dirumuskan beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Perlakuan atas barang dengan kondisi normal/ideal, di mana barang tersebut masih dikuasai oleh satker dan belum dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda.

- a. Belanja dalam rangka perolehan barang yang diniatkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dialokasikan dan direalisasikan menggunakan akun Belanja Barang, dalam hal ini akun 526.
- b. Barang yang diperoleh dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan dicatat sebagai persediaan dan ditatausahakan menggunakan kode barang untuk diserahkan pada Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.
- c. Penyerahan barang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pemindahtanganan BMN.
- d. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat barang yang masih dalam proses pembangunan atau barang yang dikuasai oleh satker dan belum diserahkan kepada masyarakat/pemda, barang tersebut tetap disajikan sebagai persediaan dalam neraca.
- e. Apabila barang dengan tujuan untuk diserahkan bersifat unik antara satu barang dengan barang yang lain (spesifikasi dan nilai perolehan), dalam rangka menjaga validitas harga masing-masing barang, satker agar mencatat beberapa persediaan dimaksud menggunakan kode barang yang berbeda. Dengan demikian, nilai masing-masing barang sejak perolehan sampai dengan penyerahan tidak terdampak Koreksi Otomatis (KO) akibat penerapan Harga Perolehan Terakhir (HPT).
- f. *Stock opname* dilakukan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada tanggal pelaporan.

b. Perlakuan atas barang yang secara fisik tidak lagi dikuasai oleh satker, namun prosedur pemindahtanganan barang belum selesai.

Mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, diatur beberapa ketentuan terkait Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai, yaitu barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan

penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai ketentuan yang berlaku belum tuntas, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal BMN untuk diserahkan sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya:
 - 1) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
 - 2) Tidak disajikan dalam neraca; dan
 - 3) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan atas barang yang belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan seharusnya tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan.
- 3) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN tersebut, Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
- 4) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:
 - 1) Mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
 - 2) Menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan
 - 3) Melakukan penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan.
- 5) *Stock opname* tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik sudah tidak dikuasai atau telah diserahkan kepada masyarakat/pemda dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
- 6) Sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e hanya berlaku atas barang yang tidak dikuasai, di mana penyerahannya dilakukan sebelum PMK Nomor 181/PMK.06/2016 ditetapkan. Selanjutnya, diharapkan penatusahaan barang untuk diserahkan dilakukan secara tertib, di mana penyerahan dan penghapusan barang dilakukan setelah prosedur pemindahtanganan dilakukan secara tuntas.

- 7) Pada praktiknya di lapangan, terdapat barang tidak dikuasai di mana penyerahannya dilakukan setelah PMK Nomor 181/PMK.06/2016 ditetapkan (setelah 28 November 2016). Dengan mempertimbangkan bahwa:
- 1) Belum terdapat kebijakan mengenai pengelolaan atau penatausahaan BMN yang secara spesifik mengakomodasi pengaturan atas BMN dengan kondisi ini;
 - 2) Barang yang secara fisik telah diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sehingga tidak lagi memenuhi definisi aset menurut PP Nomor 71 Tahun 2010;
 - 3) Pengamanan aset serta akuntabilitas atas barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda harus dilakukan secara selaras, maka barang yang secara fisik tidak dikuasai pemerintah di mana penyerahannya kepada masyarakat/pemda dilakukan sejak tanggal penerbitan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
 - 8) Selanjutnya penatusahaan barang untuk diserahkan wajib dilaksanakan secara tertib, di mana penyerahan dan penghapusan barang dilakukan setelah prosedur pemindahtanganan dilakukan secara tuntas.

c. Perlakuan atas barang untuk diserahkan yang dicatat selain sebagai persediaan

Terdapat beberapa kondisi pencatatan terhadap BMN yang akan diserahkan kepada masyarakat yang dicatat selain sebagai persediaan, diantaranya:

- 1) Barang untuk diserahkan tersebut merupakan hasil pengadaan tahun-tahun lampau dari realisasi akun Belanja Modal, sehingga dicatat oleh satker sebagai aset tetap.
- 2) Terdapat satker yang melakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya, dengan pertimbangan bahwa aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional satker.

Guna keseragaman perlakuan, diatur ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Satker agar mereklasifikasi barang-barang yang saat ini dicatat sebagai aset tetap atau aset lainnya menjadi persediaan. Transaksi reklasifikasi keluar atas aset tetap atau aset lainnya menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LPE
K	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LPE
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	Neraca
K	Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LO

- b. Sedangkan transaksi reklasifikasi masuk persediaan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Persediaan	xxx	Neraca
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	LPE

- c. Reklasifikasi masuk persediaan dicatat menggunakan nilai buku aset tetap atau aset lainnya pada saat dilakukan reklasifikasi keluar.
- d. Apabila barang dimaksud merupakan perolehan tahun-tahun lampau sehingga nilai bukunya telah nihil (nol), satker tidak perlu merekam transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk. Dengan demikian, barang tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap atau aset lainnya. Atas kondisi ini, satker agar mengungkapkannya

secara memadai dalam CaLK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sekurang-kurangnya mencakup jenis dan spesifikasi barang, tahun perolehan, nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta progres atas penyerahan barang tersebut.

- e. Satker agar mengidentifikasi dan menginventarisasi kembali barang-barang tersebut, serta menetapkan tindak lanjut atas barang-barang dimaksud (dipindahtangankan, dihapuskan, digunakan dalam operasional satker, dan lain sebagainya).

F.3 Perubahan Organisasi pada Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018, lokasi kedudukan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Prov. Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berpindah dari Semarang menjadi Surakarta.

Sebagai bentuk tidak lanjut perubahan administrasi KPPN Pembayar dari KPPN Semarang II menjadi KPPN Surakarta, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan telah diterbitkan referensi kode/nomenklatur satker baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Satker	Nama Satker	Provinsi	Kode BA/Unit	Kode Lokasi	Kode KPPN
403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Jawa Tengah	022.03	03.56 Kota Surakarta	028 KPPN Surakarta

Selanjutnya telah dilakukan proses likuidasi dilakukan untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajiban dari satker lama ke satker yang baru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1737 Tahun 2021 tentang Likuidasi Entitas pada Balai

Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Satker yang Dilikuidasi			Satker yang Ditunjuk		
Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN
403850	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	134 KPPN Semarang II	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	028 KPPN Surakarta

F.4 Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

a. Terminal Tipe A

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Kewenangan BPTJ	Total Terminal Tipe A
100	6	6	4	20	9	145

Dari 145 Terminal Tipe A, terdapat 100 Terminal Tipe A yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir, 6 Terminal Tipe A dalam proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 6 Terminal Tipe A masih pada tahap Inventarisasi Akhir (Proses penyusunan BAST), Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 29 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang	
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres	
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Barangnangsiang	
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	
6	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang	
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar	
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	
9	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe	
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene	Tidak termasuk dalam simpul Terminal Tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tahun 2003 dan tidak termasuk dalam rencana penetapan lokasi Terminal Tipe A
11	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar	
12	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri	
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun	
14	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur	
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Terminal Penyabungan	
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh
18	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Cicahem	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
19	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang
21	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
				Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
22	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Situbondo	Terminal Situbondo	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
24	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong
25	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN
26	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B. Sudah digantikan oleh terminal Liwas
27	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C
28	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir
29	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Berdasarkan Surat No 550/5/28/Dishub/2018 Pemkab Labuhan Batu akan menggunakan terminal tersebut sebagai perkantoran organisasi perangkat daerah Kab Labuhan Batu serta menyarankan kemenhub untuk mencari lahan pengganti guna dibangun Terminal Tipe A

b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total UPPKB
110	8	16	1	6	141

Dari total jumlah 141 UPPKB, terdapat 110 UPPKB yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir pada *Lampiran Vb*, terdapat 8 UPPKB yang sedang proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 16 UPPKB yang masih dalam proses Inventarisasi Akhir (Proses Penyusunan BAST), 1 UPPKB masih dalam proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 6 tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Nama UPPKB	Justifikasi
1	Riau	Tarantang Manuk	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Palalawan, akan beralih fungsi.
2	Jawa Tengah	Butuh	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, Sudah Tidak Beroperasi.
3	Jawa Tengah	Tugu	Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang, akan beralih fungsi.
4	Jawa Tengah	Katon Sari	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Demak, Sudah Tidak Beroperasi.
5	Bengkulu	Air Sebakul	Lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lokasinya tidak strategis sehingga tidak efektif untuk dioperasikan. UPPKB akan beralih fungsi.
6	Sulawesi Utara	Amurang	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, akan beralih fungsi.

F.5 Hibah Masuk

Sampai dengan 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerima Hibah Masuk dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi terkait Tindak Lanjut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Sampai dengan 31 Desember 2021, Hibah Masuk di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat pada Satuan Kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp102.572.019.724,00. Dari nilai tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Tanah	36.928.221.761
2.	Peralatan dan Mesin	2.353.574.699
3.	Gedung dan Bangunan	46.905.434.814
4.	Jalan dan Jembatan	3.022.808.000
5.	Irigasi	7.821.984.450
6.	Jaringan	150.000
7.	Aset Tak Berwujud	5.539.846.000
Jumlah		102.572.019.724

F.6 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Dalam rangka penyediaan sarana perhubungan darat khususnya terkait penyediaan angkutan jalan dan penyeberangan, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerjasama sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan Kapal Penyeberangan dan Bus. Penyertaan Modal Negara berupa Kapal Penyeberangan akan dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Bus akan dioperasikan oleh Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan Perusahaan Umum DAMRI. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Tahun	Unit	Jumlah Nilai
1	Perum PPD	2015	600	708.385.000.000
2	Perum Damri	2015 s.d 2016	352	305.609.200.000
3	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2014 s.d 2020	22	613.853.880.278
4	Perum Damri	2020	138	68.168.400.000
Total			974	1.627.848.080.278

F.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Perhubungan Tahun 2020, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan PNPB atas Sertifikat Registrasi Uji Tipe pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum memadai;
- b. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang pada Satker Direktorat Angkutan Jalan dan Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senilai Rp368.871.446,00 (telah dilakukan pengembalian ke kas Negara seluruhnya);
- c. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Subsidi Perintis pada 7 (tujuh) satker senilai Rp5.075.899.953,49;
- d. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada 6 (enam) satker senilai Rp12.673.452.432,73;
- e. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dipungut pada 3 (tiga) satker minimal senilai Rp5.631.091.012,48;
- f. Jaminan Pelaksanaan atas Pemutusan Kontrak pada satu satker senilai Rp303.936.750,00 yang belum dicairkan; dan
- g. Penatausahaan Aset Tetap berupa Tanah belum memadai.

Penjelasan terkait progress Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2020 terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan ini.

F.8 Tindak Lanjut Data Anomali BMN (Data BMN Tidak Normal)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 *Audited*, sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022, terdapat temuan data anomaly BMN berdasarkan *database* e-Rekon&LK terhadap Aset Tetap, Aset Tak Berwujud (ATB),

dan Aset Lain-lain (aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah), meliputi:

1. Nilai Perolehan Aset Minus,
2. Nilai Buku Aset Minus,
3. Nilai Perolehan Aset Tetap tercatat dalam dua kelompok aset,
4. Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Positif, dan
5. Aset tidak memiliki penyusutan/amortisasi.

Menindaklanjuti temuan di atas, Kementerian Keuangan telah melakukan identifikasi permasalahan dan koordinasi baik secara formal maupun informal kepada K/L dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil identifikasi dan koordinasi dimaksud, dapat disimpulkan bahwa data anomali BMN pada satker pengguna Aplikasi SIMAK BMN mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Adanya data BMN tidak normal, dan
2. Adanya selisih data antara aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK.

Data tidak normal dapat disebabkan adanya kesalahan prosedur penggunaan aplikasi maupun *error database*. Sementara selisih data antar-aplikasi dapat disebabkan tidak ter-*update*-nya data e-Rekon&LK sesuai data SIMAK BMN.

Untuk menjaga validitas data BMN yang disajikan pada LKPP, permasalahan data anomali BMN harus segera diselesaikan. Selain itu, sehubungan dengan implementasi SAKTI secara penuh pada tahun 2022, permasalahan data BMN tidak normal dan selisih data antara Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK harus diselesaikan sebelum dapat dilakukan migrasi saldo awal ke SAKTI. Untuk itu, saat ini telah dikembangkan fitur atau menu Kertas Kerja Konfirmasi (K3) pada Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK.

Analisis dan Tindak Lanjut K3 pada SIMAK BMN

Data K3 disajikan dalam Kertas Kerja Konfirmasi. Setiap kode barang dan NUP disajikan dalam satu baris data yang merupakan perbandingan data e-Rekon&LK dan SIMAK BMN apabila memiliki kesamaan Kode

lokasi, Kode barang, NUP, Flag SAP, Tanggal Perolehan, dan Status. Data K3 disajikan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut:

1. Data Wajar Sama,
2. Data Wajar Beda,
3. Data Tidak Wajar Sama, dan
4. Data Tidak Wajar Beda.

Data Wajar/ Normal atau Data Tidak Wajar/ Tidak Normal ditentukan oleh hasil validasi e-Rekon&LK dan SIMAK BMN berdasarkan 17 kriteria data BMN tidak normal. Jika salah satu hasil validasi baik di e-Rekon&LK maupun SIMAK BMN menunjukkan adanya data tidak normal maka data BMN akan dikategorikan sebagai Data Tidak Wajar. Sebaliknya, jika hasil validasi tidak menunjukkan adanya data tidak normal maka data BMN akan dikategorikan sebagai Data Wajar. Data Sama atau Beda ditentukan oleh kesamaan elemen perbandingan data, yang meliputi Umur, Kuantitas, Nilai Aset, Nilai Susut, dan Nilai Buku antara data e-Rekon&LK dan SIMAK BMN. Jika elemen perbandingan data menunjukkan adanya selisih data maka data BMN akan dikategorikan sebagai Data Beda. Sebaliknya, jika elemen perbandingan data tidak menunjukkan adanya selisih data maka data BMN akan dikategorikan sebagai Data Sama.

Kategori Data	Kondisi Data
Data Wajar Sama	▪ Hasil validasi data normal ▪ Elemen perbandingan data tidak selisih
Data Wajar Beda	▪ Hasil validasi data normal ▪ Elemen perbandingan data selisih
Data Tidak Wajar Sama	▪ Hasil validasi data tidak normal ▪ Elemen perbandingan data tidak selisih
Data Tidak Wajar Beda	▪ Hasil validasi data tidak normal ▪ Elemen perbandingan data selisih

Berdasarkan data K3, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan analisis dan tindak lanjut atas data tidak normal dan selisih data antar aplikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa data yang masih muncul dalam Daftar Validasi K3 TA 2021 pada aplikasi e-Rekon&LK dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

F.9 Pekerjaan Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) pada Direktorat Angkutan Jalan

Pasal 158 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di kawasan perkotaan. Penyelenggaraan angkutan umum memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan baik regional maupun nasional serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan layanan angkutan yang memadai dan menjangkau semua wilayah.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat menetapkan suatu kebijakan atau program yang disebut dengan Buy The Service atau pembelian layanan umum sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dan menciptakan sistem transportasi publik yang lebih tertata. Program Buy The Service merupakan pembelian layanan umum oleh Pemerintah kepada perusahaan angkutan umum (BUMN, BUMD, ataupun swasta) dengan kriteria terlebih dahulu telah ditetapkan dan disepakati dengan anggaran disediakan oleh pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah membayar operator berdasarkan nilai angkut yang dihitung per kilometer. Dalam mengoptimalkan program Buy The Service, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan prima antara lain mencakup keamanan, keterjangkauan, keselamatan, kesetaraan, kenyamanan dan keteraturan. Setiap pelanggaran terhadap SPM akan diberikan sanksi berupa pemotongan pembayaran capaian layanan Operator.

Adapun pedoman dalam melaksanakan Buy The Service antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan
3. RPJMN 2020-2024 Proyek Prioritas Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan
4. Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024 Program Pengembangan Angkutan Massa Berbasis Jalan dengan skema pembelian layanan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2748/AJ.206/DRJD/2020 tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengelola Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dengan Pembelian Layanan
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2750/AJ.007/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pemberian Layanan pada Angkutan Umum Perkotaan
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2020 tentang Penetapan Pemberian Subsidi pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2020
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.2752/AJ.206/DRJD/2020 tentang Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dengan Pembelian Layanan
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.792/AJ.205/DRJD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Umum Perkotaan
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.415/AJ.005/DRJD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2020 tentang Penetapan Pemberian Subsidi pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dengan Skema Pemberian Layanan.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen, pengawasan operasional untuk menjaga Standar Pelayanan Minimal, evaluasi terhadap layanan yang ada serta verifikasi capaian operator, Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai manajemen pengelola BTS. Dan untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan efektivitas layanan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, Ditjen Perhubungan Darat bekerja sama dengan pihak ketiga (system IT BTS) yang mana telah menciptakan layanan IT seperti aplikasi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operator, dan website public.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghadirkan layanan jasa angkutan massal di kawasan perkotaan yang tersebar di 10 Kota dengan rincian kontrak dan realisasi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Sesuai Kontrak	Realisasi	Pihak Ketiga(Penyedia)
1	Kota Palembang (Bus Besar Pemerintah)	17.438.681.650	17.305.372.274	PT. Transmusi Palembang Jaya
2	Kota Palembang (Bus Sedang Pemerintah)	25.576.280.000	25.316.674.997	PT. Transmusi Palembang Jaya
3	Kota Yogyakarta (Bus Sedang Swasta)	30.258.135.000	29.856.987.006	PT. Jogja Tugu Trans
4	Kota Surakarta (Bus Sedang Long Swasta)	23.857.772.400	23.429.531.954	PT. Bengawan Solo Trans

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Sesuai Kontrak	Realisasi	Pihak Ketiga(Penyedia)
5	Kota Surakarta (Bus Sedang Swasta)	10.528.184.100	10.265.768.329	PT. Bengawan Solo Trans
6	Kota Surakarta (Bus Sedang Pemerintah)	21.928.032.000	21.211.753.809	PT. Bengawan Solo Trans
7	Kota Denpasar (Bus Sedang Swasta)	80.507.028.000	80.169.072.425	PT. Satria Trans Jaya
8	Kota Medan (Bus Besar Swasta)	23.283.532.500	21.875.483.861	PT. Medan Bus Transport
9	Kota Medan (Bus Sedang Swasta)	37.367.449.875	33.607.496.406	PT. Medan Bus Transport
10	Subsidi Layanan Freeder Buy The Service Kota Surakarta (BTS)	29.906.640.000	29.667.877.222	PT. Transportasi Global Mandiri
11	Kota Makassar	16.153.305.450	6.070.397.526	PT Sinarjaya Megahlanggeng
12	Kota Banjarmasin	7.925.846.280	4.027.889.093	PT. Bagong Dekaka

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Sesuai Kontrak	Realisasi	Pihak Ketiga(Penyedia)
13	Kota Bandung (K2&3)	2.225.654.858	1.723.087.632	PT. Big Bird Pusaka
14	Kota Bandung (K1,4,5)- Damri	1.998.089.730	1.998.089.730	Perum Damri
15	Kota Surabaya	2.279.970.330	2.279.970.330	PT. Seduluran Bus
16	Kota Banyumas	5.665.330.836	2.907.337.356	PT. Banyumas Raya Transportasi
17	Kota Surakarta (Koridor 5)	565.527.301	565.527.301	PT. Bengawan Solo Trans
Jumlah		337.465.460.310	312.278.317.251	



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Gedung Karya, JL. Merdeka Barat NO 8
Jakarta 10110



TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145,
3506143, 3862220



Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>